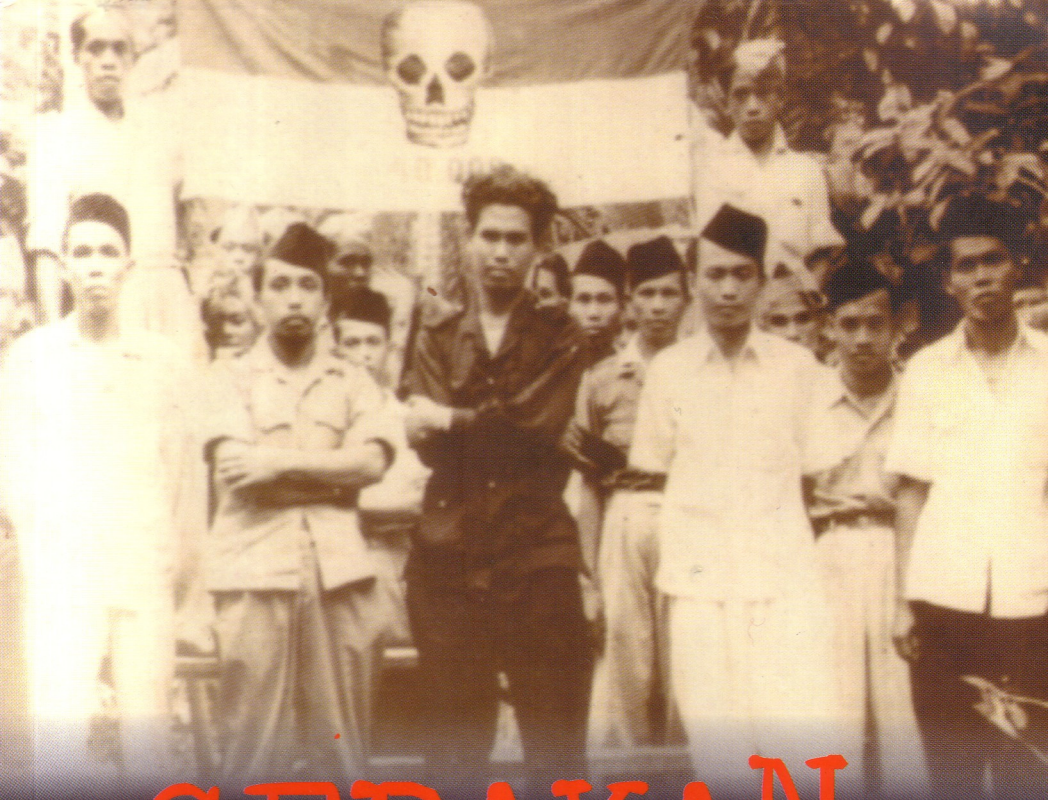




# GERAKAN TENGGORAK PUTIH

Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950

Wajidi

**GERAKAN TENGGORAK PUTIH**  
**Sebuah Kelompok Gerilya**  
**di Kalimantan Selatan**  
**1949-1950**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**GERAKAN TENGGORAK PUTIH**  
**Sebuah Kelompok Gerilya**  
**di Kalimantan Selatan**  
**1949-1950**

**Wajidi**

Pustaka Book Publisher  
2010

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wajidi

Gerakan Tengkorak Putih, Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan  
1949-1950/Wajidi. --Cet. 1.--Yogyakarta: Pustaka Book Publisher 2010.

xii + 141 hlm, 14 cm x 21,5 cm.

ISBN .....

1. Kalimantan Selatan - Sejarah      III. Wajidi

I. Judul

959.844

GERAKAN TENGGORAK PUTIH

Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950

Copy rights© Wajidi

Hak cipta pada penulis dilindungi undang-undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan-  
penulisan artikel atau karangan ilmiah

Layouter: Ahmed

Pemeriksa Aksara: Ahmad Fauzan

Desain cover: Ahmed

Penyunting: Suriani

Proofreader: Umar Tjs

Cetakan I, Desember 2010

PUSTAKA BOOK PUBLISHER

Kelompok Penerbit Pinus (KPP)

Jl. Tegal Melati No. 118 C Jongkang

(Belakang Monjali) Sleman, Yogyakarta 55581

Telp. Redaksi (0274) 867646, Telp. Marketing (0274) 867151

Faks. (0274) 869506

E-mail: rumahpinus@yahoo.com

## Pengantar Penulis

Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya yang pernah eksis pada tahun terakhir perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (1949-1950). Keberadaannya di akhir masa revolusi fisik memberikan warna pada peran yang dimunculkannya, antara peran sebuah badan perjuangan di awal pembentukannya dengan stigma yang diberikan kepadanya sebagai gerombolan bersenjata pengacau keamanan di masa akhir keberadaannya di tahun 1950-an.

Situasi dan kondisi Kalimantan Selatan pada bulan-bulan pertama 1949 sebenarnya kurang memberikan iklim kondusif terhadap terbentuknya kelompok gerilya baru termasuk kelompok gerilya ini, mengingat adanya usaha-usaha konsolidasi perjuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan sebagai kelompok gerilya terbesar di Kalimantan Selatan untuk menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pusat komando perjuangan dalam melawan Belanda (NICA) yang pada waktu itu sudah semakin terdesak kedudukannya. Namun dengan adanya pejuang asal Kalimantan yang datang dari Jawa dan menolak menggabungkan diri ke dalam Tentara ALRI, justru telah mendorong terbentuknya kelompok gerilya ini melalui sebuah kompromi.

Kelompok gerilya ini yang mempunyai beberapa nama yang berbeda-beda serta formasi yang bersifat seadanya,

secara organisatoris berdiri sendiri. Sedangkan taktisnya, setelah Pertemuan di Munggu Raya (2 September 1949) dan pada perkembangan selanjutnya semakin banyak dipengaruhi oleh Komando Tentara ALRI yang telah memanfaatkannya sebagai “senjata” untuk menyerang KNIL, KL, dan Polisi NICA, serta kaki tangannya dari belakang selama berlangsungnya “cease fire”. Aksi-aksinya sendiri yang cenderung berbentuk intimidasi sebenarnya mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap kemajuan gerilya dan perkembangan politik pada waktu itu. Perkembangan politik berupa Pertemuan 16 -17 Oktober 1949 di Banjarmasin justru menimbulkan perpecahan di kalangan anggota kelompok gerilya ini menyusul ditetapkan dan dilaksanakannya *cease fire order* secara resmi dan ditariknnya serdadu Belanda dari daerah Hulu Sungai.

Setelah Pertemuan 16–17 Oktober 1949 kelompok gerilya ini yang mulai mengalami proses kemunduran dan aksi-aksinya pada saat-saat menjelang akhir keberadaannya di dalam formasi Batalyon 605 (Juli 1950) telah dipandang oleh sebagian besar masyarakat, Divisi Lambung Mangkurat, dan pihak Belanda sebagai aksi-aksi yang mengganggu ketenteraman umum dan menghambat pelaksanaan *cease fire order*. Aksi-aksi itu antara lain muncul sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat yang terjadi pada awal tahun 1950-an, yakni sesudah selesainya Perang Kemerdekaan Indonesia, mengeluarkan kebijakan mendemobilisasi mantan pejuang gerilya dan merasionalisasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menimbulkan berbagai benturan, persoalan, ketidakpuasan, gerakan politik dan bersenjata di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan kelompok gerilya ini berakhir dengan satu kesan yang cenderung kurang mengenakkan bagi sebagian pelakunya maupun orang yang terkait di dalamnya.

Buku ini berasal dari hasil penelitian sejarah (*historical research*) yang pernah saya selesaikan beberapa tahun silam. Tidak banyak perubahan yang dilakukan, kecuali berupa sedikit perubahan sistematika karena disesuaikan dengan format buku.

Sebagian besar sumber data berasal dari hasil wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah. Selain itu digunakan pula beberapa surat kabar, catatan-catatan pribadi (memoar), surat-surat resmi, dan foto-foto pada masa perjuangan kemerdekaan.

Berdasarkan masalah yang dikaji, maka tujuan utama buku ini adalah untuk menggambarkan sejarah Gerakan Tengkorak Putih, terutama yang berkenaan dengan awal, perkembangan, dan akhir kelompok gerilya ini.

Sejak tulisan ini diselesaikan hingga kemudian diterbitkan menjadi buku yang sampai ke tangan pembaca tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu, terutama sekali para informan yang selama pengumpulan data telah bersedia memberikan informasi dalam bentuk lisan, tertulis maupun tulisan berupa dokumen dan benda bersejarah lainnya.

Terima kasih pula disampaikan kepada jajaran Pustaka Book Publisher (Kelompok Penerbit Pinus) yang telah mempersiapkan penerbitan buku ini dan Ahmad Fauzan Jamal yang telah bersusah payah membantu saya menyelesaikan buku ini.

Selanjutnya rasa terima kasih yang teramat sangat saya haturkan kepada ayahanda H. Amberi dan ibunda Hj. Nuriah yang selalu mendoakan anak-cucunya di tengah sunyinya malam, kakak kandungku atas semua bimbingan dan nasihatnya, dan kedua mertuaku atas segala kebaikannya, isteriku atas semua pengertiannya, dan kepa-

da putera-puteriku Luthfi Pasha Ardani dan Salma Aulia Azizah dengan iringan doa semoga menjadi anak yang saleh dan salehah, serta tekun belajar untuk meraih masa depan.

Akhirnya, kepada Allah Swt semuanya dikembalikan, dan seraya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat-Nya yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, dan nikmat kesehatan sehingga buku ini dapat diselesaikan, maka saya persembahkan buku ini kepada para pembaca. Semoga bermanfaat.

Banjarmasin, Mei 2010

Wajidi

## Daftar Isi

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Pengantar Penulis .....                         | v   |
| Daftar Isi .....                                | ix  |
| Daftar Peta dan Ilustrasi .....                 | x   |
| Daftar Singkatan .....                          | xi  |
| Prolog.....                                     | 13  |
| I    Awal Gerakan Tengkorak Putih .....         | 17  |
| A. Situasi di Bulan-bulan Pertama 1949.....     | 17  |
| B. Cikal Bakal .....                            | 21  |
| C. Pembentukan Pasukan .....                    | 30  |
| D. Seputar Nama Gerakan Tengkorak Putih.....    | 39  |
| E. Formasi .....                                | 43  |
| II   Perkembangan Gerakan Tengkorak Putih.....  | 49  |
| A. Menyikapi Hasil Pertemuan di Munggu Raya.... | 57  |
| B. Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih.....       | 57  |
| C. Pengaruh Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih.. | 68  |
| D. Situasi Sesudah “Cease Fire Order”.....      | 72  |
| III  Akhir Gerakan Tengkorak Putih .....        | 81  |
| A. Hulu Sungai: Meneruskan Perjuangan .....     | 81  |
| B. Banjarmasin: Peleburan dan Perbenturan ..... | 87  |
| C. Masuk Formasi Batalyon 605.....              | 115 |
| Epilog.....                                     | 119 |
| Daftar Sumber.....                              | 124 |
| Indeks.....                                     | 132 |
| Biodata Penulis.....                            | 138 |

## Daftar Peta dan Ilustrasi

### **Peta**

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Peta sketsa route ekspedisi penyeberangan Mobiele Troops 138 Wherkreise Kalimantan..... | 23 |
| Peta sketsa daerah operasi Pasukan Tengkorak Putih.....                                 | 46 |

### **Ilustrasi**

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bendera Batalyon Bantuan Tempur 138 Tengkorak 40.000 ALRI.....                  | 29  |
| Pasukan Tengkorak Putih di sekitar markas Sungai Kudung.....                    | 37  |
| Pasukan Tengkorak Putih.....                                                    | 63  |
| Bendera Merah Putih yang pernah dipergunakan peleton Kompi Tengkorak Putih..... | 43  |
| Sisa markas Pasukan Tengkorak Putih di Sungai Kudung.....                       | 44  |
| Lokasi markas Pasukan Tengkorak Putih di Gambah Dalam, Kandangan.....           | 112 |
| Anggota Kompi Tengkorak Putih.....                                              | 117 |

## Daftar Singkatan

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| ALRI      | : Angkatan Laut Republik Indonesia                  |
| APRI      | : Angkatan Perang Republik Indonesia                |
| APRIS     | : Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat        |
| BFO       | : Bijeenkomst voor Federaal Overleg                 |
| BPRI      | : Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia              |
| BPPKI     | : Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia  |
| BRN       | : Biro Rekonstruksi Nasional                        |
| CTN       | : Corps Tjadangan Nasional                          |
| GERAK     | : Gerakan Rahasia Kalimantan                        |
| GERMERI   | : Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia  |
| GRRI      | : Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia                 |
| KL        | : Koninklijke Leger                                 |
| KNI       | : Komite Nasional Indonesia                         |
| KNIL      | : Koninklijke Nederlands Indische Leger             |
| KPBBI     | : Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia |
| KTN       | : Komisi Tiga Negara                                |
| MPK       | : Markas Besar Pertahanan Kalimantan                |
| MTKI      | : Mandau Telabang Kalimantan Indonesia              |
| NICA      | : Netherlands Indies Civil Administration           |
| NKRI      | : Negara Kesatuan Republik Indonesia                |
| NMM       | : Nederlands Militaire Missie                       |
| PAIM      | : Partai Anti Indonesia Merdeka                     |
| PERESTEIN | : Perekonomian Sumber Tenaga Indonesia              |
| PPTNI     | : Panitia Pembantu Tentara Nasional Indonesia       |
| PPTK      | : Panitia Pemulangan Tentara Kemasyarakatan         |
| RIS       | : Republik Indonesia Serikat                        |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| SKI  | : Serikat Kerakyatan Indonesia            |
| TNI  | : Tentara Nasional Indonesia              |
| TRI  | : Tentara Republik Indonesia              |
| UNCI | : United Nations Commission for Indonesia |

## Prolog

Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya<sup>1</sup> yang terdapat pada periode akhir Perang Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan<sup>2</sup> dan secara organisatoris berada di luar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Meskipun keberadaan Gerakan Tengkorak Putih relatif singkat yakni dari menjelang Pertemuan 2 September 1949 di Munggu Raya hingga tahun 1950, aksi-aksinya mempunyai dampak yang cukup berarti terhadap kemajuan gerilya dan perkembangan politik waktu itu.

Gerakan Tengkorak Putih yang dalam berbagai pustaka disebut juga sebagai Divisi Tengkorak Putih atau Lasy-

---

<sup>1</sup> Menurut W.J.S, Poerwadarminta (1984: 319) kata-kata gerilya terkait kepada dua arti, yakni perang tidak berhadap-hadapan melainkan dengan sembunyi-sembunyi, dan pasukan yang menjalankan siasat perang tersebut. Menurut Ensiklopedi Indonesia (1980:1120) perang gerilya biasanya ditujukan terhadap pendudukan pemerintah asing atau pemerintah sendiri. Menurut penulis, di Kalimantan Selatan, istilah kelompok gerilya dapat dikenakan kepada pasukan dari sebuah organisasi ketentaraan maupun kelaskaran yang pro Republik seperti Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, Mandau Telabang Kalimantan Indonesia (MTKI), dan Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia (GRRRI), maupun yang pro NICA seperti Tentara Kucing Hitam dan Tentara Lawung – terutama sejak 1949.

<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan Kalimantan Selatan di sini adalah Keresidenan Borneo Selatan (Zuider Afdeling van Borneo) dengan ibukotanya Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Staatstblaad 1945 nomor 64. Wilayahnya dahulu meliputi dua provinsi sekarang yakni Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

kar Rakyat Murba, hanyalah salah satu dari kelompok gerilya yang ada di Kalimantan Selatan dan berjuang bahu membahu dengan tentara ALRI Divisi IV.<sup>3</sup> Dalam beberapa pustaka, kelompok gerilya ini hanya ditulis selintas dengan sebutan nama yang berbeda-beda sehingga terkesan kontradiktif antara tulisan yang satu dengan tulisan lainnya, disamping adanya kecenderungan mengaitkan perjuangannya dengan aksi-aksi teror; pengacauan, penculikan, dan sejenisnya, selain kata-kata pergerakan dan perjuangan.

Arti penting dari munculnya aksi-aksi Gerakan Tengkorak Putih tidaklah semata-mata akibat kurangpercayaannya terhadap kesepakatan yang dihasilkan dari Pertemuan di Munggu Raya antara pihak Belanda dan ALRI Divisi IV yang difasilitasi oleh pihak Tentara Republik atau kejengkelannya terhadap aksi-aksi KNIL, KL, dan Polisi NICA yang mengacaukan rencana pelaksanaan *cease fire*, melainkan juga terletak pada fakta bahwa pada periode akhir keberadaannya, aksi-aksinya itu merupakan manifestasi yang antara lain disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian anggota kelompok gerilya ini terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk menjadikan mantan anggota KNIL sebagai bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Hal ini ditambah lagi dengan adanya aspek ketersingkirkan akibat adanya kebijaksanaan untuk mendemobilisasikan sebagian anggotanya ke masyarakat maupun rasionalisasi anggota Divisi Lambung Mangkurat, termasuk di dalamnya mantan anggota Pasukan Tengkorak Putih di awal tahun lima puluhan.

---

<sup>3</sup> Oleh karena itu harus dibedakan dengan kelompok gerilya dengan nama yang sama yakni "Tengkorak Putih" yang berpusat di Singkawang Kalimantan Barat dengan cabang-cabangnya di Sambas, Pemangkat, Pontianak dan Bengkayang (Kementerian Penerangan RI, 1953:143).

Paparan di atas hanyalah gambaran sekilas tentang Gerakan Tengkorak Putih. Oleh karena itu, pada bab-bab selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut dan mendalam tentang awal, perkembangan, dan akhir Gerakan Tengkorak Putih sebagai sebuah kelompok gerilya di Kalimantan Selatan pada kurun waktu 1949-1950.



## Bab I

# Awal Gerakan Tengkorak Putih

### A. Situasi di Bulan-bulan Pertama 1949

Kalimantan Selatan pada bulan-bulan pertama 1949 mencerminkan situasi dan kondisi para gerilyawan yang memperoleh kemajuan besar dalam menyerang dan mende-sak kedudukan Belanda (NICA), sehingga secara *de facto* mempunyai kekuasaan teritorial yang besar dan semakin cepat meluas. Kemajuan tersebut tidaklah lahir dengan tiba-tiba, tetapi dicapai setelah melalui proses yang panjang dan penuh liku-liku.

Ada beberapa patokan yang bisa diangkat ke permukaan, yang mencerminkan situasi dan kondisi perjuangan di Kalimantan Selatan pada bulan-bulan pertama 1949. Patokan pertama, adalah keberhasilan ALRI Divisi IV dalam mengkonsolidasikan para gerilyawan. Memang, sejak bulan-bulan pertama setelah Agustus 1945, para gerilyawan telah membentuk organisasi kelaskaran yang terpisah-pisah dan illegal, namun usaha tersebut tidak dapat berbuat banyak dalam membendung dan mengusir Belanda yang kembali ke Kalimantan Selatan, sebabnya antara lain lantaran kurangnya koordinasi antara organisasi kelaskaran itu sendiri. Bertitik tolak dari pengalaman itulah, maka bagi ALRI Divisi IV, dipandang perlu untuk menyatukan semua gerak langkah perjuangan guna menghadapi Belanda dan kolaboratnya secara lebih efektif. Cara yang dilakukannya adalah dengan mengkonsoli-

dasikan semangat rakyat, organisasi perjuangan terutama kelaskaran dan memperbaharui susunan formasi yang ada. Dengan demikian, ALRI Divisi IV tidak dapat membenarkan lahirnya organisasi perjuangan di luar ALRI (Depdikbud, 1991:122).

Untuk kepentingan tersebut, maka sampai akhir 1949 ALRI dengan jalan musyawarah telah berhasil merangkul sebagian besar anggota organisasi kelaskaran untuk bersama-sama melawan Belanda. Jalan kekerasan dengan ditunjang oleh operasi teritorial juga dilaksanakan terutama terhadap organisasi kelaskaran yang merupakan kontra republik antara lain terhadap Partai Anti Indonesia Merdeka (PAIM) dengan laskarnya yang bernama Barisan Parang Bungkul.

Usaha konsolidasi semakin terasa mendesak ketika sejak 17 Mei 1949 dibentuk Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Letnan Kolonel Hassan Basry dalam kedudukannya sebagai gubernur tentara maupun pimpinan komando divisi telah mengirim utusan-utusannya untuk menindak dan membicarakan masalah penggabungan organisasi kelaskaran ke dalam tubuh ALRI, sehingga sampai Agustus 1949, beberapa organisasi kelaskaran seperti Tentara Kucing Hitam, Tentara Lawung, dan Mandau Telabang Kalimantan Indonesia (MTKI) Hulu Sungai, serta Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia (GRRI) telah menyerah atau mau menggabungkan diri ke dalam tubuh ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan (Van Dijk, 1983:212; Basri, tt.: th.; Depdikbud, 1991:123).

Patokan kedua, yaitu keberhasilan para gerilyawan dalam menyerang kedudukan Belanda, sehingga memiliki kekuasaan teritorial yang luas. Keberhasilan tersebut, seiring dengan keberhasilan usaha konsolidasi yang dilakukan oleh ALRI, sehingga dengan terpusatnya semua keku-

atan di tubuh ALRI menyebabkan daya serangnya semakin menghebat dan menjadikan pihak gerilyawan memperoleh banyak kemenangan di berbagai pertempuran.

Akibat adanya tekanan dari pihak gerilyawan maka Belanda mulai menarik pos-pos militernya yang terpencil dan memusatkan kekuatannya di kota-kota dengan tujuan mempermudah komunikasi dan memperpendek jarak pengangkutan kebutuhan dan peralatan.

Bagi gerilyawan, tindakan Belanda tersebut justru menguntungkan perjuangan bersenjata, sebab selain memperoleh kekuasaan teritorial juga optimisme dan kebanggaan para gerilyawan semakin meningkat. Sejak itu secara *de facto* gerilyawan telah menguasai seluruh daerah Kalimantan Selatan minus kota-kota yang diduduki oleh Belanda.

Adanya keberhasilan para gerilyawan dalam menekan Belanda, telah mendorong dibentuknya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI pada 17 Mei 1949. Pembentukan itu sendiri, juga disebabkan oleh adanya implikasi Persetujuan Linggajati serta adanya kenyataan vakumnya pemerintahan sipil di daerah-daerah yang ditinggalkan Belanda, dan yang lebih penting lagi adalah agar setidaknya keberadaan, kekuatan, dan kemampuan ALRI Divisi IV diakui serta Kalimantan Selatan tetap menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dengan demikian, sejak 17 Mei 1949 telah terjadi dualisme pemerintahan dan kekuasaan teritorial, yang mana pihak pemerintah gubernur tentara lebih berkuasa dibandingkan dengan pihak Belanda. Kepopulerannya,

---

<sup>1</sup> Sebetulnya sesudah Agustus 1945, oleh penduduk Banjarmasin, pernah diperjuangkan secara parlementer, yakni dengan membentuk KNI dan oleh KNI diangkat seorang Residen Republik Indonesia. Tapi kemudian dibubarkan oleh Pasukan Sekutu dan digantikan oleh NICA (Yaman, 1979:87).

menyebabkan segala perintah dilaksanakan oleh rakyat. Hal ini antara lain terjadi ketika adanya larangan pergi haji, perintah mengadakan pemogokan umum, bahkan di kota Kandangan rakyat dengan sukarela meninggalkan rumah, harta dan pekerjaannya untuk hijrah ke daerah yang dikuasai gerilyawan yang batasnya hanya dua kilometer dari kota tersebut.

Patokan ketiga, adalah sikap defensif Belanda terhadap tekanan-tekanan para gerilyawan. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, Belanda telah menarik pos-pos militernya di tempat-tempat terpencil dan memusatkan kekuatannya di kota-kota. Hal ini berarti, Belanda sebagian besar telah kehilangan inisiatif untuk menyerang posisi-posisi gerilyawan. Serdadu KNIL, KL maupun Polisi NICA hanya mungkin melakukan perjalanan di pedalaman dalam konvoi dan dalam pengawalan yang ekstra ketat. Bahkan di Banjarmasin sendiri mereka harus waspada terhadap serangan-serangan gerilyawan. C. van Dijk (1983:213) menyatakan bahwa sesungguhnya dalam paroh kedua tahun 1949 ALRI Divisi IV yang telah bersimharajalela di Kalimantan Selatan.

Memang pihak Belanda selalu berusaha menutup-nutupi pemberitaan tentang kegiatan gerilya tersebut, agar terdapat kesan bahwa memang secara *de facto* Kalimantan Selatan benar-benar di bawah kekuasaan Belanda. Namun hal tersebut tidak dapat mengatasi keadaan. Adanya serangan gencar para gerilyawan yang diekspos oleh Kalimantan Berjuang, menyebabkan Belanda tidak bisa menjalankan pemerintahannya dan terpaksa “meminta” *cease fire* di Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Padahal secara sadar dan resmi Pemerintah Republik melalui Persetujuan Linggajati telah meninggalkan dan melupakan Kalimantan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebelum dilaksanakannya *cease fire*, bu-

lan Agustus 1949 adalah puncak dari kekalahan Belanda, dan sebaliknya puncak dari kemenangan gerilya di Kalimantan Selatan.

## **B. Cikal Bakal**

Terbentuknya Gerakan Tengkorak Putih tidak bisa lepas dari peranan ekspedisi-ekspedisi lintas laut yang datang dari Jawa. Sebagai cikal bakal kelompok gerilya ini adalah para pejuang asal Kalimantan yang kembali ke daerah asalnya melalui ekspedisi lintas laut tersebut. Di antara pejuang itulah nantinya yang membentuk Gerakan Tengkorak Putih di Kalimantan Selatan.

Kurangnya keseimbangan kekuatan dengan pihak Belanda dan terutama kurangnya kesatuan komando di kalangan pejuang di Kalimantan Selatan, telah mendorong para pejuang asal Kalimantan di Jawa untuk melakukan ekspedisi lintas laut menembus blokade Belanda dan membentuk serta membantu perjuangan gerilya di daerah ini.

Ekspedisi tersebut, dari kelompok maupun perorangan dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan dan Markas Besar ALRI Divisi IV yang kemudian menjadi Mobiele Brigade ALRI.

Ekspedisi yang tiba di Kalimantan dan berperan penting terhadap keberadaan Gerakan Tengkorak Putih adalah ekspedisi-ekspedisi Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) dari Surabaya yang dipromotori oleh Bung Tomo, serta ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Danusaputera yang nama batalyon ia sebut sebagai Batalyon Bantuan Tempur 138 ALRI (atau dalam dokumen resmi *Mobiele Troops 138 Wherkreise Kalimantan*). Batalyon ini mempunyai ciri khas yakni memiliki bendera merah putih bergambar tengkorak yang dibawa saat ekspedisi lintas laut untuk mengingatkan pembantaian 40.000 jiwa yang

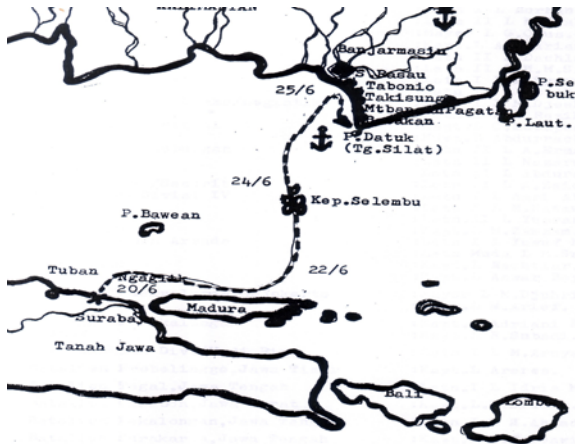
dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling di Sulawesi Selatan, yang kebetulan pada saat itu atasan Westerling yakni Letnan Kolonel H.J. Veenendal berada di Kalimantan Selatan sebagai *Territorial Commandant Voor Zuider en Ooster Afdeling van Borneo* di Banjarmasin. Dengan demikian, nama lengkap dari batalyon ini adalah Batalyon Bantuan Tempur 138 Tengkorak 40.000 ALRI.

Mengapa kedua ekspedisi tersebut berperan penting terhadap keberadaan Gerakan Tengkorak Putih? Sebab nantinya sebagian anggota dan komandan Pasukan Tengkorak Putih pada Kelompok Komando Sub Sektor Selatan adalah mantan anggota BPRI. Sedangkan Kapten Danusaputera selain sebagai salah seorang pembentuk juga sebagai “pimpinan” dari kelompok gerilya ini, yang mana sebagian anak buahnya yang ia bawa dari Jawa diperbantukan dalam pelatihan anggota Pasukan Tengkorak Putih, terutama pada Kelompok Komando sektor Utara yang bermarkas di Sungai Kudung.

Jauh sebelum ekspedisi Batalyon Bantuan Tempur 138, Pasukan BPRI telah mengadakan ekspedisi ke Kalimantan. Ekspedisi yang merupakan gelombang pertama yang dipelopori oleh BPRI pimpinan Bung Tomo adalah ekspedisi sembilan orang yang dikenal sebagai Ekspedisi IX Pelopor dipimpin oleh H. Ahmad Hasan dan Jaderi. Dari Surabaya mereka berangkat melalui Panarukan pada 7 November 1945 dan tiba di Samuda di Sampit dan selanjutnya sampai di Marabahan. Dalam perjalanan setiap ada kesempatan dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lebih jauh tentang BPRI, lihat Pemda (1990:149) dan Depdikbud (1991: 84, 90-92).



Peta sketsa route ekspedisi penyeberangan Mobiele  
Troops 138 Wherkreise Kalimantan

Sementara itu, dalam sebuah perundingan yang diadakan antara pimpinan Markas Besar ALRI di Yogyakarta dengan tokoh-tokoh pejuang Kalimantan diperoleh suatu kesepakatan untuk membentuk sebuah “Divisi” dalam ALRI yakni Divisi ALRI untuk daerah Kalimantan.

Sebagai realisasi atas kesepakatan itu, maka pada tanggal 4 April 1946 dibentuklah ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan panglimanya Letnan Kolonel Zakaria Madun dan Kepala Staf Mayor Firmansyah berkedudukan di Mojokerto.<sup>3</sup> ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Pertama, mempersatukan berbagai badan perjuangan yang sudah ada di Kalimantan ke bawah satu komando. Kedua, mempertahankan Republik Indonesia secara *de facto* dan *de jure* di Kalimantan. Ketiga, menghubungkan Pemerintah Republik di Kalimantan dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta.

<sup>3</sup> Ramli Nawawi dkk. (1991: 95); van Dijk (1983: 208); Pemda (1990: 136). M.S. Abdis (1984: 20) menyebutkan bahwa peresmian kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan terjadi pada tanggal 23 Mei 1946 bertempat di Hotel Republik Indonesia/Pelangi d/h Palace Hotel Malang oleh Laksamana M. Nazir.

Guna mewujudkan tugas pokok tersebut dipersiapkan operasi infiltrasi rahasia lewat laut antara pulau Jawa dan Kalimantan yang dilaksanakan oleh Pasukan ALRI Divisi IV dengan nama sandi “R”. Perlunya operasi infiltrasi lewat laut itulah yang menjadi pertimbangan utama mengapa komando untuk perjuangan bersenjata di Kalimantan berada di bawah kendali angkatan laut.

Enam bulan setelah berdirinya ALRI Divisi IV, maka pada tanggal 10 Oktober 1946 dikirimlah ekspedisi penghubung yang dipimpin oleh Letnan Dua Asli Zuhri dan wakilnya Letnan Muda Mursyid Seman ke Kalimantan dengan tugas pokok membentuk organisasi ALRI Divisi IV setingkat batalyon di Kalimantan Selatan dan menyatukan organisasi-organisasi perjuangan yang ada ke dalam ALRI Divisi IV. Untuk melakukan tugasnya mereka berusaha menemui Hassan Basry di pedalaman Kalimantan Selatan.

Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembicaraan dengan Hassan Basry, maka pada tanggal 18 November 1946 di desa Tabat Haruyan didirikanlah satu batalyon dengan nama Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan, dan Hassan Basry diangkat sebagai komandannya dengan kesediaannya menyatukan laskar-laskar perjuangan di Kalimantan Selatan (Basry, 1961:114; Danussaputera, 1985: 33-35).

Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan merupakan salah satu batalyon yang dibentuk di luar Jawa. Batalyon lainnya adalah Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “B” di Kalimantan Barat, Batalyon Rahasia Divisi IV “C” di Kalimantan Timur dan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “D” di Riau.

Sebelum Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” dibentuk di Kalimantan Selatan, di daerah ini telah berdiri beberapa organisasi kelaskaran, seperti BPRIK di Banjarmasin pada

tanggal 16 Oktober 1945, GERAK (Gerakan Rahasia Kalimantan), GERMERI (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia), BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia) di Kandangan, GERPINDOM (Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka) di Birayang pada bulan Oktober 1945 dan GERPINDOM (Gerakan Rakyat Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka) di Amuntai pada tanggal 20 November 1945 (Basry, 1961: 28-35).

Selaras dengan perkembangan politik dan kemajuan gerilya, di kemudian hari Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Pertahanan Kalimantan mengalami proses metamorfosis atau berganti nama menjadi Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, dan terakhir menjadi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Perubahan nama itu terkait dengan akibat politis dan yuridis yang ditimbulkan oleh Persetujuan Linggajati yang ditandatangani pihak pemerintah Republik Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Persetujuan yang berisi pengakuan Pemerintah Belanda atas kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera, telah menjadikan Kalimantan berada di bawah kekuasaan Belanda. Akibat persetujuan itu maka kedudukan Gubernur Kalimantan tidak ada lagi, karena dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947. Konsekuensinya terhadap militer adalah semua satuan tentara Republik yang ada di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan.

Selaras dengan Persetujuan Linggajati, Ir. Pangeran Mohammad Noor berhenti menjadi Gubernur Kalimantan, sedangkan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban dilikuidasi dan diubah statusnya menjadi menjadi Mobiele Brigade ALRI bermarkas di Madiun.

Sebagai akibat adanya reorganisasi dan reformasi itu, maka Mobiele Brigade ALRI diubah statusnya menjadi

kesatuan tempur dengan nama Batalyon X C4/Komando Grup Kalimantan dan sebagai unit Brigade XVI Komando Seberang dengan pimpinan Mayor Firmansyah. Sejak itu putuslah hubungan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” di Kalimantan Selatan dengan induk pasukannya di Jawa sampai dengan datangnya Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo tanggal 2 September 1949 dalam pertemuan di Munggu Raya, Kandangan.

Keputusan MBT untuk melikuidasi Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan diketahui juga oleh Hassan Basry. Akan tetapi, Hassan Basry dan para pejuang Kalimantan tidak menggubrisnya dan malahan mereka menyatakan bahwa ALRI Divisi IV “A” berdiri sendiri dan tidak terikat lagi dengan ALRI Divisi IV yang telah dilikuidasi. Hassan Basry kemudian merubah nama Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” menjadi Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, seolah mengambil alih kedudukan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang telah dilikuidasi di Jawa (Wajidi, 2007:61-64).

Adanya semangat juang untuk mempertahankan keberadaan kesatuannya itulah yang menyebabkan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” tetap bertahan hidup, sedangkan Batalyon Rahasia ALRI lainnya di Kalimantan Timur (Batalyon C) dan Barat (Batalyon B) serta Riau (Batalyon D) turut mati menyusul dibubarkannya Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban (Pemda Tk. I Kalsel, 1990: 188 – 189; Nawawi dkk. 1991: 110-111).

Berbagai problem yang dihadapi akibat likuidasi itu menimbulkan pendapat dan buah pikiran untuk memin-dahkan MPK ALRI Divisi IV ke Kalimantan.<sup>4</sup> Apalagi dengan mengingat kondisi Batalyon ALRI Divisi IV “B”, “C” dan “D” yang juga telah bubar, maka Hassan Basry me-

---

<sup>4</sup>Hassan Basry, 2003., Jilid II, hlm. 48.

mutuskan bahwa ALRI Divisi IV “A” sudah tidak ada lagi dan SOPIK ALRI Divisi IV ditingkatkan statusnya menjadi sebuah divisi dengan nama MPK ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan “Pimpinan Umum” Hassan Basry.<sup>5</sup>

Kembali kepada ekspedisi lintas laut, ternyata setelah keluarnya Persetujuan Linggajati, ekspedisi-ekspedisi lintas laut ke Kalimantan terus terjadi baik secara sporadis, berkelompok maupun perorangan untuk turut membantu perjuangan di daerah ini. Di antara mereka ada yang menggabungkan diri ke dalam ALRI, menolak bergabung, dan akhirnya ada pula di antara mereka yang ikut membentuk organisasi Gerakan Tengkorak Putih.

Ekspedisi pimpinan Kapten Danussaputera adalah ekspedisi terakhir yang dikoordinasikan oleh ALRI Divisi IV dan dari seluruh ekspedisi yang pernah dikirim ke Kalimantan (Yaman, 1979:89; Pemda, 1990:153). Ekspedisi itu berkekuatan 87 orang pasukan. Pada mulanya, batalyon ini adalah BKR Laut yang kemudian menjadi TKR Laut. Keberhasilannya dalam berbagai pertempuran di pulau Jawa, telah mendorong Gubernur Kalimantan, Ir. Pangeran Mohammad Noor, untuk memintanya bergabung

<sup>5</sup> Hassan Basry, *loc.cit.* Pada beberapa stempel nama kelompok gerilya ini ditulis “GUBERNUR TENTERA” (lingkaran bagian atas) “DIV. ALRI” (di tengah) “KALIMANTAN SELATAN” (lingkaran bagian bawah). Sesudah diakui resmi sebagai TNI oleh Jenderal Mayor Suharjo, pada stempelnya tertulis “ANGKATAN PERANG” (lingkaran bagian atas) “ALRI Divisi IV” (di tengah) “REP-INDONESIA” (lingkaran bagian bawah). Umumnya surat kabar *Kalimantan Berdjung* dan *Soeara Kalimantan* terbitan akhir 1948 dan tahun 1949, menyebut/menulis kelompok gerilya ini dengan nama “ALRI Divisi IV” atau “ALRI D.IV” atau “ALRI D. IV Kalimantan Selatan” tanpa ada kode “A”, akan tetapi bukan tidak ada atau jarang sekali menyebut “ALRI Divisi IV “A”, lihat misalnya *Kalimantan Berdjung*, 8, 9, dan 22 Agustus 1949. Penyebutan nama “ALRI Divisi IV” tanpa kode “A” itu, selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Hassan Basry dalam bukunya “Kisah Gerilya Kalimantan Jilid II” tentang sudah tidak adanya Batalyon ALRI Divisi IV “A” itu, karena telah menjadi sebuah divisi dengan nama “ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan”.

ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Sejak itu, batalyon tersebut bernama Batalyon Bantuan Tempur 138. Namun sejak 1947 menjadi populer dengan sebutan Batalyon Bantuan Tempur 138 Tengkorak 40.000 ALRI.

Pilihan nama tambahan tersebut muncul setelah komandan batalyon Kapten Danussaputera bertemu dengan Kahar Muzakkar, seorang pejuang asal Sulawesi yang tergabung dalam kesatuannya yang bernama Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Biasanya disebut TRI Persiapan Sulawesi atau TRIP (E) S (Van Dijk, 1983:146). Ia ketika itu bermarkas di Delanggu, Klaten. Tentang pertemuan tersebut, Danussaputera<sup>6</sup> menceritakannya sebagai berikut:

*Dalam bulan November 1947 kami bertemu kembali di Jokya, di rumah makan Climen di komplek Bringinharjo. Kepada saya diminta untuk ikut hadir pada Apel Besar di alun-alun Jokya dalam rangka memperingati peristiwa berdarah 11 Desember 1946 di Sulawesi, korban atas kebiadaban Westerling/Belanda sebanyak 40.000 jiwa. Pada Apel Besar itu hadir Presiden RI dan Wakil (Bung Karno dan Bung Hatta). Usai apel, kami singgah di rumah makan, dan di sinilah secara "naluriah" dengan spontan dan tulus, menyatakan niat hati serta meminta persetujuan Kahar Muzakkar, bahwa batalyon saya akan saya lengkapi namanya menjadi Batalyon Bantuan Tempur 138 Tengkorak 40.000 ALRI.*

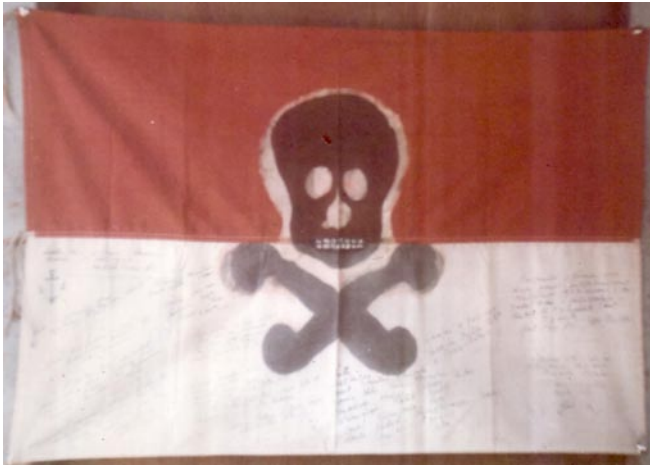
Dengan demikian, adanya nama tambahan maka sedikit banyak anggota batalyon tersebut telah memiliki ikatan batin dengan peristiwa korban 40.000 jiwa<sup>7</sup> di Sulawesi Selatan, walau secara fisik tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Dan hal ini secara psikologis akan me-

---

<sup>6</sup> Penjelasan tertulis dari Danussaputera, 10 Desember 1991.

<sup>7</sup> Sampai saat ini masih tetap diperdebatkan keabsahan angka 40.000

nambah semangat juang anggotanya dalam menghadapi Belanda.



Bendera Batalyon Bantuan Tempur 138  
Tengkorak 40.000 ALRI

Atas permintaan sendiri, maka Batalyon Bantuan Tempur 138 diperintahkan untuk melakukan ekspedisi lintas laut ke Kalimantan. Ekspedisi tersebut, antara lain didasarkan kepada Surat Perintah Jalan No. CHQ/CTK/1-6/0017/49 dari Panglima Komando Jawa, Instruksi Raha-sia No. CTg/16/0030/49, Instruksi Pasukan Gerilya Desa No. 13/MB KD/49 dari Panglima Komando Jawa, dan Pe-rintah Siasat No. KMD/CTK/16/0022/49.

Berdasarkan instruksi-instruksi tersebut, maka sifat misi batalyon ini tidaklah bertujuan untuk menggabung-kan diri, tetapi bersifat detasir dan diperbantukan kepada Markas Batalyon ALRI Divisi IV (A).

Meski sempat mendapat halangan dari ganasnya angin dan ombak laut Jawa, ekspedisi itu dapat berjalan

---

jiwa tersebut, lihat Barbara Sillars Harvey, catatan kaki (1984:41). Bahkan ada yang melihat hanya sebagai simbol dari besarnya perjuangan bukan besarnya jumlah (Surya, 10 Desember 1990).

dengan baik, sehingga sekitar awal Juli 1949, sebagian anggotanya telah berada di pedalaman Hulu Sungai, dan sebagian lagi di bawah pimpinan Letnan Dua Awang Yusuf berangkat menuju Kalimantan Timur.

### **C. Pembentukan Pasukan**

Sebagaimana telah diterangkan di atas, sejak bulan-bulan pertama 1949, pihak gerilyawan di Kalimantan Selatan telah memperoleh kemajuan besar dalam menyerang dan mendesak posisi-posisi KNIL, KL, dan Polisi NICA. Bahkan mereka telah berhasil membentuk Pemerintahan Gubernur Tentara, dan berusaha menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pusat komando perjuangan dengan jalan merangkul semua organisasi perjuangan terutama kelaskaran, untuk digabungkan ke dalam tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Namun usaha ALRI Divisi IV tidak selalu berjalan dengan mulus. Seringkali terhambat sebab ada beberapa kelompok gerilya yang tidak mau menggabungkan diri.

Di samping itu, secara sporadis pejuang-pejuang asal Kalimantan dari Jawa terus berdatangan ke Kalimantan Selatan. Sebagian dari mereka menggabungkan diri ke dalam ALRI Divisi IV atau ke dalam kelompok gerilya yang ada, dan sebagian lagi berdiri sendiri, atau berusaha membentuk kelompok gerilya baru.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan mereka tidak mau menggabungkan diri ke dalam tubuh ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Pertama, memang tidak ada instruksi dari atasan mereka untuk bergabung ke dalam organisasi perjuangan lain. Kedua, dalam Persetujuan Linggajati, Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengakui kekuasaan *de facto* Belanda terhadap Kalimantan. Dengan adanya persetujuan tersebut, hubungan organisatoris antara tentara ALRI dengan induknya

di pulau Jawa menjadi terputus. Oleh karena itu, maka adanya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI yang dibentuk tanggal 17 Mei 1949 beserta perangkatnya dipandang oleh sebagian pejuang sebagai hal yang tidak sah. Ketiga, sampai 2 September 1949, tentara ALRI Divisi IV belum pernah "diakui" sebagai bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), walau pernah diperjuangkan oleh Ir. Pangeran Muhammad Noor ke Kementerian Pertahanan untuk menjadikannya sebagai Pasukan Kantong TRI (Yaman, 1979:54). Dengan demikian, bagi pejuang dari Jawa yang merasa dirinya mempunyai status resmi, akan sulit bergabung ke dalam tubuh ALRI Divisi IV. Keempat, bagi sebuah kelompok gerilya, menggabungkan diri berarti harus menghilangkan atau paling tidak melonggarkan ikatan ideologis, kedaerahan, etnis, maupun ikatan primordial lainnya yang telah mereka miliki.

Ada beberapa orang pejuang yang tidak mau menggabungkan diri antara lain Abdul Muti dan Said Abdul Kadir<sup>8</sup>, yang tiba di Kalimantan Selatan guna turut serta ambil bagian dalam perjuangan melawan Belanda. Usaha yang mereka lakukan adalah berusaha merealisasi gagasan untuk membentuk sebuah kelompok gerilya baru. Hal tersebut disadari akan sulit terlaksana mengingat adanya usaha gencar yang dilakukan oleh Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dalam mengkonsolidasikan seluruh organisasi perjuangan, termasuk kelompok gerilya yang ada. Namun tantangan tersebut

---

<sup>8</sup> Tidak banyak diketahui tentang latar belakang kehidupan Said Abdul Kadir. Kata orang ia kelahiran Kandangan dan berdarah campuran antara Arab dan Banjar. Ia sering dipanggil dengan nama Aib Kadir. Sebelumnya, ia anggota TRI dari kesatuannya yang bernama Mandau Telabang Kalimantan (MTK) dengan pangkat Letnan Dua. Sedangkan Abdul Muti sebelumnya adalah Wakil Komandan Combat bagian Kalimantan Selatan pada Markas ALRI Divisi IV di Mojokerto 1946-1947 dengan Pangkat Letnan Muda .

tidak membuat mereka berkecil hati, bahkan memperkuat tekad untuk berupaya sedapat mungkin merealisasi gagasan tersebut.

Gagasan itu pertama kali berasal dari Abdul Muti. Pertemuannya dengan Said Abdul Kadir telah menghasilkan sebuah kompromi untuk bersama-sama merealisasikan. Agar kelompok gerilya baru nantinya tidak dipandang sebagai sebuah kelompok gerilya "liar", maka mereka harus memperoleh "pengakuan" keberadaan serta wilayah operasi dari Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Mereka kemudian menyampaikan gagasan pembentukan kelompok gerilya kepada Letnan Kolonel Hassan Basry selaku Gubernur Tentara dan Pimpinan Komando Divisi IV ALRI di sebuah tempat rahasia di Haruyan, dengan harapan gagasan itu dapat diterima. Namun ternyata gagasan mereka ditolak. Bagi Letnan Kolonel Hassan Basry, gagasan itu berlawanan dengan usaha-usaha penggabungan kelompok gerilya yang ada. Menurutnya, merestui pembentukan kelompok gerilya baru merupakan suatu tindakan yang tidak populer dan justru akan merusak komitmen yang sudah disepakati dan dilaksanakan yakni menjadikan ALRI Divisi IV sebagai satu-satunya pusat komando "gerak langkah" perjuangan dalam melawan Belanda.

Penolakan tersebut, tidaklah memperlemah semangat Abdul Muti dan Said Abdul Kadir. Mereka ingat kepada Kapten Danussaputera, komandan Batalyon Bantuan Tempur 138 yang baru tiba di Kalimantan Selatan dan ketika itu tengah berada di Haruyan.

Di tengah perkebunan karet, di antara desa Barikin dan Haruyan, gagasan yang sama disampaikan kepada komandan tersebut. Tentang peristiwanya, Danussaputera<sup>9</sup> menceritakannya sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Penjelasan tertulis Danussaputera, 10 Desember 1991. Sebelumnya, sekitar tanggal 11 Juli 1949 tiga orang Tentara Pelajar, yakni Gusti

*Tanggal 24 Juli 1949 telah pula datang dua orang, yang mana salah seorang daripadanya saya cukup kenal baik, yaitu Abdul Muti, anggota staf Divisi IV ALRI Mojokerto dengan pangkat Letnan Muda. Bersama-sama dengan Said Abdul Kadir menyampaikan gagasan akan membentuk atau mendirikan "pasukan" untuk ikut ambil bagian dalam menghadapi kekuasaan Belanda. Ini pun perlu pertimbangan dan pemikiran yang matang, dan akan saya bicarakan dengan pimpinan Komando Divisi terlebih dahulu. Saya jelaskan bukan kompeten dan wewenang saya, sebab saya dan pasukan adalah tamu dan mengemban tugas khusus. Mereka mau mengerti namun dengan catatan diharapkannya akan kebijaksanaan saya.*

Kapten Danussaputera menyadari dan pada prinsipnya mendukung maksud baik Abdul Muti dan Said Abdul Kadir, mengingat ia sendiri bersama pasukannya datang tidak untuk menggabungkan diri. Adapun alasan "mendukung" dan "menyetujui" gagasan tersebut, terutama didasarkan kepada pertimbangan bahwa membela atau mempertahankan bangsa dan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, tidak boleh melarang atau merintang. Justru niat suci tersebut harus disambut dengan tangan terbuka dan didukung dengan niat yang tulus.

Alasan mendukung tersebut, akhirnya disampaikan kepada Letnan Kolonel Hassan Basry sehingga kemudi-

---

Tarmizi, Gusti Mastur Ismail, dan Gumbran Saleh dengan membawa Surat Instruksi dari Tentara Pelajar Malang, telah menemuinya untuk meminta "pengakuan" keberadaan dan wilayah operasi.

an memunculkan perselisihan pendapat di antara keduanya. Namun keduanya akhirnya mencapai kata sepakat yakni merestui pembentukan "pasukan baru" tersebut, dan pembentukan serta keberadaannya dilimpahkan kepada kebijaksanaan dan tanggung jawab Kapten Danussaputera. Begitu pula secara organisatoris pasukan yang akan dibentuk harus berdiri sendiri dan tidak dibebankan kepada ALRI Divisi IV. Walau demikian, taktis harus berada di bawah strategi pimpinan tentara ALRI setempat. Hal itu dilakukan agar nantinya setiap aksi-aksinya tetap terkendali.

Setelah Letnan Kolonel Hassan Basry merestuinya maka beberapa hari kemudian Kapten Danussaputera memanggil Abdul Muti dan Said Abdul Kadir untuk menemuinya di Haruyan. Sekitar tanggal 29 Juli 1949, keduanya telah menghadap bersama calon pemuka lainnya. Mereka kemudian diberi wejangan tentang keberadaan pasukan yang akan dibentuk, tugas dan resiko yang akan mereka hadapi. Pasukan yang akan dibentuk itu sendiri belum ditentukan namanya.

Kemudian mereka diperintahkan pula untuk mengumpulkan calon anggota pasukan dengan terlebih dahulu diinventarisasi umur, pendidikan, dan pengalaman masing-masing. Kepada calon pemuka, diperingatkan untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai pertempuran terutama di kota Kandangan. Sekitar tanggal 7 Agustus 1949 para calon pemuka tersebut telah berhasil mengumpulkan sejumlah pemuda. Sebagian besar berasal dari rakyat biasa yang belum terbiasa memanggul senjata, dan sisanya berasal dari anggota ALRI Divisi IV terutama dari Batalyon I Cadangan pimpinan A. Kusasi.

Suhu politik terus memanas dan perjuangan gerilya semakin menghebat. Serdadu KNIL, KL dan Polisi NICA terus terdesak akibat gempuran para gerilyawan. Keadaan

tersebut memunculkan pemikiran bagi Belanda bahwa di Kalimantan Selatan diperlukan seorang pimpinan militer yang sanggup mengatasi keadaan tersebut. Oleh Belanda kemudian diangkatlah Letnan Kolonel H.J. Veenendal sebagai *Territorial Commandant Voor Zuider en Ooster Afdeling van Borneo* di Banjarmasin menggantikan Letnan Kolonel Kohl (Saleh, 1988:41). Sebelumnya Veenendal adalah mantan komandan militer Belanda di Sulawesi, berarti ia adalah komandannya Kapten Raymond Westerling yang mengepalai pembantaian "40.000 jiwa" di Sulawesi Selatan.

Keberadaan Letnan Kolonel H.J. Veenendal di Kalimantan Selatan telah memberikan inspirasi kepada para pemuka pasukan yang ketika itu tengah berkumpul di desa Padang Batung untuk memberi nama pasukan yang baru dibentuk dengan nama Pasukan Tengkorak Putih dengan singkatan Go Teng Po<sup>10</sup>. Pemberian nama tersebut sebenarnya tidaklah semata-mata karena adanya Veenendal. Keberadaan Batalyon Bantuan Tempur 138, yang memakai nama tambahan "Tengkorak 40.000 ALRI" juga memberikan andil dalam kemunculan nama kelompok gerilya ini.

Sebagaimana pembentukannya yang praktis dan sederhana, juga tidak ada peresmian dalam pemberian namanya. Setelah pemberian nama maka disepakati pula bahwa kelompok gerilya ini langsung dibina oleh Kapten Danussaputera, sedangkan komandan pasukannya adalah Abdul Muti dan Said Abdul Kadir. Setelah itu, beberapa utusan dikirim ke berbagai tempat di Kalimantan Selatan untuk membentuk pasukan yang sama. Di pesisir Kalimantan Selatan bagian selatan, pertemuan utusan dengan pejuang-pejuang dari BPRI telah menghasilkan kata sepakat, yakni membentuk Pasukan Tengkorak Putih

---

<sup>10</sup> Lebih jauh tentang Go Teng Po dan hal terkaitnya lihat sub bab "Seputar Nama Gerakan Tengkorak Putih".

dengan komandan pasukannya adalah Syukur Gani, Ali Akbar dan Suhaili.<sup>11</sup>

Dengan demikian, kelompok gerilya ini mempunyai dua kelompok komando, yakni: Kelompok Komando Sektor Utara, dan Kelompok Komando Sub Sektor Selatan. Kedua kelompok komando tersebut mempunyai daerah operasi sendiri-sendiri.<sup>12</sup>

Di daerah kelompok komando sektor utara, terutama di daerah Kandangan, terdapat satu kompi pasukan dipimpin oleh Lopido; nama samaran dari Matsih. Dari kompi tersebut, empat regu kemudian ditugaskan khusus berjaga-jaga di Markas Sungai Kudung.<sup>13</sup> Komandan regunya terdiri dari Abdussalam, Jemenen (Baseri D), A. Kusasi dan Mursyid.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Zainal, Banjarmasin, 1 Maret 1992; Asyikin, Parincahan, 27 Januari 1992; Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992. Menurut Danussaputera, ia adalah pimpinan Pasukan Tengkorak Putih yang terselubung. Bandingkan dengan G.M. Yaman (1979:96).

<sup>12</sup> Lihat Peta Sketsa daerah operasi Pasukan Tengkorak putih.

<sup>13</sup> Sungai Kudung sekarang terletak di dua kecamatan yakni Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Padang Batung. Di bagian Padang Batung itulah terdapat Markas Pasukan Tengkorak Putih.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Baseri D., Bamban, 19 Januari 1992; Amis A., Gambah Luar, 27 Januari 1992.



Pasukan Tengkorak Putih ketika berada di sekitar Markas Sungai Kudung, Kandangan. Berdiri di depan dari kiri ke kanan Ibud A, Said Abdul Kadir, Kapten Danussaputera (pakaian hitam), Abdul Muti.

Sebelumnya, setelah Pasukan Tengkorak Putih dibentuk, maka dibentuklah pula tenaga-tenaga pelatih yang direkrut dari Batalyon Bantuan Tempur 138. Mereka terdiri dari Letnan Dua Urai Nawawi, Sersan Mayor Noor Ali, Sersan Mayor Nitimiharjo, Sersan Tulus, dan Kopral Tusin.<sup>15</sup> Latihan terutama dilaksanakan di Padang Batung. Berisi tentang teori-teori perang gerilya dan latihan penggunaan senjata. Tugas pasukan nantinya adalah mengadakan aksi-aksi teror berupa penculikan, sabotase, dan intimidasi yang dilakukan di sembarang tempat terhadap Belanda dan antek-anteknya. Hasil latihan itulah yang merupakan angkatan pertama dikirim ke berbagai tempat untuk dijadikan pelatih pula. Yang menjadi pelatih di Sungai Kudung antara lain Baseri D, Syarlan, Andas, dan Arjan.

<sup>15</sup> Penjelasan tertulis Danussaputera, 10 Desember 1991; Wawancara Baseri D., Bamban, 19 Januari 1992; Rumli dan Mustafa, Gumbil, 24 Januari 1992.

Untuk kepentingan pelaksanaan taktik dan aksinya kelak, maka sejak Juli 1949 telah dipersiapkan pembuatan senjata, terutama senjata tajam berupa pisau, pedang atau parang yang di antaranya bercap bakar “tengkorak” di ulunya (gagang), dipesan dari Nagara; di daerah kampung Habirau dan Tumbukan Banyu.

Berkaitan dengan perlengkapan pasukan, senjata tajam lebih banyak dimiliki lantaran langkanya senjata api. Sebagaimana disyaratkan oleh Letnan Kolonel Hassan Basry, pembentukannya tidak boleh dibebankan kepada ALRI Divisi IV, maka tak mengherankan pula apabila pada awal pembentukannya kelompok gerilya ini kebanyakan memiliki senjata tajam dibandingkan dengan senjata api. Walau demikian, dengan semakin bertambahnya anggota pasukan dan sebagai akibat kemajuan gerilya dan perkembangan politik setelah 2 September 1949, maka semakin banyak senjata api yang dimiliki seiring dengan semakin banyaknya anggota ALRI yang menjadi anggota Pasukan Tengkorak Putih guna menghadapi KNIL, KL dan Polisi NICA yang kerap kali mengganggu rencana pelaksanaan *cease fire*.

Perlengkapan lainnya adalah bendera pasukan. Pada awal pembentukannya dan selama latihan, untuk sementara dipakai Bendera Batalyon Bantuan Tempur 138. Benderanya adalah bendera Merah Putih dengan lukisan tengkorak dan tulang bersilang di bawahnya di tengah-tengah bendera. Sedangkan bendera Pasukan Tengkorak Putih dibuat kemudian yakni berupa bendera Merah Putih, bertempel kain berbentuk tengkorak dengan tulisan angka empat puluh ribu di bawahnya.<sup>16</sup> Bendera tersebut mempunyai makna, yakni merah putih adalah lambang ben-

---

<sup>16</sup> Lihat gambar bendera tersebut. Menurut Danussaputera bendera Pasukan Tengkorak Putih dibuat di desa Murung (Barabai) oleh seseorang bernama Halidah sebanyak lima buah, Wawancara, Banjarbaru, 17 Desember 1991.

dera kebangsaan, sedangkan gambar tengkorak dengan angka 40.000 adalah lambang dari kesatuannya.

Pada awal pembentukannya Pasukan Tengkorak Putih tidak mempunyai seragam tetap karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, namun mereka mempunyai tanda pengenal khusus yaitu cap tengkorak di bagian dalam bawah kerah baju. Baru setelah 2 September 1949, sebagian kecil anggota pasukannya telah memiliki seragam khusus, yakni pakaian hitam-hitam dengan *badge* bercap tengkorak dengan tulang bersilang bertulisan 40.000 di bawahnya. Semuanya berwarna putih di atas dasar hitam. Pasukan yang berseragam hitam-hitam ini terutama yang bertugas mengawal Markas Sungai Kudung.<sup>17</sup>

Tidak ada tanda kepangkatan pada pakaian pasukan Tengkorak Putih karena memang kelompok gerilya tidak mengenal kepangkatan. Walaupun ada sebagian kecil anggotanya mempunyai pangkat di depan namanya, hal itu disebabkan ia sebelumnya adalah anggota ALRI Divisi IV maupun TRI yang telah mempunyai pangkat dan kemudian diperbantukan atau menjadi anggota Pasukan Tengkorak Putih.

#### **D. Seputar Nama Gerakan Tengkorak Putih**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, lahirnya nama "Tengkorak Putih" pada Pasukan Tengkorak Putih yang disingkat dengan Go Teng Po, tidak terlepas dari keberadaan Letnan Kolonel H.J. Veenendal di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, pemberian nama Pasukan Tengkorak Putih selain untuk mengingatkan Veenendal akan kesalahannya selama di Sulawesi juga bertujuan suci yakni menuntut

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Baseri D., Bamban, 19 Januari 1992; Asyikin, Parinchan, 26 Januari 1992; Danussaputera, Banjarbaru, 17 Desember 1991. Lihat pula Ahmad Gafuri (1966:151).

pembalasan 40.000 jiwa.<sup>18</sup> Sehingga pasukan ini terkadang juga disebut sebagai Pasukan Tengkorak Putih 40.000.

Mengenai istilah Go Teng Po atau Go Teng Poe (Go Teng Pu), G.M. Yaman dan Zainal mengartikannya sebagai singkatan dari Golongan Tengkorak Putih. Sedangkan Danussaputera mengartikannya sebagai singkatan dari Gerakan atau Gabungan Tengkorak Putih, sebab sebagai sebuah kelompok gerilya mereka tidak mempunyai susunan formasi sebagaimana halnya formasi militer. Keanggotaannya tidak mengikat bahkan cenderung sebagai sebuah gabungan yang anggotanya diambil secara tersendiri dari rakyat. Nama yang lazim dipakai untuk menyebutnya adalah Pasukan Tengkorak Putih dengan kesatuannya bernama Gerakan Tengkorak Putih.

Ada pula yang mengatakan bahwa Go Teng Po adalah nama samaran dari seorang komandannya. Menurutny hal itu terjadi lantaran adanya aksi-aksi Go Teng Po (Gerakan Tengkorak Putih) yang dipimpin oleh Said Abdul Kadir, sehingga orang mengira Go Teng Po sebagai nama seorang komandannya.<sup>19</sup>

Berbeda dengan pendapat tersebut, sebagian mantan anggota Pasukan Tengkorak Putih menyatakan bahwa istilah Go Teng Po adalah juga nama samaran dari Said Abdul Kadir. Jadi bukan hanya sebagai singkatan dari Gerakan, Gabungan atau Golongan Tengkorak Putih. Bahkan ada yang mengatakan hanya sebagai nama samaran Said Abdul Kadir. Boleh jadi kata mereka, akibat adanya aksi-aksi yang dipimpin oleh Go Teng Po (Said Abdul Kadir), maka orang menafsirkannya sebagai aksi-aksi yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ahmad Sani, Kasarangan, 31 Januari 1992; Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992; Danussaputera, Banjarbaru, 17 Desember 1991; H. Muslim, Banjarmasin, 5 Maret 1992.

<sup>19</sup> Wawancara G.M. Yaman, Banjarbaru, 17 Desember 1991; Zainal, Banjarmasin, 1 Maret 1992; Danussaputera, Banjarbaru, 17 Desember 1991.

atau dipimpin oleh Gerakan Tengkorak Putih. Pendapat itu selaras dengan isi surat kabar Kalimantan Berdjuang edisi 6 Oktober 1949 dalam C. van Dijk (1983:213) yang memberitakan bahwa yang menjadi pemimpin Lasykar Rakyat Murba ketika itu di Kandangan adalah Go Teng Po. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Go Teng Po selain sebagai nama samaran dari Said Abdul Kadir, juga sebagai singkatan dari nama kelompok gerilya ini.

Selain itu, anggota kelompok gerilya ini juga menyebut kesatuannya sebagai Divisi Tengkorak Putih (Ka-Be 26-9-1949, 6-10-1949, 9-9-1949, 17-9-1949, 29-1-1950, 1-1-1950, 27-1-1950 dalam C. van Dijk, 1983: 212 – 227; Gafuri, 1968:151). Pemakaian kata "Divisi" menurut G.M. Yaman dimulai ketika pasukan Tengkorak Putih ingin "naik ke permukaan" atau ingin "terlihat besar" dengan menyebut kesatuannya sebagai sebuah divisi dengan nama "Divisi Tengkorak Putih", yakni tidak lama setelah ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan "diresmikan" pada 2 September 1949. Padahal, jumlah anggota Pasukan Tengkorak Putih tidak mencapai satu Divisi.

Lasykar Rakyat Murba merupakan sebutan lain dari kelompok gerilya ini.<sup>20</sup> Kalimantan Berdjuang edisi 24 Oktober 1949 dalam C. van Dijk, catatan kaki (1983:213) memberitakan bahwa menurut pemimpin-pemimpin Lasykar Rakyat Murba, nama ini dipilih karena anggotanya tergolong proletariat. Tapi mereka menolak adanya suatu ikatan ideologis atau lainnya dengan Murba di Jawa.

Sebutan Lasykar Rakyat Murba cukup beralasan sebab sebelum tahun 1950 istilah rakyat murba searti dengan rakyat jelata atau proletar (proletar=buruh, jelata)

---

<sup>20</sup> Kalimantan Berdjuang 26-9-1949 (Van Dijk, 1983: 212 – 213); Wawancara Asyikin, Parincahan, 27 Januari 1992; Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992.

dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Murba di Jawa. Sebutan tersebut dapat dimengerti pula, karena pada awal pembentukannya sebagian besar anggotanya berasal dari rakyat jelata yang pada umumnya belum terbiasa memanggul senjata.

Adanya nama yang berbeda-beda tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab. Pertama, Pasukan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya yang lebih cenderung sebagai sebuah kelompok informal karena memiliki aturan-aturan dan struktur yang informal pula. Pasukan ini cenderung sebagai sebuah pasukan rakyat yang keanggotaannya bersifat longgar dalam formasi yang seadanya. Kondisi seperti itulah yang menjadikan kelompok gerilya ini tidak mempunyai nama resmi yang tetap sebagaimana halnya ALRI Divisi IV. Hal ini diperkuat pula oleh kenyataan tidak adanya surat atau dokumen resmi yang biasa dihasilkan oleh organisasi formal. Sedangkan nama yang diberitakan di dalam surat kabar Kalimantan Berdjung tidak dapat dijadikan patokan sebagai nama resmi dari kelompok gerilya ini.

Kedua, sebagai taktik *psywar* (perang psikologis). Adanya berbagai sebutan bagi kelompok gerilya ini sedikit banyak bertujuan untuk mengacaukan pikiran orang-orang Belanda, bahwa ada beberapa kelompok gerilya yang di antaranya mempunyai anggota pasukan yang sangat besar (seolah-olah satu divisi) yakni Divisi Tengkorak Putih, mempunyai kekuasaan dan wilayah operasi tersendiri, tidak terikat kepada perintah *cease fire*, dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang diberi tanggung jawab oleh Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo pada pertemuan di Munggu Raya 2 September 1949 untuk menyatukan semua kelaskaran yang ada seakan-akan tidak mampu menegakkan kekuasaannya terhadap "pasukan" tersebut.

Dari berbagai sebutan yang ada semuanya dapat di-

katakan sebagai nama kelompok gerilya ini. Namun sebutan Pasukan Tengkorak Putih dengan kesatuannya yakni Gerakan Tengkorak Putih (tanpa Go Teng Po) lebih merupakan "nama sebenarnya" dibandingkan dengan nama lainnya. Sebab selain sebagai salah satu kepanjangan dari Go Teng Po, nama tersebut yakni kata "Gerakan" lebih berorientasi kepada aksi-aksinya yang bersifat kerakyatan sebagaimana halnya sebagai sebuah pasukan rakyat.

## **E. Formasi**

Gerakan Tengkorak Putih baru memiliki semacam organisasi dan mulai berbenah diri untuk memiliki markas dan formasi tersendiri setelah pertemuan di Munggu Raya 2 September 1949, yakni setelah ALRI Divisi IV "diresmikan" menjadi bagian dari ALRI oleh Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo.

Perlunya markas komando dan formasi tersebut dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, agar kekuatan Pasukan Tengkorak Putih dapat lebih terkoordinasi dengan baik. Kedua, sebagai wadah agar Pasukan Tengkorak Putih tidak dipandang sebagai pasukan liar. Hal ini terkait dengan perintah Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo kepada Letnan Kolonel Hassan Basry agar menyatukan segenap organisasi kelaskaran yang ada.

Oleh sebab itu, sebelum memiliki formasi maka Pasukan Tengkorak Putih terlebih dahulu memiliki markas organisasi. Di Kandangan, mereka berhasil menempati sebuah rumah untuk dijadikan markas di Sungai Kudung. Markas tersebut awalnya adalah rumah pasangan suami isteri bernama Mardang dan Halimah dengan seorang anaknya yakni Abdul Hasan alias Tulamak. Sedangkan di Banjarmasin, Pasukan Tengkorak Putih juga menempati sebuah markas di Kuin Muara, yang dulunya merupakan rumah milik Abdul Rasyid.



Sisa markas Pasukan Tengkorak Putih di Sungai Kudung yang dibangun kembali menjadi rumah keluarga Abdul Hasan.

Markas di Sungai Kudung pada mulanya ditempati para anggota ALRI Divisi IV antara lain Samidrie Dumam, Sani, Sarfas, dan Ma'rufi Utir. Baru kemudian Said Abdul Kadir yang ditemani Abdul Manaf dan beberapa anak buahnya yang lain datang menginap. Sejak itulah rumah tersebut kemudian menjadi markas Pasukan Tengkorak Putih.<sup>21</sup>

Sejak bermarkas di Sungai Kudung, Pasukan Tengkorak Putih mulai menyusun formasinya. Formasi yang dibentuk cenderung bersifat *combat* dan seadanya yakni kelompok komando yang membawahi regu-regu. Formasinya terdiri dari dua kelompok komando,<sup>22</sup> yakni:

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Abdul Hasan, Sungai Kudung, 23 Februari 1992.

<sup>22</sup> Penjelasan tertulis Danussaputera, 10 Desember 1991. Alimin menyebutnya sebagai kelompok Staf Kwartir, wawancara, Banjarmasin, 2 Maret 1992; lihat pula Kodam X/Lam (1970:22); Pemda (1990:226).

I. KELOMPOK KOMANDO SEKTOR UTARA, BERMARKAS  
DI SUNGAI KUDUNG

Komandan Pasukan

1. Said Abdul Kadir

2. Abdul Muti

Staf Pembantu

Jumlah Regu

1. Sarkawi

2. Utuh Salman

3. Misrani Darham 20 regu

4. Tukacil Imur

5. Jarkasi Utir

II. KELOMPOK KOMANDO SUB SEKTOR SELATAN, BER-  
MARKAS DI KUIN MUARA

Komandan Pasukan

1. Syukur Gani

2. Ali Akbar

3. Suhaili

Staf Pembantu

Jumlah Regu

1. Muhammad

2. Abdul Rasyid

3. Amat Indar 9 Regu

4. Sugiman

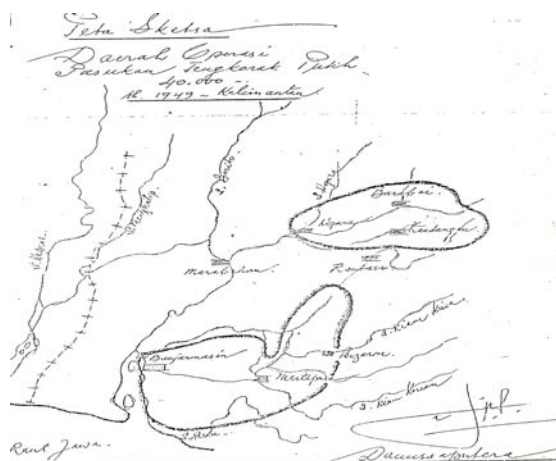
5. Selamat

6. Syahrums Ipul

Formasi tersebut adalah formasi awal Gerakan Tengkorak Putih dan tentunya mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kelompok gerilya itu sendiri. Sebagai sebuah formasi kelaskaran yang bersifat apa adanya bahkan seadanya, tentu bentuknya jauh berbeda dengan formasi ketentaraan yang bersifat formal.

Secara organisatoris --- walau tidak memiliki formasi sebagaimana mestinya --- kelompok gerilya ini berdiri

sendiri dan berada di luar ALRI Divisi IV,<sup>23</sup> bahkan kedua kelompok komando tersebut mempunyai kewenangan, pusat komando, dan wilayah operasi tersendiri. Walau demikian mengingat adanya tumpang tindih wilayah operasi dalam melawan Belanda, maka taktis perjuangannya seringkali tidak lepas dari komando tentara ALRI dimana mereka bertugas. Dalam menjalankan aksi-aksinya mereka sering bekerjasama atau mengikuti strategi komando ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.<sup>24</sup>



Peta sketsa daerah operasi Pasukan Tengkorak Putih

Musuh dan kepentingan yang sama menjadi pengikat utama dari keanggotaan kelompok gerilya ini. Tidak ada aturan-aturan yang bersifat formal, sehingga keanggotaannya bersifat longgar dan interaksi antar anggotanya

<sup>23</sup> Wawancara dengan Baseri D., Bamban, 20 Januari 1992; Danussaputra, Banjarbaru, 17 Desember 1991; Zainal, Banjarmasin, 1 Maret 1992.

<sup>24</sup> Contoh kerjasama yang baik antara kelompok gerilya ini dengan ALRI Divisi IV adalah pengiriman Pasukan Tengkorak Putih yang dipimpin oleh Mukeri Abadi, A. Suri, dan Sunandio ke Daerah Rehabilitasi Batalyon (B) Kalimantan Timur, lihat Hassan Basry (tt.th.); G.M. Yaman (1979:101); wawancara dengan Baseri D., Bamban, 19 Januari 1992; Rumli, Gumbil, 22 Januari 1992.

juga lebih didasarkan kepada hubungan atau aturan yang bersifat informal pula.

Sulit dipastikan berapa jumlah regu atau anggota yang sebenarnya dari kelompok gerilya ini, sebab anggotanya selalu bertambah dan berkembang di daerah-daerah lainnya. Tidak semua anggotanya bertugas sebagai pasukan tempur, sebagian ada yang bertugas sebagai polisi lasykar, hakim, juru masak, dan sebagainya. Jabatan-jabatan itu sendiri bersifat informal sehingga formasinya juga sering berubah, tidak mempunyai hierarki yang tegas, dan tidak mengenal pengangkatan dan kepangkatan dari suatu jabatan secara resmi. Seseorang dapat dipilih atau diganti jabatannya oleh anggota lainnya yang dianggap “cakap” atau yang memenuhi kriteria tertentu sebagai syarat yang penerapannya tidak terlalu ketat.

Dapat dikatakan bahwa gerak sosial yang bersifat vertikal maupun horizontal terjadi dalam kelompok gerilya ini, sebab selain mudahnya pergantian jabatan secara vertikal, anggota pasukannya juga mudah bergerak ke kesatuan lainnya yang sederajat. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, dengan semakin banyaknya anggota ALRI Divisi IV yang menjadi anggota Pasukan Tengkorak Putih, maka garis pemisah yang menentukan keanggotaan yang sebenarnya semakin kabur. Anggota ALRI dalam aksi-aksinya kadangkala mengaku dirinya sebagai anggota Pasukan Tengkorak Putih atau sebaliknya anggota Pasukan Tengkorak Putih mengaku sebagai anggota ALRI.



## Bab II

# Perkembangan Gerakan Tengkorak Putih

### A. Menyikapi Pertemuan di Munggu Raya<sup>1</sup>

Setelah Agresi Militer II di Jawa dan Sumatera maupun di daerah-daerah yang pro Republik, pihak Belanda telah mendapat tekanan-tekanan yang semakin menghebat dari para gerilyawan dan juga dari dunia internasional, yang mana akibat tekanan tersebut telah memaksa Belanda untuk berunding guna menaati dan melaksanakan resolusi-resolusi dari Dewan Keamanan PBB, agar Belanda segera menghentikan semua tindakan permusuhan.

Berbagai usaha dilakukan untuk melaksanakan resolusi tersebut. Sehingga pada 14 April 1949 dengan dipimpin oleh Merle Cochran dari UNCI telah dilaksanakan perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohamad Roem dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen, di Hotel Des Indes Jakarta (Poesponegoro et al, 1984:165). Walau-

---

<sup>1</sup> Peristiwa di Munggu Raya seringkali lebih difokuskan kepada *cease fire*, misalnya Depdikbud (1991:159) menulis "Cease Fire Munggu Raya". Peristiwa yang terjadi di Munggu Raya tidak hanya berkenaan dengan *cease fire* melainkan juga berisi pernyataan Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo nama Pemerintah dan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) mengakui dengan resmi ALRI Divisi IV sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), lihat Hassan Basry (tt.:th.); G.M. Yaman (1979, 93 – 96); C, van Dijk (1983:220); A.H. Nasution (1979: 379 – 385); dan Ahmad Gafuri, Lampiran (1968). Penulis menyebutnya sebagai "Pertemuan di Munggu Raya".

pun berjalan dengan alot, perundingan tersebut akhirnya berhasil mengeluarkan sebuah persetujuan yakni Persetujuan Roem-Royen yang pada intinya berisi tentang persetujuan *cease fire* antara Republik Indonesia dengan Belanda.

Persetujuan itu sendiri maupun gencatan senjata yang akan dilaksanakan, pada hakikatnya adalah persetujuan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi Jawa dan Sumatera, dengan pihak Belanda. Sedangkan daerah-daerah di luarnya yang diwakili oleh *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) atau Pertemuan Permusyawaratan Federal, tidak tersangkut dalam persetujuan tersebut.

Sebagai realisasi dari Persetujuan Roem-Royen, maka berdasarkan perundingan 1 Agustus 1949, secara bersama-sama kedua belah pihak menetapkan bahwa *cease fire* di Jawa berlaku mulai tengah malam 10/11 Agustus 1949 dan di Sumatera mulai tengah malam 14/15 Agustus 1949 (Van Dijk, 1983:218; Gafuri, 1968:145).<sup>2</sup>

Persetujuan tersebut, ternyata mempunyai implikasi yang kuat terhadap daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, terutama yang pro Republik. Di Kalimantan Selatan, Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV menyatakan bahwa ia hanya mau tunduk kepada Pemerintah Republik, dan menganggap pasukannya adalah TNI juga. Oleh sebab itu, mereka akan meneruskan perjuangan selama tidak ada perintah *cease fire* dari pucuk pimpinan APRI di Yogyakarta. Walau demikian, menurut mereka *cease fire* di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan asal dicapai

---

<sup>2</sup> Di Kalimantan Selatan, Pertemuan di Munggu Raya juga menghasilkan *cease fire* dalam arti sebagai “gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak sementara” agar pertemuan antara pihak ALRI, Tentara Republik, dan UNCI di Munggu Raya dapat dilaksanakan. Namun, *cease fire* yang sesungguhnya dalam arti sebagai “penghentian permusuhan” baru ditetapkan dan berlaku mulai tengah malam tanggal 16/17 Oktober 1949, lihat subbab: Situasi Sesudah “Cease Fire Order”.

melalui perantaraan Central Joint Board (Pimpinan Bersama Pusat).

Pernyataan yang sama juga disampaikan pihak Gubernur Tentara ALRI saat menanggapi undangan Abdullah; Kiai Balangan yang juga anggota Dewan Banjar yang berinisiatif mengundang pihak ALRI untuk membicarakan penghentian permusuhan. Pihak ALRI menanggapi undangan itu dengan surat resmi bertanggal, Birayang 10 Agustus 1949 dimana antara lain oleh ALRI daerah Balangan Selatan dinyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya gencatan senjata di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan ini, akan tetapi perundingan-perundingan tentang hal itu harus dilakukan dengan perantaraan Republik Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI.<sup>3</sup>

Walaupun mempunyai pengaruh yang kuat, keinginan *cease fire* di Kalimantan Selatan, pada intinya bukan berasal dari pihak gerilya, tapi berasal dari pihak Belanda yang sudah semakin terdesak oleh serangan gencar para gerilyawan. Keadaan seperti inilah yang memaksa Belanda berupaya untuk melakukan perundingan dengan pihak ALRI Divisi IV dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan dengan ditengahi oleh UNCI.

Desakan untuk segera dilaksanakannya penghentian permusuhan di Kalimantan Selatan juga berasal dari para pegawai daerah otonom Banjar, Persatuan Pangrehpraja, Perusahaan Belanda, dan Gabungan Buruh Kalimantan. Mereka mengirim kawat ke Jakarta, agar Belanda segera memenuhi tuntutan gerilyawan untuk merundingkan gencatan senjata melalui perantaraan Pemerintah Republik Indonesia, BFO, dan UNCI.

---

<sup>3</sup> "Surat djawaban ALRI kepada Kiai Batumandi", dalam Soeara Kalimantan, Bandjarmasin, Djumat 19 Agustus 1949 No. 201 Tahun Kelima.

Dalam kawatnya mereka menyatakan bahwa selama ini mereka dalam keadaan tertekan dan nyawa para anggotanya berada dalam keadaan bahaya. Mereka juga menyatakan sulitnya keadaan karena mengingat adanya selebaran-selebaran yang dikeluarkan oleh ALRI Divisi IV yang isinya menganjurkan pegawai-pegawai meninggalkan pekerjaannya, dan menyatakan apabila tidak tercapai pencatatan senjata maka mereka takut untuk masuk kerja.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan *cease fire* di Kalimantan Selatan, maka Residen Borneo Selatan A.G. Deelman, Wali Daerah Mohammad Hanafiah, dan A. Sinaga serta dr. Suranto anggota pengurus harian Dewan Banjar pada tanggal 9 Agustus 1949 berangkat ke Jakarta untuk membicarakannya dengan petinggi-petinggi Belanda di sana.

Agar terlihat sebagai keinginan semua pihak, maka Belanda juga meminta bantuan Badan Koordinasi, dan oleh Badan Koordinasi ditandatangani Mosi bertanggal 17 Agustus 1949 yang ditandatangani oleh R. Sa'ban. Dalam mosi itu antara lain berbunyi:

*Memperhatikan bahwa gerakan kaum gerilya yang sejak tahun 1948 melakukan gerakan perjuangan kemerdekaan yang dimulai dari Hulu Sungai seterusnya menjalar ke berbagai tempat di seluruh Kalimantan Selatan dan sekarang telah sampai di Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan yang pada hari Senin malam tanggal 15 ke 16-8-'49 telah mulai mengadakan tembakan-tembakan di berbagai tempat di dalam kota. Surat selebaran dari pusat pimpinan gerakan tersebut Kandangan 05-8-1949 menyatakan dengan tegas bahwa mereka taat pada persetujuan*

---

<sup>4</sup> C. van Dijk (1981: 216); Wajidi (2007: 140-141), lihat pula, "Pegawai2 kantor2 Pemerintah dan Maskapai tidak masuk bekerdja", dalam Soe-ara Kalimantan, Selasa 30 Agustus 1949 Tahun Ke V no. 219 Siaran Petang pukul 12.00.

*penghentian tembak menembak asal dengan perantaraan Wakil Republik Indonesia. Menimbang: sungguh penting dan sangat perlu lekas-lekas diusahakan terlaksananya penghentian tembak menembak. Memutuskan: minta dengan hormat kepada UNCI dengan perantaraan Dewan Daerah Banjar, Dewan Daerah Dayak Besar dan Dewan Daerah Kalimantan Tenggara, agar menyampaikan kepada yang berke-wajiban untuk segera mengatur dan melaksanakan penghentian tembak menembak di seluruh Kalimantan Selatan (Wajidi, 2007: 143-144).*

Akhirnya, Mosi Badan Koordinasi bertanggal 17 Agustus 1949 yang ditandatangani oleh R. Sa'ban itu membawa hasil. Pemerintah Republik Indonesia mengutus Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo, Kapten Ali Budiarjo, dan Kapten Zaenal Abidin, dengan disertai Kolonel Neals dari UNCI untuk membicarakan pelaksanaan *cease fire* di Kalimantan Selatan.

Meski mempunyai implikasi yang kuat, keinginan *cease fire* di Kalimantan Selatan pada intinya bukan berasal dari pihak gerilya, tapi berasal dari pihak Belanda yang sudah semakin terdesak oleh serangan-serangan gencar dari para gerilyawan.

Melalui perantaraan Badan Koordinasi, secara tidak terang-terangan Belanda telah meminta *cease fire* kepada Pemerintah Republik Indonesia dan UNCI.<sup>5</sup> Padahal, sebelumnya Republik Indonesia secara sadar melalui Persetujuan Linggajati (ditandatangani 25 Maret 1947) kemudian perjanjian Renville (17 Januari 1948) telah melupakan dan meninggalkan Kalimantan.

---

<sup>5</sup> UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) atau KPBBI (Komisi PBB untuk Indonesia) adalah sebutan baru dari Komisi Tiga Negara (KTN) atau *Commission of Good Offices* (Bahasa Inggris) atau *Com-mitie voor Goede Diensten* (Bahasa Belanda), lihat Kementerian Penerangan Republik Indonesia (1949).

Akhirnya, Mosi Badan Koordinasi bertanggal 17 Agustus 1949 yang ditandatangani oleh R. Sa'ban membawa hasil. Maka pemerintah Republik Indonesia mengutus Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo, Kapten Ali Budiardjo, dan Kapten Zaenal Abidin, serta Kolonel Neals dari UNCI untuk membicarakan pelaksanaan *cease fire*, dan utusan itu tiba di Banjarmasin pada 28 Agustus 1949.

Oleh Central Joint Board, disepakati dan ditetapkan untuk mengadakan pertemuan pendahuluan yang bersifat informal (*informal meeting*) antara pihak Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan pihak Belanda.

Berbagai usaha dilakukan untuk merealisasinya, sampai akhirnya pertemuan tersebut dapat terlaksana pada 2 September 1949 di Munggu Raya, Kandangan. Pertemuan itu sendiri, telah menghasilkan beberapa keputusan penting, yakni Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo atas nama Pemerintah dan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) mengakui dengan resmi ALRI Divisi IV sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Hassan Basry. Juga memerintahkan kepadanya untuk mengadakan *cease fire* yang harus terlaksana dalam tempo empat belas hari. Kepada Letnan Kolonel Hassan Basry juga diletakkan tanggung jawab perintah *cease fire* kepada semua pasukan dan kelompok bersenjata yang ada di Kalimantan Selatan.<sup>6</sup> Secara rinci beberapa keputusan penting tersebut dapat dilihat dalam pengumuman bersama, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Detail peristiwanya, dapat dilihat antara lain dalam Hassan Basry (tt.: th.); G.M. Yaman (1979:93 – 94, 96); Ahmad Gafuri (1968:145-150) lihat pula lampirannya; A.H. Nasution (1979:379 – 383); Pemda (1990:262 – 264). Pemahaman yang tepat tentang perintah *cease fire* tersebut, dapat dilihat dalam M. Idwar Saleh (1966:54).

### ***Pengumuman Bersama***

*Pada hari Djum'at tgl. 2 September 1949 djam 10.00 pagi Paduka Tuan Djenderal Major Suhardjo di Munggu Raja (Kandangan) telah mengadakan pertemuan dengan Tuan Hassan Basry dan 9 (sembilan) orang staf beliau.*

*Djenderal Major Suhardjo diiringi oleh 2 (dua) orang adjudannja, seorang militer observer, djuru-bahasa, wakil PT Residen, wakil Territoriaal Comman-dant dan 5 (lima) orang anggota dari Panitia Penghu-bung. Djuga serta wakil ketua dari Dewan Bandjar, tuan M. Said.*

*Selandjutnja Djenderal Major Suhardjo memberi perintah dengan lisan sebagai berikut:*

*a. Atas nama Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia dengan ini saja mengakui dengan resmi tuan Hassan Basry sebagai Letnan Kolonel sebagai Komandan ALRI Divisi IV.*

*b. Atas nama Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Letnan Kolonel Hassan Basry supaya menghentikan permusuhan sesuai dengan pidato PJM Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, jang diucapkan pada tgl 3-8-1949.*

*Kepada Letnan Kolonel Hassan Basry dipertang-gung-djawabkan pula penghentian permusuhan tersebut atas organisasi-organisasi atau golongan-golongan yang bersendjata jang berada di Kalimantan Selatan.*

*Kepada Letnan Kolonel Hassan Basry diperintah-kan buat menundjuk wakilnja untuk mengadakan perhubungan dan selanjutnja perundingan dengan local autoriteiten buat pelaksanaan penghentian permusuhan.*

*Penghabisan Djenderal Major Suhardjo memberi perintah kepada Letnan Kolonel Hassan Basry supaya menghentikan permusuhan ini selambat-lambatnya harus dilakukan dalam tempo 14 (empat belas) terhitung mulai hari ini (2 September 1949).*

*Sesudah itu Letnan Kolonel Hassan Basry menjatakan, bahwa beliau telah menerima perintah penghentian permusuhan dan sanggup melaksanakannya. Sebagai perwakilan beliau ditundjuk Major P. Arya selaku Ketua dan nama anggota lainnya akan menjusul.*

*Sebagai pendjelasan Djenderal Major Suhardjo menegaskan supaya penghentian permusuhan ini didjalankan selekas-lekasnja.*

*Bandjarmasin, 2 September 1949*

- 1. Djenderal Major Suhardjo Hardjowardojo*
- 2. A.G. Deelman, Resident Borneo-Selatan. Territorial Commandant Borneo-Selatan dan Timur.<sup>7</sup>*

Setelah pertemuan tersebut, selama para tamu ada di Banjarmasin, situasi Kalimantan Selatan mulai tenang, sebab kedua belah pihak yang bertikai sama-sama menahan diri guna melaksanakan “cease fire” sampai terlaksananya *cease fire* yang sesungguhnya sebelum tanggal 16 September 1949, melalui sebuah perundingan.

Bagi Gerakan Tengkorak Putih, peristiwa Pertemuan di Munggu Raya telah memberikan pengaruh kepada pasukannya karena di Kandangan mereka mulai berbenah diri dengan membentuk formasi dan menempati sebuah markas di Sungai Kudung. Begitu pula di Banjarmasin, mereka menempati sebuah markas di Kuin Muara. Pakai-an pasukan yang awalnya tidak seragam, telah diupayakan

---

<sup>7</sup> Disalin dari Tjilik Riwut Dalam Ahmad Gafuri (1968:172).

dengan seragam serba hitam dan *badge* bercap tengkorak dengan tulang bersilang, serta di bawahnya bertuliskan angka 40.000, terdapat pada lengan kiri baju.

## **B. Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih**

Pasukan Tengkorak Putih menanggapi hasil pertemuan di Munggu Raya dengan penuh ketidakpercayaan terhadap niat baik Belanda dan menjadikan dirinya untuk tidak terikat kepada hasil pertemuan tersebut. Bahkan sejak 3 September 1949 oleh komandan mereka telah diperintahkan untuk memulai aksi-aksinya.<sup>8</sup>

Sebelum pelaksanaan aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih, maka atas persetujuan Letnan Kolonel Hassan Basry, Kapten Danussaputera telah mengadakan pertemuan khusus dengan para komandan Pasukan Tengkorak Putih dalam dua tahap. Tahap pertama, dengan Said Abdul Kadir dan Abdul Muti, dan tahap kedua dengan Syukur Gani, Ali Akbar, dan Suhaili. Dalam pertemuan tersebut, telah dibicarakan tentang pelaksanaan taktik atau strategi, penerimaan tugas operasional, serta aksi-aksi yang bersifat intimidasi atau pengacauan terhadap Belanda beserta kaki tangannya dengan sedapat mungkin tidak menggunakan senjata api dan inisiatif ada di tangan masing-masing komandan.

Supaya pihak Belanda tidak menimpakan kesalahan kepada ALRI Divisi IV, maka sedapat mungkin diusahakan agar setelah melakukan aksi-aksinya, pihak Belanda kemudian mengetahui bahwa yang melakukan adalah Pasukan Tengkorak Putih. Caranya dengan meninggalkan identitas pelaku yakni dengan pemasangan pamflet dan penggunaan senjata tajam yang ulunya bergambar tengkorak bertuliskan "Go Teng Po" dan harus ditinggalkan di tempat peristiwa.

---

<sup>8</sup> Penjelasan tertulis dari Danussanutera, 10 Desember 1991.



Said Abdul Kadir saat berada di tengah-tengah  
Pasukan Tengkorak Putih

Dalam aksi-aksinya itu, anggota kelompok gerilya ini kadangkala menyebut kesatuannya sebagai Divisi Tengkorak Putih atau Lasykar Rakyat Murba. Tujuannya untuk mengacaukan pikiran pihak Belanda. Aksi-aksi yang pertama kalinya dilakukan oleh Pasukan Tengkorak Putih adalah melarang para pengungsi sukarela untuk kembali ke kota Kandangan. Kalimantan Berdjung edisi 9 September 1949 dan 27 September 1949 dalam C. van Dijk (1983:219) memberitakan bahwa pada tanggal 3 dan 4 September 1949 para pengungsi yang berjumlah sekitar 30.000 orang telah memadati daerah-daerah pada radius 3 dan 5 kilometer dari pusat kota Kandangan, sehingga menimbulkan masalah bagi desa-desa yang ditempatinya. Himbauan Residen dan Komandan Tentara Belanda agar mereka kembali tidak digubris. Para pengungsi baru mau pulang setelah diperintahkan berbuat demikian oleh ALRI Divisi IV pada pertengahan bulan tersebut. Tapi para pengungsi kemudian menjadi ragu karena Divisi Tengkorak Putih memperingatkan mereka jangan kembali.

Adanya larangan Pasukan Tengkorak Putih, sebenarnya dilatarbelakangi oleh kekuatiran akan adanya usaha balas dendam dari pihak Belanda kepada penduduk yang kembali ke kota, dan memang sebagaimana dijelaskan di muka, Pasukan Tengkorak Putih telah meragukan niat baik Belanda untuk melaksanakan rencana pelaksanaan *cease fire* secara sungguh-sungguh.

Bagi pihak Belanda, masyarakat maupun sebagian anggota ALRI Divisi IV, aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih itu dipandang sebagai tindakan yang mengganggu rencana pelaksanaan *cease fire*. Bahkan juga dianggap menentang perintah ALRI yang diberi tanggung jawab untuk mempersatukan semua kelompok gerilya yang ada. Padahal aksi-aksi dan larangan Pasukan Tengkorak Putih agar para pengungsi jangan kembali ke kota Kandangan tidak terlepas dari kerjasamanya dengan sebagian anggota ALRI Divisi IV.<sup>9</sup>

Setelah 2 September 1949, pihak ALRI sendiri menanggapi perintah Jenderal Mayor Suharjo dengan penuh hati-hati. Usahnya untuk mempersatukan semua kelompok gerilya yang ada seringkali mengalami hambatan mengingat ada yang sebelumnya tidak mau menggabungkan diri dan merasa tidak terikat kepada perintah *cease fire*.

Kalimantan Berdjung edisi 26 September 1949 (van Dijk., 1983: 212-213) memberitakan bahwa Pasukan Tengkorak Putih yang menamakan dirinya sebagai Lasykar Rakyat Murba, telah menentang usaha-usaha penggabungan ke dalam ALRI Divisi IV dengan mengedarkan pamflet di Kandangan yang isinya menasehati kelompok-kelompok bersenjata lain agar menolak menyerahkan senjata mereka kepada ALRI Divisi IV. Senjata-senjata itu menurutnya masih diperlukan untuk melawan kaum kapitalis Belanda dan Borjuasi.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Baseri D, Bamban, 20 Januari 1992; Danussaputera, Banjarbaru, 22 Desember 1991; Zainal, Banjarmasin, 1 Maret 1992.

Pamflet yang dikeluarkan Pasukan Tengkorak Putih itu sebenarnya sebuah "counter pamphlet" yang merupakan sebuah taktik bahwa ada sebuah kelompok gerilya yang tidak terikat kepada perintah *cease fire*. Setelah peristiwa tersebut, barangkali terjadi beberapa pertempuran antara anggota-anggota Lasykar Rakyat Murba dengan ALRI Divisi IV di Kandangan, tetapi berita-berita tentang pertempuran yang sedemikian itu disangkal para pemimpin kedua pihak (Ka-Be 6-10-1949 dalam C. van Dijk, catatan kaki, 1983:213).

Walau demikian, akhirnya Pasukan Tengkorak Putih menanggapi usaha-usaha ALRI dengan positif. Tidak dengan jalan menggabungkan diri, tetapi dengan memperbantukan sebagian personilnya ke dalam formasi ALRI Divisi IV. Dalam formasi tersebut, anggota pasukan Tengkorak Putih dikirim ke Daerah Rehabilitasi Batalyon (B) Kalimantan Timur, menyusul pasukan-pasukan dari ALRI yang telah dikirim terlebih dahulu. Pasukan Tengkorak Putih yang diperbantukan tersebut, sebagian besar berasal dari mantan anggota BPRI berjumlah 20 orang dipimpin oleh H. Suri, Mukeri Abadi, dan Sunandio. Pelepasan pasukan tersebut dilaksanakan melalui sebuah upacara di depan markas Sungai Kudung yang mana tiap-tiap regu berbaris, dan oleh Abdul Muti serta Said Abdul Kadir mereka dipanggil satu persatu untuk dijadikan pasukan yang akan dikirim ke Kalimantan Timur.<sup>10</sup>

Usaha Letnan Kolonel Hassan Basry untuk menggabungkan kelompok-kelompok gerilya yang ada terutama Pasukan Tengkorak Putih, tampaknya tidak lagi dilakukan dengan sepenuh hati, setelah melihat adanya kenyataan bahwa Belanda telah memanfaatkan "cease fire" sebagai sarana untuk memperkuat diri. Setelah pertemuan di

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Baseri D., Bamban, 19 Januari 1992; Rumli, Gumbil, 22 Januari 1992. Lihat pula Hassan Basry (tt.:th.); G.M. Yaman (1979:101) beserta lampirannya.

Munggu Raya, 2 September 1949, serdadu KNIL, KL dan Polisi NICA telah berani keluar masuk kampung sesukanya, sambil mengancam penduduk. Mereka bahkan melanggar dan melucuti senjata-senjata anggota gerilya yang menjaga garis demarkasi. Bahkan pula, di dekat garis demarkasi di Karang Jawa, serdadu Belanda telah menembak mati beberapa orang penduduk, yakni Angah, Alidan, dan Tarmin yang ketika itu sedang mengangkut padi yang baru dipanen.<sup>11</sup>

Melihat kenyataan tersebut, pihak ALRI Divisi IV yang ada di bawah komando langsung Letnan Kolonel Hassan Basry mengambil suatu kesimpulan bahwa perjuangan bersenjata untuk menyingkirkan Belanda harus diteruskan, namun pada kenyataannya tentara ALRI tidak bisa bertindak karena telah terikat kepada perintah *cease fire*. Oleh sebab itu, Letnan Kolonel Hassan Basry kemudian mempunyai pikiran bahwa keberadaan Pasukan Tengkorak Putih harus diakui sebagai salah satu alat perjuangan yang tersembunyi untuk melawan Belanda dari belakang untuk mempercepat angkat kakinya dari Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan itu, dilakukanlah kerjasama taktis antara ALRI Divisi IV dan Pasukan Tengkorak Putih dengan cara memperlengkapi Pasukan Tengkorak Putih dengan persenjataan yang lebih modern, serta memperbolehkan dan memperbantukan sebagian anggota ALRI menjadi bagian dari Pasukan Tengkorak Putih.

Sejak kerjasama taktis itulah, maka Kapten Gusti Aman selaku Komandan Komando Markas Daerah Tengah merestui dan menginstruksikan kepada Said Abdul Kadir dan Abdul Muti agar membentuk Pasukan Tengkorak Putih yang anggotanya khusus dari ALRI Divisi IV yang diserahi tugas untuk memegang senjata dan menjaga penyim-

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Abdul Hasan, Sungai Kudung, 23 Februari 1992.

panannya, serta untuk menjaga kebiasaan Belanda yang suka menipu, artinya bersiap-siap berhadapan kembali dengan KNIL, KL, dan Polisi NICA jika tidak dapat dilakukan, sebelum pasukan resmi ALRI dapat digerakkan.<sup>12</sup>

Dengan dibantu oleh Yon Mobiel Divisi pimpinan Samidrie Dumam, maka sebagian kecil anggota ALRI kemudian menjadi "anggota" Pasukan Tengkorak Putih guna menghadapi Belanda. Pembentukan pasukan yang anggotanya dari ALRI tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan antara lain ALRI lebih memiliki keahlian atau pengalaman tempur serta memiliki persenjataan yang lebih memadai dibandingkan dengan anggota Pasukan Tengkorak Putih yang bukan berasal dari ALRI.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan 11 orang informan yang ditanya tentang kapan terbentuknya Gerakan Tengkorak Putih, ada 9 orang yang menyatakan bahwa kelompok gerilya ini sudah dibentuk sebelum 2 September 1949, yakni Baseri D, Danussaputera, G.M. Yaman, Rumli, Mustafa, Ahmad Sani G., Asyikin, Alimin, dan Zainal (Lihat daftar sumber). Gusti Aman (G.M. Yaman) yang kedudukannya waktu itu sebagai Komandan Komando Markas Daerah Tengah, membenarkannya dengan menunjuk Pasukan Tengkorak Putih yang dikirim ke Daerah Rehabilitasi Batalyon (B) Kalimantan Timur, wawancara, Banjarbaru, 17 Desember 1991. Bandingkan dengan Hassan Basry (tt:th) ; G.M. Yaman (1979:101) beserta lampirannya. Lihat pula Kalimantan Berdjung 9-9-1949, 17-9-1949, dan 26-9-1949 (Van Dijk, 1983: 212-213 dan 219) yang secara implisit mendukung pernyataan ini.



Pasukan Tengkorak Putih

Pasukan tersebut, selain bertugas untuk mengantisipasi aksi-aksi serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA secara langsung, tugasnya dalam memegang senjata dan menjaga penyimpanannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menaati atau melaksanakan Perintah Harian Rahasia ALRI yang berisi antara lain, supaya pasukan-pasukan menyimpan senjatanya jangan sampai jatuh ke tangan Belanda dan menghindari dari patrolinya (Gafuri, 1968:151; G.M. Yaman, 1979:95). Senjata-senjata yang dipegang oleh anggota Pasukan Tengkorak Putih dari ALRI, terutama senjata paten hasil rampasan. Begitu pula yang disimpan, antara lain di Ambutun, Telaga Langsat, Padang Batung dan Sungai Kudung.

Memang aksi-aksi yang telah dilakukan oleh Pasukan Tengkorak Putih pada mulanya belum begitu dirasakan atau berpengaruh terhadap Belanda, tetapi dengan sering ditemukan adanya pamflet yang berisi ancaman serta senjata tajam yang bercap tengkorak telah menimbulkan desas-desus tentang dari mana aksi-aksi tersebut berasal.

Menurut Danussaputera (1985:th), Pasukan Tengkorak Putih pernah mengadakan pembunuhan terhadap kaki tangan Belanda di Pasar Kandangan, sehingga pada dua

hari berikutnya pasar menjadi sepi. Begitu pula dengan serangan-serangan yang bersifat mengacau terhadap pos-pos polisi di sekitar Rantau telah menimbulkan keresahan di pihak Belanda, mereka kemudian melampiaskan kesalahan kepada ALRI Divisi IV dengan menyatakan ALRI Divisi IV tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diperintahkan oleh Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo. Dari sinilah timbul kesulitan, bagaimana Belanda dapat mengetahui asal mula peristiwa tersebut kalau serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA terus melakukan aksi-aksinya dan belum melakukan perundingan dengan pihak ALRI Divisi IV.

Adanya aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih dan reaksi Belanda yang menuduh ALRI Divisi IV yang melakukannya dan dipandang tidak mampu mengatasi kelompok gerilya yang ada, tampaknya menyebabkan Letnan Kolonel Hassan Basry merasa perlu untuk mengendalikan aksi-aksi kelompok gerilya ini. Ia memerintahkan agar aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih tidak terlalu radikal.<sup>13</sup> Perintah tersebut dikeluarkan agar tidak terjadi saling teror antara tentara ALRI dengan serdadu Belanda dan adanya aksi-aksi yang radikal justru dikuatirkan benar-benar mengganggu rencana pelaksanaan perundingan untuk menghasilkan *cease fire* yang sesungguhnya.

Sejak munculnya perintah tersebut dan ditambah oleh semakin banyaknya anggota ALRI yang secara utuh maupun setengah-tengah menjadi anggota Pasukan Tengkorak Putih, menyebabkan aksi-aksi yang semula direncanakan dengan kekerasan menjadi semakin terhambat dan secara taktis berada di bawah komando ALRI Divisi IV, walau secara organisatoris masih berada di luarnya.

Dengan demikian, di Kandungan tidak pernah terjadi kontak senjata secara terbuka dengan pihak Belanda. Ak-

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Zhafury Zumry, Banjarmasin, 15 Februari 1992.

tivitas Pasukan Tengkorak Putih lebih cenderung bersifat ancaman, yakni berupa pemasangan pamflet, penangkapan dan penahanan mata-mata musuh, serta berjaga-jaga untuk mencegah dan menindak serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA yang melanggar garis demarkasi serta pelanggaran lainnya.

Pemasangan pamflet di Kandangan antara lain dilakukan di pasar, tiang telepon dan listrik, pohon-pohon, bahkan di Benteng Kandangan. Pamflet tersebut berisi kata-kata dan lukisan yang bernada ancaman. Tujuannya adalah selain untuk mengingatkan pihak Belanda agar tidak berbuat sekehendak hati, juga bertujuan agar Belanda cepat-cepat meninggalkan Benteng Kandangan.

Aksi-aksi pemasangan pamflet antara lain dilakukan oleh anak buah Lopido (Matsih); seorang komandan kompi pada markas Sungai Kudung, dan pernah pula dilakukan oleh Muslim bersama Hok Tong Hen (Tarsad). Tentang peristiwanya, Muslim<sup>14</sup> menceritakan sebagai berikut:

*Saya berdua dengan Hok Tong pernah memasang pamflet di Parincahan. Pamflet itu dipasang di tiang telepon, bergambar pembakaran dan pembunuhan serta bertulisan, "awas tengkorak putih", "berani mendirikan tengkorak putih berani pula jadi tengkorak". Ketika pamflet baru dipasang tiba-tiba datang jeep polisi Belanda menembaki kami. Kami lari, sehingga sepeda saya ketika itu tidak sempat dibawa; tertinggal di Parincahan.*

Selain pemasangan pamflet, Pasukan Tengkorak Putih juga melakukan serangan yang bersifat psikologis ke Benteng Kandangan. Hal tersebut dilakukan agar Belanda sadar bahwa ancaman-ancaman pada pamflet tersebut ti-

---

<sup>14</sup> Wawancara Muslim, Banjarmasin, 5 Maret 1992.

daklah main-main. Oleh sebab itu, anggota pasukan yang terdiri dari Go Teng Po (Said Abdul Kadir), Alimin, Hok Tong Hen (Tarsad), Muslim, Sukeri, Arjan, Saal, dan Yakub pernah menembaki Benteng Kandangan. Mereka berangkat sesudah maghrib dari Sungai Kudung ke Gambah Dalam. Sesudah waktu sholat isya mereka bergerak menembaki benteng tersebut. Korban di pihak mereka tidak ada, sedangkan di pihak Belanda tidak diketahui.<sup>15</sup>

Pasukan Tengkorak Putih juga mempunyai andil dalam menangkap dan menahan mata-mata musuh. Di markas Sungai Kudung, terdapat sebuah rumah tahanan yang dijaga secara ketat oleh anggota kelompok gerilya ini, sampai diadakannya proses pengadilan terhadap tahanan tersebut. Selain mata-mata musuh yang ditahan di situ, terdapat pula anggota ALRI yang oleh suatu sebab dianggap layak untuk ditahan, warga masyarakat yang dipandang melanggar syariat agama, misalnya yang kedapatan berhubungan badan di luar nikah, serta anggota KNIL maupun Polisi NICA yang tertangkap atau menyerahkan diri. Mengenai yang terakhir ini, pernah terjadi dua orang polisi NICA bernama Torino dan Darmin menyerahkan diri ke Sungai Kudung. Senjata mereka diambil dan melalui proses peradilan akhirnya mereka dijadikan anggota Pasukan Tengkorak Putih.

Tidak semua tahanan adalah hasil tangkapan anggota kelompok gerilya ini, tetapi juga hasil tangkapan anggota ALRI Divisi IV. Seorang anggota Pasukan Tengkorak Putih bernama Amis A. yang ketika juga masih menjadi anggota ALRI pernah menyerahkan 2 orang mata-mata Belanda untuk ditahan di Sungai Kudung. Begitu pula seorang anggota ALRI bernama Ibnu Hajar (Haderi) pernah menye-

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992; Muslim, Banjarmasin, 5 Maret 1992.

rahkan satu orang mata-mata Belanda langsung kepada Alimin, salah seorang anggota Pasukan Tengkorak Putih di Sungai Kudung.<sup>16</sup>

Selain aksi-aksi yang telah dijelaskan, aksi-aksi lainnya yang sejenis kemungkinan besar ada. Namun peristiwa-nya kurang begitu terdeteksi lantaran aksi-aksinya berskala kecil, sporadis, dan tidak secara terbuka. Sehingga pendeskripsiananya secara mendetail sulit dilaksanakan.

Walau demikian, kecenderungan umum dari aktivitas Pasukan Tengkorak Putih adalah berjaga-jaga agar jangan sampai pihak Belanda berbuat semena-mena. Untuk kepentingan tersebut, beberapa orang anggota Pasukan Tengkorak Putih dari markas Sungai Kudung dikirim ke daerah-daerah, sekaligus untuk mengembangkan keanggotaan kelompok gerilya ini di daerah yang ditempatinya. Mindrie Umar, seorang mantan anggota ALRI Divisi IV yang kemudian menjadi Komandan Peleton I Pasukan Tengkorak Putih di Negara/Daha menyatakan aktivitasnya hanya berjaga-jaga.<sup>17</sup>



Bendera Merah Putih koleksi Museum Waja Sampai Kaputing yang pernah dipergunakan salah satu peleton Pasukan Tengkorak Putih

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Amis A., Gambah Luar, 26 Januari 1992; Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992.

<sup>17</sup> Wawancara Mindrie Umar, Kambang Basar, 27 Januari 1992.

Di markas Sungai Kudung, pada periode September sampai pertengahan Oktober 1949, anggota kelompok gerilya ini terus bertambah. Pada mulanya mereka berjumlah sekitar 50 – 70 orang dan menempati dua buah rumah di sekitar markasnya sendiri. Namun tempat tersebut semakin tidak memadai. Oleh sebab itu, Go Teng Po (Said Abdul Kadir) memerintahkan anak buahnya untuk membangun sebuah barak untuk ditempati oleh anggota-anggota barunya. Dalam memenuhi kebutuhan akan makanan bagi anggota kelompok gerilya ini, di markas Sungai Kudung terdapat dapur umum dengan jumlah *kawah*<sup>18</sup> 2 sampai 3 buah. Yang bekerja di dapur umum ini antara lain, Abdul Manaf, Mardang, Aminah, Halimah, Ampau, dan Hudari.<sup>19</sup>

Bahan makanan itu sendiri berasal dari sumbangan sukarela penduduk yang dikumpulkan melalui pangkalan-pangkalan tersendiri di desa-desa. Dalam hal ini, Polisi Laskar Pasukan Tengkorak Putih mempunyai peranan yang cukup penting dalam pengumpulannya. Tidak semua anggota Pasukan Tengkorak Putih memenuhi kebutuhan akan makanan di markas Sungai Kudung, tetapi juga di markas-markas ALRI Divisi IV, dan hal ini dilakukan oleh anggotanya yang berasal dari anggota ALRI. Walaupun demikian, Pasukan Tengkorak Putih maupun anggota ALRI sama-sama memperoleh bahan makanan dari rakyat yang sukarela membantu, karena memandang tujuan perjuangannya sama yakni mengusir Belanda.

### **C. Pengaruh Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih**

Pengaruh aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih lebih berkenaan dengan aspek psikologis dibandingkan dengan

---

<sup>18</sup> Kawah adalah wajan yang berukuran besar untuk menanak nasi, sayur dan lauk.

<sup>19</sup> Wawancara Abdul Manaf dan Aminah, Bakarung Selatan, 24 Januari 1992; Abdul Hasan, Sungai Kudung, 23 Februari 1992.

aspek lainnya. Di sini tidak dibicarakan seberapa besar pengaruhnya, namun yang jelas pengaruhnya ada dan hal ini terlihat dari adanya reaksi-reaksi yang langsung maupun yang tidak langsung ditujukan kepada Gerakan Tengkorak Putih.

Memang perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dan dipandang Pasukan Tengkorak Putih mempunyai andil dalam perubahan tersebut tidaklah semata-mata akibat pengaruh aksi-aksi kelompok gerilya ini, tetapi boleh jadi dan mungkin sebagian besar dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luarnya, antara lain akibat adanya pemogokan, aktivitas anggota ALRI Divisi IV, maupun akibat adanya peristiwa di tingkat pusat yang berpengaruh di daerah, yang pada kebalikannya justru berpengaruh kepada aksi-aksi kelompok gerilya ini. Dapat dikatakan, pemberi pengaruh tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain dan menimbulkan hasil pengaruh yang tak dapat ditentukan "berapa besar" keterpengaruhan dari masing-masing pemberi pengaruh tersebut.

Selama aksi Pasukan Tengkorak Putih berlangsung, aksi-aksinya kadangkala ditafsirkan oleh Belanda sebagai aksi-aksi yang dilakukan tentara ALRI Divisi IV dan menuhnyanya sebagai pelanggaran terhadap perintah *cease fire*. Namun setelah mereka tahu yang beraksi adalah Pasukan Tengkorak Putih, mereka justru menuduh ALRI yang tidak mau bahkan dipandang tidak mampu menegakkan kekuasaannya terhadap kelompok gerilya ini.

Pengaruh aksi-aksi kelompok gerilya ini ditunjang oleh slogan-slogan dan simbol-simbol yang digunakannya. Slogan-slogan untuk menambah semangat perjuangan maupun untuk mengancam musuh dengan bernada seram seringkali didengungkan terutama melalui pamflet, seperti "awas tengkorak putih", "berani mendirikan tengkorak putih berani pula jadi tengkorak", "tengkorak putih

menuntut 40.000”, dan ”tengkorak putih berjuang untuk rakyat murba”. Sedangkan simbol yang digunakan yakni lukisan atau cap tengkorak dengan tulisan 40.000 pada bendera Merah Putih, pada ulu pisau dan parang, maupun pada benda lainnya, sedikit banyak telah mengingatkan pihak Belanda akan kekejamannya atas peristiwa ”pembantaian 40.000 jiwa” di Sulawesi, dan dengan sendirinya juga mengingatkan kepada Letnan Kolonel H.J. Veenendal sebagai mantan atasan Kapten Raymond Westerling untuk tidak coba-coha melakukan hal yang sama di Kalimantan Selatan.

Di Kandangan, pengaruh psikologis dari aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih terlihat dengan adanya orang-orang Belanda yang tidak begitu berani lagi sembarangan ke luar rumah. Mereka lebih banyak berada di rumahnya masing-masing di Benteng Kandangan.<sup>20</sup> Bahkan, dengan adanya nama-nama yang ”berbau” Cina, seperti Go Teng Po (Said Abdul Kadir), Mutisme (Abdul Muti), Hok Tong Hen (Tarsad), dan Lopido (Matsih), disertai dengan aksi-aksi mereka yang dipandang sebagai ”aksi rakyat murba” yang termasuk di dalamnya adalah kaum proletar atau buruh, telah menimbulkan penafsiran bagi Belanda bahwa pasukan Tengkorak Putih digerakkan oleh orang-orang komunis yang diselundupkan dari Cina atau Tiongkok. Penafsiran Belanda tersebut termuat dalam *De Indische Courant* yakni *Prije Pers*.<sup>21</sup>

Bagi ALRI Divisi IV, keberadaan Pasukan Tengkorak Putih adalah sebuah dilema. Di satu sisi ALRI diperintahkan untuk mengkonsolidasikan atau menggabungkan semua kelompok bersenjata yang ada termasuk Pasukan Tengkorak Putih, namun di sisi lain ia melihat bahwa ke-

---

<sup>20</sup> Wawancara Baseri D., Bamban, 19 Januari 1992.

<sup>21</sup> Lebih jauh tentang hal tersebut, lihat subbab ”Banjarماسin: Peleburan dan Perbenturan”.

beradaan kelompok gerilya ini perlu diakui dan didukung untuk menghadapi aksi-aksi Belanda. Dapat dikatakan, dengan "taktik kerjasama" dilema tersebut dapat diatasi. ALRI tidak benar-benar menguasai kelompok gerilya ini, karena bentuk penguasaan ALRI hanya dalam mempengaruhi taktisnya saja. Dengan demikian, permintaan Belanda agar ALRI Divisi IV mau menetralisasi keadaan, menghentikan tembak-menembak termasuk menghentikan aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih tidak akan terpenuhi. Bagi ALRI, aksi-aksi tersebut justru akan berhenti dengan sendirinya apabila Belanda terlebih dahulu menghentikan aksi-aksinya sendiri dan melakukan perundingan dengan hasilnya yang tidak merugikan perjuangan.

Belanda kemudian menyebarkan pamflet berisi "Pemberian Tahu" bertanggal 12 September 1949 yang dikeluarkan oleh "Territorial dan Troepen Kommandan dari Borneo Selatan dan Timur". Dilihat dari isinya, pamflet itu merupakan salah satu bentuk manipulasi kegelisahan Belanda, karena selain adanya pemogokan umum, pada rentang waktu 3 sampai 12 September 1949 telah terjadi aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih terhadap Belanda. Oleh sebab itu, pihak Belanda kemudian mencari tahu dan mengeluarkan pamflet "Pemberian Tahu" yang isinya mendesak agar perundingan selekasnya dilaksanakan, namun Belanda melakukannya dengan cara yang licik yakni dengan menyatakan bahwa apabila Letnan Kolonel Hassan Basry menolak, berarti ia telah melanggar perintah 2 September dan dengan demikian menjadikan dirinya pelanggar hukum (Ka-Be 13-9-1949 dalam C. van Dijk, 1983:221).<sup>22</sup>

Di berbagai pertemuan atau perundingan yang dilaksanakan setelah keluarnya pamflet tersebut, tidak diketahui

---

<sup>22</sup> Lihat lebih detail isi pamflet tersebut pada memoar Danussaputera "Kalimantan Terbakar oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan".

apakah aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih turut dibicarakan. Namun di dalam Pertemuan 16 – 17 Oktober, ketika istirahat, Letnan Kolonel H.J. Veenendal pernah menanyakan tentang kelompok gerilya ini kepada Kapten Danussaputera selaku wakil ALRI dalam perundingan tersebut dan dijawabnya dengan mengatakan bahwa kelompok gerilya tersebut bertujuan untuk mengingatkan akan kesalahan Veenendal selama di Sulawesi.<sup>23</sup> Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut, sedikit banyak aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih mempunyai andil akan keberhasilan wakil-wakil ALRI Divisi IV mempengaruhi jalannya perundingan.

## D. Situasi Sesudah “Cease Fire Order”<sup>24</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sesuai rencana atau kesepakatan bersama dalam Pertemuan di Munggu Raya, maka dalam jangka waktu empat belas hari setelah pertemuan tersebut, akan diadakan perundingan guna menetapkan dan melaksanakan *cease fire* yang resmi. Namun, sampai tanggal 11 September rencana tersebut belum juga terpenuhi. Sehingga, pihak Belanda menyebarkan pamflet bertanggal 12 September 1949 yang isinya bernada mengancam.

Tidak terlaksananya rencana tersebut, antara lain disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pihak ALRI meragukan niat baik Belanda karena setelah pertemuan di Munggu Raya, serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA mu-

---

<sup>23</sup> Wawancara Danussaputera, Banjarbaru, 17 Desember 1991.

<sup>24</sup> *Cease Fire Order* dihasilkan oleh Perundingan 16 – 17 Oktober di Banjarmasin. Perundingan tersebut adalah puncak dari pertemuan atau perundingan yang pernah dilakukan antara ALRI dan Belanda yang menghasilkan *cease fire* resmi di Kalimantan Selatan. Detail peristiwa perundingan tersebut dapat dilihat dalam memoir G.M. Yaman (1979:96-97) dan Danussaputera (1985; th.) yakni dua orang yang mewakili ALRI Divisi IV atau yang diutus oleh Letnan Kolonel Hassan Basry untuk mewakilinya dalam perundingan tersebut.

lai berani keluar kota Kandangan dan berbuat sekehendak hati keluar masuk kampung yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan kecuali dengan kekuatan yang ekstra. Kedua, pihak ALRI terlebih dahulu harus menyiapkan materi perundingan yang harus dipertimbangkan secermat-cermatnya sebagai bahan yang akan dibawa oleh delegasi. Ketiga, pihak ALRI terlebih dahulu harus menyampaikan hasil pertemuan di Munggu Raya kepada semua komandan pasukan di daerah-daerah dan mengatur strategi persiapan pasukan-pasukan untuk menempati pos-pos di perbatasan kota apabila terjadi penentuan garis demarkasi. Kegiatan-kegiatan tersebut, memerlukan waktu yang cukup mengingat luasnya daerah yang harus dijangkau sebagian besar dengan jalan kaki.

Adanya tenggang waktu antara 2 sampai 12 September 1949, seharusnya Mayor P. Arya yang ditunjuk sebagai wakil ALRI melakukan kontak dengan perwira penghubung Belanda, namun hal tersebut tidak terlaksana. Baru setelah 9 September 1949, Kapten Gusti Aman dengan restu Letnan Kolonel Hassan Basry mengadakan kontak dengan pihak Belanda di Banjarmasin. Usaha itu pun gagal sehingga melepaskan ALRI dari tanggung jawabnya melaksanakan perundingan dalam waktu empat belas hari setelah diresmikan.

Setelah 12 September 1949, beberapa pertemuan atau perundingan telah dilaksanakan antara pihak ALRI dengan Belanda akan tetapi kurang menghasilkan kesepakatan.<sup>25</sup> Kecuali kemudian, atas usul pihak ALRI, kedua belah pihak akhirnya sepakat agar perundingan nantinya dibawa ke tingkat Pusat, yakni di bawah pengawasan pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Tiga Negara (KTN).

---

<sup>25</sup> Detail peristiwanya antara lain dapat dilihat dalam Hassan Basry (tt.: th.); G.M. Yaman (1979: 95-97); Pemda (1990: 266-267).

Akhirnya pertemuan yang direncanakan tersebut dapat terlaksana yakni pada 16 – 17 Oktober 1949 bertempat di kediaman *Gouverneur van Borneo* (Gubernur Kalimantan) di Banjarmasin.<sup>26</sup> Pihak ALRI diwakili oleh Kapten Danussaputera sebagai ketua merangkap anggota yang diutus oleh Letnan Kolonel Hassan Basry dengan Kapten Danussaputera sebagai Ketua Delegasi ALRI diperintahkan menghadirinya berdasarkan Surat Perintah bertanggal 13 Oktober 1949.

Kapten Danussaputera didampingi oleh Kapten Gusti Aman sebagai anggota. Sedangkan pihak Belanda yang hadir adalah Dr. Eisenberger, Letnan Kolonel H.J. Veenendal dengan satu orang ajudan; sebagai ketua delegasi Belanda didampingi oleh Kapten Verdijk, Letnan J. Koster, Asisten Residen Bloedemaker, van Harding, satu orang penerjemah dan satu orang notulen. Dari pihak delegasi Pemerintah dan Militer Republik Indonesia yang hadir adalah Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo sebagai ketua delegasi sekaligus ketua perundingan, didampingi oleh Kapten Muntoyo dan Kapten R. Subari. Sedangkan dari pihak KTN diwakili oleh Mayor William D. Edmond, sekaligus sebagai saksi perundingan.

---

<sup>26</sup> Menurut G.M. Yaman (1979:96) peristiwanya terjadi pada 6 Oktober 1949. Meski Gusti Aman (nama samaran G.M. Yaman) turut hadir sebagai utusan pihak ALRI mendampingi Kapten Danussaputera, namun beliau lupa tanggal yang tepat. Seharusnya bukan tanggal 6 Oktober melainkan tanggal 16 Oktober 1949, sebab Kapten Danussaputera sebagai Ketua Delegasi ALRI diperintahkan menghadirinya berdasarkan Surat Perintah bertanggal 13 Oktober 1949.

Tentara Nasional Indonesia.  
Korps IV.  
di  
Kalimantan.

Surat Perintah.  
No. 20 / 174 / 1949.

Panglima Div. IV. ALRI, memerintahkan kepada:  
Nama/ Pangkat : Danussaputra / Kapten.  
Jabatan : Jd. Kap. Staf Div. IV.  
Untuk : Menakili Panglima Div. IV.  
menghadiri rapat panitia di  
Bandjarmasin.  
Mengucapkan segenapnya perintah ini.  
Perintah selesai.

Dikeluarkan di : tempat.  
Tanggal : 15 Okt. 1949.  
Diam : 11.00.



Surat Perintah dari Letnan Kolonel Hassan Basry  
kepada Kapten Danussaputra sebagai Ketua Delegasi ALRI  
dalam perundingan dengan pihak Belanda

Agenda pembicaraan yang disepakati dalam perundingan tersebut, antara lain: (1) Penetapan tanggal dimulainya pelaksanaan *cease fire order*, (2) Pengaturan cara patroli bersama, (3) Penempatan “panitia kecil” di setiap kota kabupaten atau distrik sebagai pos penghubung, dan persiapan timbangan terima kota-kota tersebut dari pihak Belanda ke tangan ALRI Divisi IV.

Perundingan tersebut merupakan sebuah pertemuan yang bersifat formal karena ditengahi oleh Misi Pemerintah dan Militer Republik Indonesia dan Komisi Tiga Negara, serta mempunyai agenda pembicaraan dan diatur dengan aturan yang bersifat formal.

Perundingan itu sendiri kemudian menghasilkan beberapa keputusan yang nantinya berpengaruh terhadap perubahan situasi politik dan militer saat itu, termasuk terhadap keberadaan Pasukan Tengkorak Putih, antara lain ditetapkannya dan berlakunya *cease fire* di Kalimantan Selatan mulai tengah malam tanggal 16/17 Oktober 1949, diadakannya patroli bersama antara pihak ALRI dan

Belanda, serta penetapan dan pelaksanaan perundingan lanjutan guna pembentukan panitia kecil dan mempersiapkan timbang terima kota-kota, yakni: (1) Di Kandangan, pada 20 Oktober 1949, (2) Di Barabai, pada 23 Oktober 1949, dan (3) Di Amuntai, pada 25 Oktober 1949.

Setelah perundingan tersebut, pengibaran Bendera Merah Putih diperbolehkan oleh Belanda sejak 24 Oktober 1949. Upacaranya yang pertama dilaksanakan di muka Balai Kota Banjarmasin, kemudian diikuti di tempat-tempat lainnya. Dengan demikian, Kalimantan Selatan benar-benar dalam keadaan tenang dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, karena kedua belah pihak yang bersengketa sungguh-sungguh melaksanakan *cease fire order* dalam arti “penghentian tembak menembak” maupun “penghentian permusuhan”. Sejak itu, secara berangsur-angsur pihak Belanda menarik serdadunya dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan memusatkannya di Pelaihari dan Banjarmasin.

Pos-pos yang ditinggalkannya secara berangsur-angsur pula ditempati oleh tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, termasuk tangsi KNIL di Benteng Kandangan, yang kemudian diisi oleh pasukan yang dipimpin oleh Martinus sekaligus pangkatnya dinaikkan menjadi kapten.

Bagaimanakah akibatnya terhadap Gerakan Tengkorak Putih? Setelah perundingan tersebut dan ditariknya serdadu dan polisi Belanda dari Hulu Sungai, maka kelompok gerilya ini diperintahkan untuk menghentikan semua kegiatannya terhitung sejak 25 Oktober 1949, serta bersama-sama ALRI Divisi IV mengisi pos-pos yang ditinggalkan KNIL di Benteng Kandangan.

Namun ternyata tidak semua anggota Pasukan Tengkorak Putih mau menaati perintah tersebut. Sebagian ada yang memandang bahwa perjuangan mereka belum selesai. Mereka masih berkeinginan untuk menumpas apa

yang dinamakan mereka sebagai kaum kapitalis atau borjuis dan orang Belanda yang berkedok Indonesia. Mereka menolak juga karena mendengar desas-desus bahwa mereka akan digabungkan dengan orang-orang KNIL dan Polisi NICA; bekas musuh mereka.

Surat kabar Kalimantan Berdjuang memberitakan bahwa pihak ALRI yang bertugas mengembalikan keamanan, berhubungan dengan perhentian permusuhan yang dicapai, telah dilakukan tindakan keras terhadap anasir-anasir yang berusaha mengganggu keamanan dan ketenteraman penduduk di suatu tempat di daerah Birayang. Dalam peristiwa ini, pihak ALRI telah berhasil menewaskan 4 orang anggota gerombolan bersenjata yang ternyata memakai pakaian hitam dan berikat kepala berwarna merah serta terdapat tanda atau gambar tengkorak.<sup>27</sup>

Sementara itu, tidak lama sesudah terjadinya kesepakatan perhentian permusuhan, di markas Sungai Kundung telah terjadi pro dan kontra antara Said Abdul Kadir dengan pengikutnya di satu pihak yang menghendaki terus berjuang, dengan pihak Abdul Muti yang menghendaki agar Pasukan Tengkorak Putih ikut bergabung di Benteng Kandangan.

Pertentangan itu akhirnya memuncak dengan pergi-nya Said Abdul Kadir meninggalkan markas Sungai Kundung ke daerah Banjarmasin, dengan sedikit pesan kepada anak buahnya bahwa barang siapa mau menyusulnya akan tetap diterima dan diakui sebagai anak buahnya. Ia dengan disertai oleh Habibi (Said Nunci), Alimin, Abdul Manaf, Ishak, dan Mustafa berangkat dengan mobil sedan. Ketika sampai di Gambut, mereka kemudian berjalan kaki dan akhirnya tiba di rumah pembakal Syaifullah yang ke-

---

<sup>27</sup> "ALRI bertindak terhadap Anasir2 yang tidak bertanggung djawab", dalam Kalimantan Berdjuang tahun ke V No. 295 Senin 17 Oktober '49.

mudian dijadikan markas, yakni antara Bukittinggi (daerah Pasar Arba) dan Kuala Lumpur (daerah Pasar Selasa; Malintang).<sup>28</sup>

Selain itu, perubahan-perubahan terus terjadi dan akibat lebih jauh dari Pertemuan 16 – 17 Oktober dan datangnya Missi Militer Republik Indonesia di Kalimantan Selatan telah memberikan pengaruh terhadap awal dari akhir ALRI Divisi IV yang berubah matra dari Matra Laut ke Matra Darat. Perubahan itu didasarkan atas Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 518/49 tanggal 2 November 1949 yang menyatakan bahwa status ALRI Divisi IV dihapus dan dijadikan TNI Angkatan Darat dalam kesatuannya yang bernama Divisi Lembu Mangkurat (Divisi Lambung Mangkurat) dengan panglimanya Letnan Kolonel Hassan Basry. Peresmian Divisi Lambung Mangkurat dilaksanakan di Kandangan tanggal 10 November 1949 (Justian, 1972:25; Kodam X/Lam, 1970:31).

Berkenaan dengan pembentukan Divisi Lambung Mangkurat, maka Pasukan Tengkorak Putih diinstruksikan pula untuk menggabungkan diri ke dalam divisi tersebut dengan satu peringatan bahwa apabila tidak melaksanakannya akan diberikan tindakan tegas.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka anggota kelompok gerilya ini kemudian memindahkan markasnya dari Sungai Kudung ke Kuangan. Namun tidak lama kemudian mereka pindah lagi ke Rantauan, dan akhirnya bermarkas di Gambah Dalam.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992; Mustafa, Gumbil, 22 Januari 1992; Abdul Manaf, Bakarung Selatan, 24 Januari 1992.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Baseri D, Bamban, 20 Januari 1992; Rumli, Gumbil, 22 Januari 1992; Aminah, Bakarung Selatan, 24 Januari 1992; dan Zhafury Zumry, Banjarmasin, 15 Februari 1992.



Bekas lokasi markas Pasukan Tengkorak Putih di Gambah Dalam yang kini ditempati rumah dan bengkel mobil.

Dari Gambah Dalam, anggota kelompok gerilya ini kemudian berkumpul dan menyusul Abdul Muti yang telah lebih dahulu tiba di Benteng Kandangan. Tetapi, dengan datangnya kembali Mustafa yang mengabarkan keadaan di daerah Banjarmasin telah mendorong sebagian anggota kelompok gerilya ini untuk membatalkan niat mereka memasuki eks tangsi KNIL di Benteng Kandangan dan memutuskan pergi menyusul komandannya; Said Abdul Kadir. Mereka itu terdiri dari Asyikin, Rusli Bangsing, Bung Muda (Bustani), Hok Tong Hen (Tarsad), Muslim, Suriansyah, H. Darmawi, Suri, Yacub, Bachtiar, Berahim, dan Rusli, dengan membawa senjata-senjata paten berangkat pada malam hari dengan rute dari Gambah Dalam ke Sungai Kudung, Karang Jawa, Jambu, Pengambangan kemudian ke Sungai Raya, dan singgah di sebuah rumah milik seseorang bernama panggilan Kacil. Keesokan harinya, dengan menumpang bus akhirnya mereka sampai di Gambut dan dengan berjalan kaki mereka tiba di markas serta disambut oleh komandan mereka, Said Abdul Kadir.<sup>30</sup>

Di Kandangan, setelah peresmian Divisi Lambung Mangkurat, maka anggota Pasukan Tengkorak Putih di-

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Asyikin, Parincahan, 21 Januari 1992; Muslim, Banjarmasin, 5 Maret 1992.

masukkan ke dalam Batalyon Martinus. Sejak itu, secara tidak langsung Pasukan Tengkorak Putih di daerah Kandangan menjadi bubar. Meski demikian, pada kenyataannya kelompok-kelompok bersenjata yang menamakan dirinya sebagai Divisi Tengkorak Putih masih ada di daerah Kandangan. Bahkan, di daerah Barabai jumlah anggotanya tidak bisa dikatakan sedikit. Aksi-aksinya seringkali menimbulkan benturan-benturan dengan pihak Divisi Lambung Mangkurat.

Aksi-aksi mereka yang berada di luar kontrol pimpinan ketentaraan telah mengakibatkan kekacauan, terutama di sekitar Hulu Sungai, yakni berupa penculikan dan pemerasan oleh anggota Pasukan Tengkorak Putih ini terhadap rakyat yang menurut istilah mereka adalah bekas musuh atau masih menjadi kaki tangan Belanda.

## **Bab III**

# **Akhir Gerakan Tengkorak Putih**

### **A. Hulu Sungai: Meneruskan Perjuangan**

Di daerah Kandangan, bagi sebagian mantan anggota Pasukan Tengkorak Putih, dan mantan anggota ALRI, serta mantan anggota kelompok gerilya lainnya seperti MN 1001/MTKI yang telah menggabungkan diri ke dalam Divisi Lambung Mangkurat, bukanlah suatu tindakan yang berakhir dengan ketenangan. Sebab adanya usaha-usaha Pimpinan Tentara Pusat untuk menyempurnakan divisi tersebut menjadi kesatuan tentara yang modern telah menimbulkan ketegangan-ketegangan di kalangan anggotanya. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk dilihat siapa-siapa yang tetap menjadi tentara republik dan siapa yang harus didemobilisasikan atau dikembalikan ke masyarakat.

Selain itu, mereka harus menjalani dan melaksanakan aturan-aturan militer yang ketat yang diberikan oleh pejabat-pejabat sipil dan militer dari Jawa yang mereka pandang telah meremehkan dan merendahkan martabat mereka. Dan lebih celaka lagi, menurut mereka, jabatan-jabatan militer dan sipil yang terpenting terus diduduki oleh yang mereka pandang telah bekerjasama dengan Belanda atau diberikan kepada orang-orang dari luar daerah.

Tidak mengherankan memang, dalam masa peralihan tersebut ada sebagian anggota Divisi Lambung Mangkurat maupun yang masih berada di luar divisi tidak sanggup

menghadapi kenyataan dan ingin meneruskan hidup yang avonturis. Akibatnya timbul berbagai ekses dan konflik seperti konflik mental, batin, dan fisik yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti meneruskan cara hidup serobotan, penggedoran, penculikan, pemerasan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dipandang mengganggu ketenteraman umum. Walaupun bagi pelakunya perbuatan tersebut mungkin dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah-sah saja.

Di daerah Kandangan, aksi-aksi dan penolakan sebagian anggota Pasukan Tengkorak Putih untuk menggabungkan diri ke dalam Divisi Lambung Mangkurat sedikit banyak telah menimbulkan kesulitan terhadap pihak Divisi. Padahal bagi Divisi, mengendalikan anggota-anggotanya sendiri bukanlah hal yang mudah, apalagi mengendalikan kelompok-kelompok gerilya yang ada di luarnya. Kelompok besar maupun kelompok kecil yang harus dikendalikan oleh Divisi pada akhir 1949 dan awal 1950 cukup banyak jumlahnya. Selain itu, keadaan selanjutnya dipersulit oleh adanya bentrokan-bentrokan yang sebentar-sebentar terjadi dengan KNIL yang ditarik dari daerah Hulu Sungai.

Surat kabar Kalimantan Berdjuang, tertanggal 29 Januari 1950 dalam C. van Dijk (1983:226) memberitakan bahwa di Kalimantan Selatan ---tidak hanya Banjarmasin, tapi juga di bagian timur dan barat daerah itu ---maupun di Kalimantan Tengah dan Tenggara, Divisi Lambung Mangkurat telah menghadapi satuan-satuan gerilya, termasuk di dalamnya Divisi Tengkorak Putih yang mendebarkan pamflet dengan peringatan "Awat Tengkorak Putih datang" di seluruh Kalimantan Tenggara.

Begitu pula dengan daerah Hulu Sungai lainnya seperti di Barabai, Pasukan Tengkorak Putih masih melakukan kegiatan-kegiatannya. Di sini mereka baru benar-benar menampakkan keberadaannya setelah KNIL dan Polisi NICA ditarik secara berangsur-angsur sejak 23 Oktober

1949. Mereka dipimpin oleh Mutalsam dan bermarkas di Nateh atau Batu Tangga. Sebagian besar anggotanya direkrut dari penduduk desa Rangas dan sekitarnya.

Berbeda dengan Pasukan Tengkorak Putih yang bermarkas di Sungai Kudung, Pasukan Tengkorak Putih yang ada di daerah Barabai tidak diperintahkan untuk menggabungkan diri ke dalam Divisi Lambung Mangkurat, malah sebaliknya oleh divisi mereka diperintahkan untuk menghentikan kegiatan atau membubarkan diri dan kembali ke masyarakat. Namun perintah tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Mereka terus melakukan aksi-aksinya terhadap anggota masyarakat maupun pegawai sipil yang mereka pandang sebagai mantan kaki tangan Belanda ataupun yang menghalangi kegiatan mereka.

Bagi anggota masyarakat maupun Divisi Lambung Mangkurat, aksi-aksi kelompok gerilya ini tidak lagi mendapat simpati. Bahkan lantaran aksi-aksinya itu, Pasukan Tengkorak Putih dipandang sebagai gerombolan pengacau yang mengganggu ketenteraman umum. Sebabnya adalah pertama keberadaan Pasukan Tengkorak Putih di daerah Barabai muncul setelah Belanda menarik semua serdadu dan polisinya dari kota Barabai. Begitu halnya dengan ALRI Divisi IV juga sudah tidak ada lagi, sebab telah resmi bergabung atau dilebur ke dalam kesatuannya yang baru bernama Divisi Lambung Mangkurat. Dengan demikian, keberadaan Pasukan Tengkorak Putih dengan aksi-aksinya dipandang sebagai sebuah gerombolan liar yang mempunyai tujuan tidak jelas.

Kedua, warga masyarakat maupun Divisi Lambung Mangkurat telah melihat atau merasakan bahwa Pasukan Tengkorak Putih telah melakukan aksi-aksi yang mengganggu ketenteraman umum. Di Desa Rangas, anggota kelompok gerilya ini dipandang telah meresahkan warga karena meminta dana secara paksa terhadap penduduk. Begitu pula, pernah terjadi seorang pedagang bernama As-

muni dari Amuntai, telah diculik dan ditahan oleh Pasukan Tengkorak Putih di daerah Nateh. Masyarakat memang tidak selalu mau memberi dana, sebab selain mereka sudah susah atau miskin, mereka juga beranggapan kelompok gerilya ini tidak perlu dibantu lagi mengingat Belanda sudah tidak ada lagi di daerah Barabai.

Melihat kenyataan tersebut, pihak Divisi Lambung Mangkurat akhirnya melakukan tindakan tegas terhadap kelompok gerilya ini, yakni dengan jalan memanggil atau menangkap secara paksa anggota-anggotanya yang ada di daerah Batu Tangga, Rangas dan Birayang. Kalimantan Berdjuang edisi 22 Januari 1950 (Van Dijk, 1983:227) memberitakan, bahwa pihak Divisi Lambung Mangkurat telah menangkap kira-kira 300 orang. Mereka dinyatakan berusaha menyusupi tentara dengan unsur-unsur pembesontak dan mengadakan kursus latihan militer di desa-desa.

Sebagian mereka yang menaati maupun yang ditangkap oleh pihak divisi, akhirnya dikumpulkan di Lapangan Dwiwarna Barabai, untuk kemudian diproses dan dikembalikan ke masyarakat. Sebagian ada yang dijadikan tentara, namun ada juga yang dikirim ke Banjarmasin untuk digabungkan dengan Pasukan Tengkorak Putih pimpinan Said Abdul Kadir yang ketika itu sedang dikumpulkan di kilometer 1 dan 3,5 Banjarmasin.<sup>1</sup>

Di Hulu Sungai, proses pengembalian mantan pejuang dari berbagai kelompok gerilya telah menimbulkan eksese negatif berupa gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Hal itu misalnya terkait dengan harapan agar mereka dapat dilibatkan dalam usaha rumah asap yang selama ini diusahakan perseorangan sebagai penopang penghidupan ekonomi mereka nantinya. Harapan mereka itu ada yang berhasil diusahakan, namun lebih banyak

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Muhammad A., Pagat, 29 Januari 1992.

yang tidak berhasil sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bekas gerilyawan itu.

Oleh karena itulah, maka para bekas gerilyawan yang tergabung dalam gerombolan bersenjata kemudian melampiaskan ketidakpuasan itu dengan melakukan pembakaran rumah-rumah asap di daerah Hulu Sungai yang menurut pihak pemerintah setempat sedikitnya 30 buah. Versi pihak polisi 50 buah, dan dari pihak jawatan lebih banyak lagi yakni 70 buah, mungkin mendekati 100 buah. Pada waktu itu, jumlah rumah asap yang didirikan menurut izin (*vergunning*) berjumlah 1.132 buah dengan menghasilkan seharinya 246.178 kg karet. Pembakaran rumah asap bersama alat-alat dan karet-karetanya itu menimbulkan kerugian jutaan rupiah. Pada saat bersamaan muncul pula perampokan, perampasan dan ancaman oleh gerombolan bersenjata dengan mempergunakan tembakan-tembakan yang terdengar sampai ke kota.

Terdengar desas-desus bahwa alasan gerombolan bersenjata melakukan pembakaran, perampokan, dan pemerasan itu karena rumah asap itu kepunyaan individu, kepunyaan kapitalis, orang kaya yang hanya cari keuntungan sendiri dengan cara memeras rakyat dengan usahanya itu, dari awal tidak suka membantu perjuangan. Sekarang, kata mereka, usaha-usaha oleh rakyat adalah untuk rakyat.

Selain hal di atas, di beberapa tempat, beberapa orang mendapatkan kuitansi derma paksa dengan jumlah tertentu --- ratusan hingga ribuan rupiah. Jika tidak membayar, dikatakan jiwanya tidak dijamin. Ada pula desas-desus mengatakan bahwa uang yang diminta gerombolan bersenjata itu untuk ongkos tentara rakyat mengusir Belanda menghadapi soal Irian. Lainnya adapula dikatakan untuk menolong kaum gembel melarat. Penduduk yang

karena takut atau tidak mau rewel, terpaksa membayar apa yang mereka minta.<sup>2</sup>

Semua kejadian yang menimpa rakyat yang kebanyakan terjadi di kampung-kampung luar kota amatlah menakutkan penduduk. Di kota mungkin tidak terasa, tetapi di kampung-kampung orang merasa kehilangan rasa aman. Terutama penduduk dari kalangan mampu yang mempunyai simpanan uang dan benda perhiasan emas dan intan. Karenanya tidak sedikit yang kemudian mengungsi ke kota, sebab di kampung terasa tidak memperoleh perlindungan dari alat-alat kekuasaan. Dalam banyak percakapan penduduk mereka merasa takut melebihi rasa takut di masa gerilya. Kalau pada masa gerilya, penduduk kota yang mengungsi ke desa, kini penduduk desa mengungsi ke kota.

Dalam mengatasi kekacauan di Hulu Sungai, terutama yang terkait dengan maraknya perampokan, pemerasan, penculikan dan pembunuhan maka pemerintah membentuk Komando Penyelesaian Hulu Sungai dikomandani Letnan Kolonel Hassan Basry. Terkait dengan masalah yang terjadi Hulu Sungai, Hassan Basry menyatakan bahwa hal itu bukanlah semata soal pelanggaran hukum negara yang dilakukan berdasarkan jiwa yang jahat, melainkan juga pelanggaran hukum yang bertalian dengan pergeseran politik yang mana rakyat Kalimantan belum memiliki keinsafan berpolitik. Dalam menghadapi persoalan gerombolan bersenjata, maka Hassan Basry mengeluarkan delapan instruksi kepada bawahannya dalam melakukan patroli dan pengepungan gerombolan bersenjata, dan mengeluarkan Pengumuman bertanggal 8 Oktober 1950 supaya Ibnu Hajar dan gerombolannya, para bekas tentara dan polisi melaporkan diri, maka sampai tanggal 10 bulan Oktober

---

<sup>2</sup> "Apa dibelakang lajar Ketegangan di Hulu Sungai?", dalam Kalimantan Berdjjuang No. 182 Tahun ke V Kemis 14 September 1949.

1949, sebagaimana diberitakan surat kabar Kalimantan Berdjung perampokan-perampokan itu tak terdengar lagi.<sup>3</sup>

Meski demikian, di antara anggota gerombolan bersenjata masih ada yang tidak menaati perintah atau di kemudian hari terus melakukan aksi-aksinya yang dipandang mengganggu ketenteraman umum. Bahkan, aksi-aksinya terus berlanjut sampai munculnya Gerombolan Suriansyah (Tan Malaka) dan Kesatuan Rakyat Indonesia Yang Tertindas (KRlyT) dipimpin Ibnu Hajar, yang mana sebagian dari mereka ada yang menjadi pengikutnya.<sup>4</sup>

## **B. Banjarmasin: Peleburan dan Perbenturan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagian anggota Pasukan Tengkorak Putih yang bermarkas di Sungai Kudung telah menolak untuk berkumpul atau menggabungkan diri ke dalam Divisi Lambung Mangkurat. Mereka pergi ke daerah Banjarmasin dan bermarkas di daerah Gambut; di antara "Kualalumpur" dan "Bukittinggi", untuk terus melakukan perjuangan. Di daerah ini, Said Abdul Kadir yang tetap menjabat sebagai komandan pasukan, terus mengembangkan jumlah anak buahnya yang selain berasal dari masyarakat setempat, juga berasal dari anggota Pasukan Tengkorak Putih yang bermarkas di Kuin Muara, yakni mereka yang tidak mau terikat dengan hasil Perundingan 16 – 17 Oktober 1949 atau yang tidak mau menggabungkan diri ke dalam Divisi Lambung Mangkurat. Mereka ingin terus berjuang menumpas KNIL, KL, dan Polisi NICA yang ketika itu dikumpulkan di Pelai-

---

<sup>3</sup> "Hulu Sungai diselesaikan", dalam Kalimantan Berdjung No. 203 tahun ke V Rabu 11 Oktober 1950.

<sup>4</sup> Selain itu terdapat gerombolan bersenjata lainnya pimpinan Igus, Idar, Hamzah, gerombolan bersenjata pimpinan Hani dan Badera, gerombolan bersenjata pimpinan Kastanjaya, dan gerombolan bersenjata pimpinan Al Hamdi Arief.

hari dan Banjarmasin, maupun orang-orang yang menu-rut pendapat mereka kaum kapitalis, borjuasi, atau kaki tangan Belanda.

Dari daerah Gambut, mereka membuat pangkalan-pangkalan di daerah Banjarmasin, antara lain di Kelayan yang digunakan untuk mempermudah jalannya aksi-aksi penyerangan. Aksi-aksi mereka berwujud pada penyerangan perseorangan, polisi NICA, KNIL, dan tangsi atau asrama-asramanya.

Penyerangan terhadap polisi NICA pernah dilakukan oleh Pasukan Tengkorak Putih yang terdiri dari Alimin, Garau, Apat Irang, dan Hok Tong Hen. Mereka pada malam Jumat bergerak dari sebuah pangkalan di Kelayan menuju Tangsi Polisi Militer Belanda di Sungai Acan (Jalan Antasari-Pekapuran). Tepat di muka tangsi, mereka menembaki Polisi Militer yang turun dari truk yang baru datang dari menonton film di Bioskop Ria.<sup>5</sup> Tembakan mereka baru terhenti setelah muncul bala bantuan dari dalam tangsi yang menyebabkan mereka lari melewati sebuah kuburan menuju Kelayan.<sup>6</sup>

Penyerangan itu sendiri, merupakan peristiwa yang tak disangka-sangka oleh Polisi NICA, karena mereka sebelumnya menduga bahwa dengan adanya pelaksanaan *cease fire* antara Belanda dengan pihak Republik maka berarti kedua belah pihak harus menaati perhentian permusuhan, termasuk di dalamnya perhentian tembak-menembak.

Pihak Belanda maupun Divisi Lambung Mangkurat menyangkan kejadian tersebut dan menyatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap siapa saja yang didapatkan melakukan aksi-aksi yang mengganggu keten-

---

<sup>5</sup> Bioskop Ria pada jaman Jepang bernama Osaka Gekijo sedangkan pada jaman NICA bernama Bioskop Rex.

<sup>6</sup> Wawancara Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992.

teraman umum. Untuk itu kedua belah pihak meningkatkan kegiatan patroli bersama guna mencegah dan menangkal munculnya aksi-aksi yang serupa.

Walau demikian, setelah peristiwa tersebut terjadi lagi penyerangan terhadap Polisi Belanda, juga pada malam hari. Anggota Pasukan Tengkorak Putih yakni Bung Muda (Bustani) dengan Hok Tong Hen yang ketika itu berada di kilometer empat Banjarmasin telah bertemu dan menyerang Polisi Kilat Belanda, sehingga terjadi saling kejar-mengejar. Seorang Polisi Belanda yang bersembunyi dan mengintai di tepi rawa kemudian berhasil menembak mati Bung Muda. Hok Tong Hen yang berada tidak jauh dari Bung Muda, membalas kematian rekannya itu dengan menembak polisi tersebut tepat di kepala. Peristiwa itu telah menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, yakni sama-sama satu orang tewas dan satu pucuk pistol Kodok berhasil direbut oleh Hok Tong Hen.<sup>7</sup>

Datangnya Hok Tong Hen dengan membawa jenazah Bung Muda di daerah “Kualalumpur”, telah menimbulkan kegemparan di kalangan anggota Pasukan Tengkorak Putih. Mereka merencanakan akan membalaskan kematian Bung Muda saat itu juga, namun atas perintah Said Abdul Kadir rencana tersebut menjadi batal dan mereka diperintahkan untuk menghadiri pemakaman jenazah Bung Muda di kuburan muslimin lingkungan mesjid Pasar Selasa di Malintang.

Selain peristiwa tersebut, serangan-serangan lainnya yang bersifat perseorangan, konvoi-konvoi dan asrama-asrama KNIL yang pada ketika itu masih terjadi di Banjarmasin dan Pelaihari, seperti penembakan-penembakan ke Asrama Tatas di Banjarmasin dan penghadang-

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Asyikin, Parincahan, 26 Januari 1992; Ahmad Sani, Kasarangan, 31 Januari 1992; Abdul Manaf, Bakarung Selatan, 24 Januari 1992; Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992; dan Muslim, Banjarmasin, 5 Maret 1992.

an konvoi KNIL yang menuju Pelaihari. Akibat dari aksi mereka adalah timbulnya tindakan-tindakan pembalasan dari pihak KNIL yang dapat dianggap sangat merugikan rakyat dan TNI.

Sementara itu, disamping kesulitan-kesulitan menghadapi Tengkorak Putih, alat-alat pemerintah pada waktu bersamaan juga menghadapi pelbagai macam pengacauan lainnya. Selain menyebut diri Divisi Tengkorak Putih, mereka dalam propagandanya mulai memakai istilah “murba” dan kemudian istilah ini selalu menjadi mode untuk pengacau-pengacau keamanan lainnya.

Pihak Pasukan Tengkorak Putih berkeinginan agar dengan aksi-aksinya tersebut pihak Belanda dapat dengan segera meninggalkan Pelaihari dan Banjarmasin. Namun, tidak seperti aksi-aksi sebelumnya ketika mereka masih di daerah Kandangan, aksi-aksi mereka di Banjarmasin tidak lagi didukung masyarakat maupun Divisi Lambung Mangkurat, bahkan lantaran aksi-aksinya itu mereka kemudian dicap sebagai gerombolan pengacau yang mengganggu ketenteraman umum. Bagi pihak Divisi, ada atau tidak adanya aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih, cepat atau lambat pihak Belanda akan meninggalkan Pelaihari maupun Banjarmasin sebagai realisasi dari Perundingan 16 – 17 Oktober dan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang disepakati antara Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Sama halnya dengan pandangan Divisi Lambung Mangkurat, pihak Belanda juga memandang aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih telah mengganggu ketenteraman umum. Bahkan lebih jauh lagi mereka menganggap Pasukan Tengkorak Putih telah digerakkan oleh orang-orang yang berpaham komunis.

Pada minggu terakhir bulan November 1949 di Banjarmasin telah muncul selebaran-selebaran bertulisan “Angkatan Gerilya Internasional Komunis” yang ditempelkan

dan tak ketinggalan juga orang-orang terkemuka di kota ini telah mendapat kiriman dari organisasi tersebut. Selain itu, di Kuala Kapuas dilaporkan pula adanya pamflet yang bertanda B.L.R. Murba Divisi Tengkorak Putih.<sup>8</sup>

Koran Hindia (*De Indische Courant*) yakni Prije Pers terbitan awal Desember 1949<sup>9</sup>, memberitakan sebagai berikut:

*Volgens de juiste observaties berichten, dat de leiders van De Witte Dodens Koppen Organisaties in Zuider Afdeling van Borneo, ge infiltreerd door de Chinese Communistische Bewegingen.*

*Ze voeren uit rebellen en poging tot vreselijke toestanden door te brengen...*

Terjemahannya:

*Menurut sumber resmi memberitakan, bahwa para pemimpin dari Gerakan Tengkorak Putih itu yang ada di Kalimantan bagian Selatan, diinfiltrasikan oleh kegiatan komunis China.*

*Mereka membuat keonaran dan melakukan kekacauan di mana-mana. . .*

Munculnya pemberitaan Koran Hindia yang menafirkan bahwa Pasukan Tengkorak Putih digerakkan oleh orang-orang komunis tampaknya didasarkan kepada aksi-aksinya yang berupa pengacauan, intimidasi, dan sejenisnya sebagaimana halnya kecenderungan aksi-aksi komunis pada waktu itu dan ditambah lagi oleh adanya nama pelakunya yang “berbau” Cina seperti Go Teng Po dan Hok Tong Hen. Bahkan di Banjarmasin sendiri, aksi-aksi

---

<sup>8</sup> "Lagi2 pamplet?", dalam Kalimantan Berjuang no. 864 Tahun ke IV Djum'at 2 Desember 1949.

<sup>9</sup> Catatan Danussaputera 1950. Menurutnya, klipping koran tersebut diperlihatkan atau diserahkan kepada Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo.

Pasukan Tengkorak Putih jelas-jelas dibantu oleh seorang pemilik restoran Cina yang mempunyai nama panggilan Cina Sibit.<sup>10</sup> Di restoran itulah mereka menumpang makan dengan gratis, atau mengatur strategi penyerangan.

Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih memang tidak semuanya dilaksanakan atas perintah Said Abdul Kadir, seringkali juga muncul atas inisiatif anak buahnya sendiri yang tidak tahan melihat adanya orang-orang yang dahulunya menentang perjuangan gerilya tetap menempati kedudukannya atau memegang jabatan lainnya. Situasi demikian, mengakibatkan anggota Pasukan Tengkorak Putih merasa seolah-olah berada dalam wilayah kekuasaan Belanda atau menjadi tawannya. Di Banjarmasin, tangsi-tangsi atau asrama masih diisi dengan orang-orang anggota KNIL, KL, dan Polisi NICA yang sebagian besar adalah pasukan yang ditarik dari daerah Hulu Sungai. Begitu pula dengan jalan raya, penonton bioskop, dan konvoi yang lewat adalah kebanyakan serdadu dan polisi Belanda. Bagi anggota Pasukan Tengkorak Putih yang tidak memiliki disiplin ketentaraan atau tidak sabar menghadapi situasi dan kondisi demikian, akan mudah terpancing emosinya untuk menyerang, menculik, membunuh orang-orang Belanda dan orang yang mereka pandang musuh. Walaupun pada waktu itu kedua belah pihak yang bersengketa, yakni Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat menghentikan segala tindakan permusuhan.

Selain itu, dalam konteks nasional, KMB yang berlangsung di Ridderzaal; Den Haag Negeri Belanda telah menghasilkan Pengakuan Kedaulatan yang upacaranya dilaksanakan pada 27 Desember 1949, sekaligus diadakannya serah terima pemerintahan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat

---

<sup>10</sup> Wawancara Ahmad Sani, Kasarangan, 31 Januari 1992.

(RIS). Di samping itu, serah terima juga dilakukan di bidang kemiliteran yang meliputi bidang personil, material dan aparat pendidikan (Djamhari, 1971: 58). Pelaksanaan serah terima tersebut dilaksanakan mulai dari eselon atas sampai eselon yang lebih rendah, mulai dari pusat sampai daerah-daerah.

Di Kalimantan Selatan, setelah serdadu Belanda dari kesatuan KL meninggalkan Banjarmasin pada 9 Desember 1949 dan serah terima kekuasaan pemerintahan pada 1 Januari 1950, maka serah terima KNIL dilakukan pada 28 Januari 1950 sebanyak 125 orang dan diterima langsung oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala (Imran, 1971:47).

Sesuai dengan keputusan KMB, tanggung jawab keamanan seluruhnya harus diserahkan kepada APRIS yang berintikan TNI dan meliputi orang Indonesia anggota KNIL serta kesatuan-kesatuan NICA lainnya yang berkeinginan masuk. Sehubungan dengan itu, dalam rangka peleburan anggota KNIL ke dalam APRIS, maka pemerintah RIS mengeluarkan beberapa peraturan dengan tujuan agar peleburan itu dapat berjalan setertib mungkin. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 4/1950 (Lembaran Negara No. 5/1950), maka yang dapat diterima menjadi anggota APRIS adalah warga negara RIS bekas anggota Angkatan Perang RI (TNI) dan warga negara RIS bekas anggota angkatan perang yang disusun oleh atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atau NICA.

Sebagaimana dikatakan Kolonel Simatupang, anggota delegasi Republik dalam komisi militer di KMB, bahwa setelah penyerahan kedaulatan (baca: pengakuan kedaulatan) kepada Republik Indonesia, maka semua angkatan bersenjata (darat, laut, dan udara) dari pemerintah Belanda yang termasuk dalam Viligcheids Batalyon dan Federale Batalyon tidak berkuasa lagi, dan segala tugas atau tang-

gung jawab keamanan dan ketertiban akan diberikan kepada RIS sendiri, kecuali mereka yang diminta. Terhadap tentara KNIL yang akan digabungkan dengan TNI ke dalam tentara RIS, Simatupang menerangkan bahwa tentang hal ini akan diadakan rencana supaya dalam tempo enam bulan, harus tidak ada lagi, juga berkenaan dengan tentara KL yang akan masuk dalam tentara RIS, dinyatakan bahwa kalau ia benar-benar mau masuk, maka ia akan diterima untuk masuk ke dalam tentara nasional RIS, dengan cukup syarat-syarat yang akan ditentukan belakangan.<sup>11</sup>

Menurut Nugroho Notosusanto, ed. (1985:61) usaha peleburan tersebut didasarkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Mohammad Hatta yang berkeinginan mentransformasikan TNI yang lahir sebagai tentara nasional, tentara rakyat, tentara revolusi, menjadi suatu tentara profesional menurut model Barat. Untuk itu dipekerjakan suatu *Nederlands Militaire Missie* (NMM) atau Misi Militer Belanda sebagai pelatih prajurit-prajurit TNI. Kebijakan tersebut sudah barang tentu tidak populer di kalangan TNI dan menimbulkan masalah psikologis.

Ditinjau dari segi politik militer peleburan itu merupakan suatu kemenangan, tetapi akibat psikologis bagi TNI adalah berat. TNI dipaksa menerima sebagai kawan orang-orang yang selama perang kemerdekaan menjadi lawan mereka. Sementara itu di kalangan TNI sendiri banyak anggota-anggotanya yang harus dikembalikan ke masyarakat, sebab dianggap tidak memenuhi syarat-syarat untuk tetap menjadi anggota angkatan perang.

Pengakuan kedaulatan memang amat luas pengertiannya, karena seluruh alat-alat kolonial harus dijelmakan menjadi alat-alat nasional. Dalam implementasinya

---

<sup>11</sup> "Keamanan dan Ketertiban RIS Tanggung Jawab sendiri" Kata Kol Simatupang, dalam *Kalimantan Berjuang*, No. 854 Tahun ke IV, Minggu 20 Nopember 1949.

pengakuan kedaulatan itu banyak mengandung segi-segi politis dan militer, terutama dalam lapangan ketentaraan berupa peleburan tentara KNIL ke dalam APRIS yang menimbulkan ketegangan yang tidak kecil. Bukan saja terjadi di Kalimantan Selatan, melainkan juga di daerah lainnya di Indonesia.

Proses likuidasi KNIL dan peleburan bekas anggota ke dalam APRIS, sekalipun nampak di permukaan berjalan lancar, akan tetapi tidak dapat dilepaskan dari perasaan ketidakpuasan yang tumbuh di kalangan anggota bekas pejuang gerilya yang melihat penyatuan mereka dengan bekas musuh dan menjadikan sebagian dari bekas anggota KNIL itu sebagai komandan adalah suatu tindakan yang tidak bijaksana.

Berhubung dengan sikap yang keras dari sebagian bekas anggota gerilya yang berlandung di balik nama beberapa gerombolan bersenjata yang dinyatakan hendak menentang kebijakan ketentaraan dengan aksi-aksinya yang mengganggu ketenteraman umum, maka mau tidak mau Pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi adanya ketegangan itu.

Letnan Kolonel Hassan Basry selaku Komandan dan penyelesaian daerah Hulu Sungai menyerukan kepada segenap pejuang bersenjata supaya melaporkan diri untuk ditampung dalam ketentaraan. Kepada mereka yang melapor diberikan penjelasan bahwa kembali ke masyarakat adalah jalan satu-satunya bagi para bekas pejuang. Akan tetapi sebagian dari mereka tidak bersedia untuk kembali ke masyarakat sebelum pihak ketentaraan meletakkan dasar-dasar jaminan terhadap mereka.

Selain pengembalian bekas pejuang ke masyarakat, maka dalam rangka menyelesaikan proses peleburan anggota gerilya yang berkeinginan masuk ke dalam APRIS,

maka pada tanggal 11 Oktober 1949 pemerintah pusat membentuk PPTNI (Panitia Pembantu Tentara Nasional Indonesia) yang cabang dan rantingnya dibentuk di kota-kota dan di desa-desa.

PPTNI dibentuk untuk membantu Delegasi Militer Republik Indonesia dan pimpinan Divisi Lambung Mangkurat dalam hal membiayai anggota-anggota Divisi ini. Tugas dari panitia ini adalah mengumpulkan sumbangan-sumbangan melalui perantara cabang-cabangnya yang berada dalam tiap-tiap kecamatan. Hasil sumbangan digunakan sebagai tali asih atau sebagai biaya hidup beberapa waktu setelah kembali ke masyarakat. PPTNI melakukan penerangan atau sosialisasi di kampung-kampung mengenai tujuan PPTNI yang ratusan bahkan ribuan orang. Pada kegiatan penerangan itulah dilakukan pengumpulan dana masyarakat untuk kemudian nanti disalurkan kepada mereka yang kembali ke masyarakat.

Delegasi Militer Republik Indonesia dan Pimpinan Divisi Lambung Mangkurat menganggap, bahwa dengan jalan demikian bantuan untuk anggota Divisi Lambung Mangkurat dapat diatur secara terpusat di Banjarmasin. Dengan demikian dikeluarkanlah suatu peraturan yang melarang pihak Komando Onderdistrict Militer untuk mengumpulkan langsung bantuan dari rakyat ditempatnya masing-masing. Dengan izin dari pihak PPTNI Pusat, mereka boleh pada waktu-waktu tertentu mengambil dari cabang PPTNI setempat uang dan bahan yang diperlukan untuk anggota-anggota Divisi Lambung Mangkurat yang berada dalam wilayahnya (Kementerian Penerangan RI, 1953: 147).

Di Banjarmasin, dr. Gambiro (Anggota PPTNI Pusat) menyatakan bahwa Banjarmasin telah menyumbang sekitar f 40.000 s.d. f 50.000. PPTNI juga telah menerima sumbangan dari masyarakat umum baik individu maupun

firma seperti Kiai Pagatan, NV ODI, H. Arsad, Toko Telaga, H. Terang, H. Taher, Utuh Darham, Awad Said, Pegawai-pegawai NV Aniemi, Toko Andalas, SKI Kotabaru, Kinibalu Kandangan dan Kinibalu Banjarmasin, Kapten R. Subari, NV Dayak, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Sukanda Bratamenggala ---yang mengumumkan pembentukan PPTNI--- menegaskan bahwa uang yang dikumpulkan PPTNI bersama sumbangan yang dijanjikan Belanda, merupakan satu-satunya sumber pendapatan tentara sejak itu. ALRI Divisi IV dilarang mengumpulkan uang sumbangan langsung dari rakyat. Ini berarti berakhirnya masa pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV.

Untuk menyaring siapa-siapa yang memenuhi syarat kesehatan maka Pemerintah Pusat juga mengirim Mayor dr. Suharsono, seorang dokter yang ditugaskan untuk menyusun kesehatan tentara yang ada di Kalimantan.<sup>13</sup> Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1949, para pejabat Republik dari Jawa mulai mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk dilihat siapa yang fisiknya cukup kuat untuk tetap dalam Tentara Republik, dan siapa yang harus dimobilisasikan, dan “dikembalikan ke masyarakat”. Para gerilyawan yang tergolong dalam kategori kedua, demikian dijanjikan, akan diberhentikan dengan hormat (van Dijk, 1983: 223 – 224).

Kedatangan Mayor dr. Suharsono ke Kalimantan Selatan dan adanya pemeriksaan dan penyaringan tentara pada Divisi Lambung Mangkurat, rupanya telah menjadi pembicaraan ramai di daerah Hulu Sungai, khususnya di kalangan tentara. Banyak anggota tentara Divisi Lambung Mangkurat yang merasa diganggu oleh pertanyaan yang muncul dalam hatinya masing-masing. Kadang muncul

---

<sup>12</sup> Kalimantan Berdjuang no. 833 tahun ke V Selasa 25 Oktober 1949.

<sup>13</sup> “Pertemuan ramah tamah dengan Dr. Major Suharsono” dalam Kalimantan Berdjuang No. 848 tahun IV sabtu 12 Nopember 1949.

keraguan dan kekuatiran pada diri mereka. Maklum saja ketika menjadi anggota tentara ALRI Divisi IV dahulu tidak diadakan syarat-syarat kesehatan, pengetahuan, tinggi badan dan lain sebagainya. Yang penting, siapa cakap, aktif, sanggup, tangkas dan berani mati, maka itulah yang diterima masuk tentara. Soal-soal lainnya tinggal di belakang. Memang begitu lumrahnya barisan gerilya.

Kegelisahan para anggota tentara Divisi Lambung Mangkurat mengenai rencana penyaringan kesehatan yang akan dilakukan Mayor dr. Suharsono tergambar dalam pemberitaan surat kabar Kalimantan Berdjuang. Wartawan Kalimantan Berdjuang menuliskan pengalamannya ketika mewawancarai anggota tentara Divisi Lambung Mangkurat.

*Itu hari kita mau interpiu para tentera. Tapi terbalik, mereka jang interpiu kita:*

*"Sesudah penjarangan, bagaimana nasib kami, bung?"*

*"Bagaimana saja jang sakit te-be-se?"*

*"Bagaimana saja sakit encok, tapi mau terus berdjuang?"*

*"Biar saja punya mata 'kawur', saja sanggup angkat sendjata".*

*"Saja buta huruf, apa masih bisa diterima?"*

*"Saja tak mau di-afkir, saja akan berdjuang terus, bung".*

*Tidak kira, kita akan diserbu pertanyaan begitu hebat. Rupanya semangat pradjurit-pradjurit sudah melebihi segala apa, sehingga satu rencana pemeriksaan dan penjarangan, jang memang sudah mendjadi keharusannja bagi tiap-tiap tentera itu, mendapat reaksi sedemikian rupa.*

*Kita terangkan sambil tersenyum, bahwa tentera RIS jang akan datang, haruslah dapat sedjadjar dengan tentera negara-negara merdeka internasional. Baik pakaian dan alat-alat, maupun pribadi dan pengetahuan umumnya. Kita tidak lagi menghadapi daerah sempit Hulu Sungai atau Kalimantan ini, tapi seluruh Indonesia. Bahkan menghadapi dunia, kita harus djangan sampai memalukan. Memang berat tanggung jawab kita dalam RIS jang merdeka kelak. "Djadi, kami jang berdjjuang menggaling batang leher ini, mau diafkir kesamping sadja?" Ia tanja dengan sedih.*

*"Masa begitu bung. Djangan kuatir tak ada korban jang sia-sia" djawab kita. Kita lihat wadjah muka jang berbeda-beda. Ada jang tersenyum, ada jang gembira, ada ketawa, saju, sedih, pilu, asam, mengedjek, mencemooh dan sebagainya. Apa maksudnja, kita tidak maklum.<sup>14</sup>*

Letnan Norman yang diwawancarai wartawan Kalimantan Berdjjuang, menyatakan pendapatnya mengenai rencana penyaringan tersebut:

*Letnan Norman mengatakan, "memang kita akui, kata beliau seorang tentera itu semestinja sehat dan cerdas. Tapi menurut pendapat saja, kalau cuma beralasan "buta huruf" sadja, di satu pulau jang seperti Kalimantan ini, maka tak boleh tidak, tiap-tiap regu tentara kita nantinja hanya akan tinggal beberapa orang sadja lagi. Banjak si buta huruf jang akan kena afkir. Kalau soal batja tulis, saja sanggup turut membasmi dalam tentera dalam tempo 3 bu-*

---

<sup>14</sup> "Tjorat-tjoret Dari Hulu Sungai Utara (2)", dalam Kalimantan Berdjjuang, No. 853 Tahun ke IV, Sabtu 19 Nopember 1949.

*lan. Tetapi, kalau si tentera jang sakit tereng atau "mata kawur", pendeknja saja angkat tangan..... Kita semua ketawa. Tentara djuga tertawa. Di luaran kerap terdengar bahwa anak tentera ada yang djengkel perasaannja, kalau "pisau penjaringan" itu sampai berlaku atas dirinja. Ada desas-desus, mereka jang "dikembalikan ke masyarakat" itu, kalau terdjadi juga akan membentuk satu gerombolan baru di luar TNI. Seakan-akan mereka tidak puas, barangkali.<sup>15</sup>*

Sementara itu, dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Jenderal Mayor Suharjo Harjowardoyo berulangkali menjelaskan posisi para pejuang setelah tercapainya kemerdekaan dengan mengatakan, "*anak-anakku sekalian bukan selamanya pula menjadi tentara*", yang barangkali adalah untuk menenangkan para anggota tentara Divisi Lambung Mangkurat yang menjalani penyaringan nantinya.

Berkenaan dengan penyaringan tentara, maka Letnan Kolonel Hassan Basry yang dimintai pendapatnya oleh wartawan surat kabar Kalimantan Berdjuang menyatakan bahwa nantinya akan diadakan penyaringan tentara yang seadil-adilnya, karena sekarang ini katanya, jumlah tentara Divisi Lambung Mangkurat telah melebihi dari semestinya. Dan ini kalau dibiarkan, masyarakat akan rugi, dan akibatnya negara pun akan menderita. Dalam penyaringan itu nantinya akan dilihat siapa-siapa yang mempunyai kemauan untuk menyumbangkan jiwanya menjadi tentara, dan memenuhi pula akan syarat-syarat yang ditentukan. Lebih lanjut Hassan Basry mengatakan bahwa penyaringan itu tidak memilih orang, tidak peduli ia telah

---

<sup>15</sup> "Tjorat-tjoret Dari Hulu Sungai Utara (3)", dalam Kalimantan Berdjuang, No. 854 Tahun ke IV, Minggu 20 Nopember 1949.

mempunyai paku yang banyak, siapa yang patuh akan disiplin itulah yang menjadi intipati tentara.<sup>16</sup>

Meski harapan akan adanya proses penyaringan yang seadil-adilnya, ternyata fakta di lapangan berbicara lain. Seperti halnya di daerah lain, di Kalimantan Selatan juga terjadi benturan-benturan ketika diadakannya usaha-usaha pembentukan TNI dan peleburan mantan anggota KNIL dan mantan anggota gerilya ke dalam APRIS.

Bersamaan dengan diserahkannya (baca: pengakuan) kedaulatan atas Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka oleh Pimpinan Angkatan Perang Pusat, Kalimantan dijadikan satu teritorialium disebut Tentara dan Territorialium VI (disingkat TT VI), dengan Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala sebagai Panglima. Keberadaan Divisi Lambung Mangkurat dengan sendirinya ditiadakan dan Letnan Kolonel Hassan Basry ditunjuk sebagai Komandan Sub Territorialium Militer II (Brigade B) Kalimantan Selatan.

Sebagai realisasi diri pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 4/1950, maka pada tanggal 28 Januari 1950 Komandan Territorialium VI, yaitu Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala menerima bekas KNIL sebanyak 125 orang. Dalam tulisan Dhany Justian (1972:25) disebutkan, Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala telah menerima 1 kompi infantri dari bawah pimpinan Letnan Satu Sualang dan 1 kompi bantuan dari bawah pimpinan Letnan Kotton.

Sebagian anggota KNIL yang masuk dalam APRIS itu dijadikan pelatih dan komandan pasukan, dan mereka rata-rata dinaikan pangkatnya, sedangkan sebagian besar mantan pejuang gerilya yang masuk APRIS hanya berpangkat rendah dan prajurit biasa.

---

<sup>16</sup> "Fikiran merdeka: Panitia Penjaring", dalam Kalimantan Berdjuang, No. 5 Tahun ke V, Minggu 5 Februari 1950.

Selain itu, utusan militer dari Pusat yang didatangkan ke Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menyempurnakan Divisi Lambung Mangkurat menjadi kesatuan yang modern telah menimbulkan ketegangan-ketegangan pada anggota divisi yang notabene mantan anggota gerilya. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk dilihat siapa-siapa yang tetap menjadi tentara republik dan siapa yang harus dikembalikan atau didemobilisasikan ke masyarakat dengan pesangon.<sup>17</sup> Bagi mantan anggota ALRI Divisi IV yang dikembalikan ke masyarakat atau yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota APRIS, kepadanya diberikan pesangon berupa selembur kain sepanjang 1,5 meter dan uang Rp 50 (Basry, 2003: 86). Disamping itu, mereka juga mendapatkan surat piagam.<sup>18</sup>

Persoalannya tidak hanya itu, setelah menjalani penyaringan mereka harus melaksanakan aturan-aturan militer yang ketat yang diberikan oleh pejabat-pejabat militer mantan anggota KNIL dari Jawa yang mereka pandang telah meremehkan dan merendahkan martabat mereka.

---

<sup>17</sup> Menurut Said Charly (mantan Wakil Komandan Sektor Daerah Z-61 ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Pagat-Barabai), kembalinya anggota TNI atau mantan anggota ALRI ke masyarakat juga atas kemauan sendiri karena terkait dengan tanda kepangkatan. Diceritakan bahwa pernah saat itu tanda pangkat ditaruh di dalam *nyiru* (wadah tempat menampi beras), dan kepada para mantan anggota gerilya diminta mengambil sendiri tanda kepangkatan yang dinginkannya untuk dipasang di baju sebagai atribut tentara. Di antara mereka ada yang kemudian merasa pangkat yang dipilih terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan dirinya, melebihi pangkat bekas komandannya atau pangkat temannya yang lebih berpendidikan, dan padahal ia sendiri berpendidikan rendah atau malah buta huruf, maka dikembalikanlah pangkat itu dan berhenti menjadi tentara, atau kembali ke masyarakat karena menanggung beban psikologis atas pangkat yang dipilihnya itu.

<sup>18</sup> Penulis pernah melihat langsung piagam tersebut yang ditandatangani Hassan Basry. Disamping piagam, mereka mendapatkan uang Rp 50 dan kain menurut beberapa sumber tertulis sepanjang 1,5 meter atau 3 meter.

Dan lebih celaka lagi, menurut mereka, jabatan militer dan sipil yang terpenting terus diduduki oleh orang yang mereka pandang pernah bekerjasama dengan Belanda atau NICA atau diberikan kepada orang-orang dari luar daerah. Sementara itu, ada usaha-usaha untuk memisahkan mantan pimpinan gerilyawan dengan anak buahnya, misalnya kemudian dengan mengirim Hassan Basry ke Kairo Mesir dengan tugas belajar di Universitas Al Azhar dan tinggallah bekas-bekas anak buah sebagai anak ayam kehilangan induknya.

Sekalipun usaha-usaha pihak Pemerintah dan alat-alat kekuasaannya yang dilakukan dengan berbagai cara dan dalam kemungkinannya yang dapat dicapai, namun buah usaha itu hanya dapat mengurangi ketegangan, dengan kata lain pengacauan tidak dapat dibasmi sama sekali. Apalagi sejak Letnan Kolonel Hasan Basry mengundurkan diri dari lapangan ketentaraan atau ditugaskan belajar ke Kairo, maka tugas penyelesaian seluruhnya dipegang oleh Komandan Territorium VI Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala.

Sebenarnya usaha untuk menyelesaikan persoalan gerilya dan pengumpulan senjata yang ada ditangan mereka di Kalimantan Selatan telah dijalankan sebelum maklumat Pemerintah tertanggal 14 November 1950 diumumkan. Dan sejak tanggal 1 November bantuan militer untuk pembersihan di Hulu Sungai telah ditarik kembali setelah sebulan lamanya dijalankan. Sekalipun demikian kriminalitas di Kalimantan Selatan bukan berturun, malah makin tinggi. Hal itu dikarenakan daerah Kalimantan Selatan (wilayahnya dahulu meliputi Kalimantan Tengah sekarang) termasuk cukup luas dan besar yang cukup sukar bagi polisi dan tentara untuk mengawasinya (Kementerian Penerangan RI, 1953: 151).

Seleksi atau penyaringan terhadap ketentaraan memang perlu jika dipandang dari sudut finansial, yakni untuk menghemat pengeluaran negara. Seorang pegawai (katakan saja pamongpraja, polisi, kepala-kepala kampung) yang tadinya di masa pemerintahan NICA, termasuk orang yang aktif membuntuti gerakan-gerakan rakyat, malah terang-terangan menjadi musuhnya rakyat, dan selanjutnya tidak segan-segan menyiksa dengan pelbagai cara sampai di luar garis kemanusiaan, sekarang mereka itu pulalah yang memegang peranan penting dalam pemerintahan dan kepolisian dan kepala kampungnya.

Inilah salah satu hal yang sangat tidak memuaskan perasaan rakyat dan terutama sekali bekas pejuang gerilya. Jiwa rakyat kembali tertekan karena belum dapat dengan tulus ikhlas bekerjasama dengan mereka itu karena mengingat peran mereka di masa penjajahan sebagai kaki tangan Belanda, kendati sekarang mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan rakyat.

Karena soal perasaan itulah, maka ketika lahir Persetujuan Linggajati yang berisi pengakuan Pemerintah Belanda atas kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera, yang dengan sendirinya telah menjadikan Kalimantan berada di bawah pemerintahan NICA, maka rakyat selalu meminta dan mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar Kalimantan masuk provinsi Republik Indonesia. Dalam desakan ini, bukanlah maksudnya hanya sekadar keinginan bergabung atau masuk ke dalam Republik Indonesia, tetapi adalah terkandung hasrat lain yakni agar segera dapat dilakukan penggantian pegawai-pegawai lama yang pro Belanda dengan pegawai baru yang berjiwa rakyat (istilah di masa perang kemerdekaan dahulu, *Republikein*).

Ternyata ketika kemerdekaan diraih, baru disadari

betapa banyaknya tenaga yang telah dikerahkan untuk mengusir musuh, tidak hanya di kalangan sipil terlebih lagi di kalangan bekas pejuang bersenjata. Kalau jumlah sebanyak ini terus-menerus ditempatkan dalam Angkatan Perang, maka negara tak akan sanggup membelanjanya. Padahal, sebagai negara muda juga menghendaki agar uang dan tenaga dikerahkan untuk bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Untuk menghindari pengeluaran yang dianggap berlebihan di kalangan ketentaraan, maka oleh Pemerintah dilakukan beberapa seleksi di kalangan ketentaraan, yakni: (1) Pengembalian bekas pejuang ke dalam masyarakat; (2) Demobilisasi, (pengembalian bekas pejuang bersenjata) ke dalam masyarakat. Dimaksudkan dengan yang pertama adalah mereka yang tadinya turut bertempur dalam medan gerilya waktu revolusi fisik, tetapi tidak sempat diresmikan sebagai Angkatan Perang mereka itu dikembalikan ke masyarakat, dan yang kedua ialah pejuang-pejuang yang telah diresmikan ke dalam APRIS. Golongan kedua ini dikenal dengan nama Corps Tjadangan Nasional (CTN) berada dibawah penilikan Biro Rekonstruksi Nasional atau BRN (Kementerian Penerangan RI, 1953: 157).

Dalam pelaksanaannya, ternyata demobilisasi tentara dan mantan pejuang gerilya ke masyarakat juga menimbulkan permasalahan sosial berupa pengangguran. Tentara yang tergabung dalam Divisi Lambung Mangkurat yang sebelumnya memiliki jaminan hidup, dan hidupnya diatur dengan disiplin ketentaraan kini menghadapi kenyataan mencari penghidupan sendiri dan mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Untuk menghadapi eksese negatif yang mungkin timbul, maka pemerintah membentuk badan-badan, misalnya Panitia Pemulangan Tentara Kemasyarakatan (PPTK) yang berlaku setengah resmi di bawah pimpinan Letnan H. Abdul Aziz dan Kapten Gusti Aman.

Namun ternyata usaha badan tersebut tidak berjalan lancar untuk meringankan beban bekas para tentara.

Selain itu ada pula lembaga bernama PERESTEIN (Perekonomian Sumber Tenaga Indonesia)<sup>19</sup> sebuah organisasi di luar ketentaraan yang juga mengurus pemulangan tentara, dan yang terakhir adalah pembentukan "Yayasan Pembangunan" yang dikelola oleh bekas tentara yang hasilnya untuk kepentingan mereka.<sup>20</sup> Kedua lembaga yang disebutkan terakhir juga kurang berhasil memberikan solusi untuk membantu kelancaran demobilisasi mantan pejuang gerilya dan anggota TNI ke masyarakat. Bahkan pihak pimpinan Divisi Lambung Mangkurat mensinyalir, PERESTEIN telah memperkeruh suasana dengan mengaku-ngaku lembaga bagian dari Divisi. Oleh karena itu, pihak Divisi Lambung Mangkurat mengumumkan kepada masyarakat bahwa PERESTEIN tidak ada sangkut pautnya dengan Divisi Lambung Mangkurat.

Selain itu, dan mengingat masih belum berhentinya tindakan-tindakan seseorang yang mengaku mendapat kuasa dari ALRI Divisi IV, yang berakibat sangat mengeruhkan suasana dan menghalang-halangi penyempurnaan Divisi Lambung Mangkurat, maka Panglima Divisi Letnan Kolonel Hassan Basry menyatakan bahwa sejak tanggal 6 Desember 1949 semua surat-surat kuasa yang ditandatangani oleh Hassan Basry selaku pimpinan Divisi ALRI/Gubernur Tentara dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua pemegang surat-surat keterangan, surat-surat kuasa harus menyerahkan surat-surat dimaksud ke staf divisi di Kandangan untuk diganti menurut keperluan dan kebutuhan keadaan. Barangsiapa yang tidak mengindahkan, de-

---

<sup>19</sup> Lihat Kalimantan Berdjuang, Jumat 22 Desember 1950.

<sup>20</sup> "Urusan bekas Tentera", dalam Harian Pengharapan No. 25 tahun ke I Kemis, 14 September 1950.

mikian Hassan Basry menyatakan, akan dilakukan tindakan keras.<sup>21</sup>

Letnan Kolonel Hassan Basry selaku Panglima Divisi Lambung Mangkurat juga menyerukan kepada seluruh penduduk agar memberi bantuan sepenuhnya pada polisi dan tentara untuk menghilangkan segala anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, yang mengeruhkan suasana ketenteraman di daerah ini.

Terkait dengan adanya beberapa gerombolan bersenjata, Panglima Divisi mengeluarkan sebuah maklumat bertanggal 28 November 1949, yang antara lain berbunyi, bahwa berhubung dengan banyaknya organisasi dan partai yang mencari pengaruh dengan berdasarkan kepada nama ALRI dahulu atau Divisi Lambung Mangkurat sekarang, yang akibatnya mengacaukan masyarakat dan mengeruhkan suasana dan ketertiban umum, maka dengan ini kami jelaskan bahwa organisasi dan partai-partai yang memakai nama BLRM, GRR, AGIK, Tengkorak Putih, Tengkorak Merah, Kulabeti, Murba, dan lain-lain tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan Tentara Nasional Indonesia Divisi Lambung Mangkurat. Lebih lanjut, Hassan Basry menyatakan bahwa organisasi tersebut telah melanggar kedaulatan TNI Divisi Lambung Mangkurat dalam melaksanakan tugasnya sehingga akan diambil tindakan keras.<sup>22</sup>

Selain menyangkut persoalan peleburan mantan pejuang gerilya ke dalam TNI, ternyata masuknya bekas KNIL ke dalam APRIS juga menimbulkan beberapa masalah besar bagi intern APRIS pada umumnya, dan bagi pasukan TNI yang notabene mantan pejuang kemerdekaan, seperti mantan pasukan MN 1001/MTKI dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, atau mantan pejuang gerilya lainnya

---

21 "Pengumuman No.7 Tentara Nasional Indonesia Divisi Lambung Mangkurat", dalam Kalimantan Berjuang, Rabu 7 Desember 1949.

22 Kalimantan Berjuang, Kamis 1 Desember 1949.

seperti Pasukan Tengkorak Putih. Mereka dipaksa untuk menerima KNIL sebagai mitra atau teman sekerja, sedangkan pada masa perang kemerdekaan KNIL adalah musuh mereka.<sup>23</sup>

Bagi mereka masuknya bekas KNIL merupakan duri dalam daging. Perasaan tidak puas yang hampir meliputi seluruh anggota pejuang-pejuang di Kalimantan Selatan, membawa ekses yang kurang baik dalam masyarakat berupa aksi-aksi penjarahan, perampokan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang mereka anggap kaki tangan Belanda. Oleh karena itu dapat dipahami ketika terjadi pengakuan kedaulatan, sebagian mereka masih tetap tinggal di gunung atau di hutan dan tidak bersedia memenuhi undangan Pemerintah untuk masuk APRIS, karena mereka masih melihat keadaan-keadaan yang menyolok mata. Keadaan demikian ini, tidak saja muncul di Jawa, akan tetapi juga di Sulawesi Selatan, dan bahkan di Kalimantan Selatan sendiri yang amat sukar menyelesaikannya (Kementerian Penerangan RI, 1953: 153).

Menurut pendapat mereka, bukan karena hendak menentang politik Pemerintah, dan bukan pula tidak insyaf terhadap panggilan bangsa dan negara, melainkan mereka tidak dapat mengendalikan perasaannya. Atau tidak dapat menerima begitu saja kerjasama dengan bekas-bekas serdadu Belanda yang di dalam perjuangan kemerdekaan merupakan musuh yang besar bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagian bekas anggota gerilya itu tidak bersedia menggabungkan diri dalam APRIS, sekalipun ketika itu sudah ada Divisi Lambung Mangkurat dengan Letnan Kolonel Hasan

---

<sup>23</sup> Pemerintah RIS ada sejak diakuinya kedaulatan negara ini oleh Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai Negara Serikat tanggal 27 Desember 1949.

Basry selaku Komandannya, yang selama perang kemerdekaan adalah pimpinan, panutan dan sekaligus komandan mereka.

Masalah ketidakpuasan itu tidak hanya dirasakan oleh bekas pejuang dari kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, melainkan juga bekas anggota Pasukan Tengkorak Putih dan MTKI/MN1001, sebagaimana terungkap dalam tulisan Kodam X/Lam (1970: 31-32) dan tulisan Dhany Justian (1972: 26) sebagai berikut:

*Pasukan MTK/Tengkorak Putih dan MTKI/MN 1001 yang ketika didrop ke Kalimantan adalah TRI berpendapat bahwa mereka sudah menjadi Tentara Republik Indonesia yang resmi sehingga merasa tidak perlu lagi masuk ke dalam TNI. Badan-badan Perjuangan tersebut di atas bekerja sama dengan tokoh-tokoh ALRI Divisi IV/PK. Dan di samping itu banyak tokoh-tokoh tidak dapat menerima penggabungan KNIL ke dalam TNI tersebut, disebabkan mereka masih beranggapan bahwa bekerjasama dengan KNIL, sama dengan bekerjasama dengan musuh yang dulu membunuh rakyat.*

Sebagian besar para gerilyawan tidak berpendidikan sama sekali, paling tinggi lulusan sekolah dasar, karena itu wajar jika mereka tidak bisa membaca dan menulis. Mereka berasal dari pemuda pedalaman, buruh, perantau, petani, nelayan dan sebagainya Tetapi mereka memiliki semangat patriotik dan nasionalisme serta berani maju ke medan laga mempertaruhkan jiwa raganya, walaupun buta huruf, maka sungguh sukar mengalahkan Belanda yang cukup kuat persenjataannya.

Adanya demobilisasi seperti dikemukakan sebelumnya, tidaklah mengecewakan, jika tidak dibarengi dengan

laku lajak (*over acting*) Tentara Republik yang dahulunya bekas KNIL (Ideham, dkk., (editor), 2003: 764) dan sikapnya meremehkan prestasi daerah dalam perjuangan kemerdekaan (Dijk, 1983: xix). Di samping itu, kekecewaan muncul karena persoalan pribadi dari beberapa tokoh menyangkut perbedaan kedudukan, fasilitas, prioritas dan sebagainya.

Kekecewaan bertambah, setelah sebagian anggota KNIL yang masuk dalam APRIS dijadikan pelatih pasukan, dan rata-rata anggota KNIL dinaikkan pangkatnya. Hal ini menyebabkan satu persatu anggota Pasukan MN 1001/MTKI keluar dari tugasnya, termasuk juga Letnan Satu Sutarman keluar dari kompi yang ia pimpin, kembali menjadi polisi.<sup>24</sup>

Berbeda dengan MTKI/MN 1001 yang memang sebuah organisasi ketentaraan dan mengenal tanda kepangkatan. Pasukan Tengkorak Putih yang cenderung sebuah organisasi kelaskaran dan tidak mengenal kepangkatan, penolakannya terutama dilakukan oleh komandan-komandan pasukannya seperti Said Abdul Kadir yang memang ia pada mulanya adalah anggota TRI dari kesatuannya yang bernama Mandau Telabang Kalimantan (MTK). Begitu juga dengan anggota Pasukan Tengkorak Putih yang berasal dari anggota pasukan BPRI, anggota ekspedisi Batalyon Bantuan Tempur 138 Tengkorak 40.000 ALRI pimpinan Kapten Danussaputera, dan tentara ALRI Divisi IV yang menganggap dirinya sudah TNI resmi.

Selain itu pula, penolakan tersebut juga disebabkan oleh persoalan-persoalan lainnya seperti ketidakpuasan terhadap mantan anggota KNIL yang ketika menjadi TNI telah dinaikkan pangkatnya, dan persoalan pribadi dari beberapa tokoh yang kecewa karena perbedaan kedudukan, fasilitas, prioritas dan sebagainya. Namun yang jelas, selain adanya kecenderungan menganggap dirinya sudah

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara Suriani dengan M.A. Arsyad, 21 Juli 1992.

anggota TNI lantaran ikut berjuang, kecenderungan lainnya yang menjadi sebab penolakan tersebut adalah akibat adanya semangat egosentris dan primordial masih tebal di kalangan pejuang yang mana masing-masing individu atau kelompok merasa mempunyai kedaulatan yang tidak mudah diganggu begitu saja oleh individu atau kelompok lainnya.

Untuk menghindari insiden-insiden yang ditimbulkan oleh adanya benturan-benturan kepentingan itu, maka Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala selaku Panglima Tentara dan Territorium VI Kalimantan mengeluarkan kebijaksanaan yang bersifat kompromis yakni bahwa Pasukan Tengkorak Putih dapat dilebur ke dalam APRIS namun sebelumnya tidak perlu diresmikan menjadi TNI.

Kebijaksanaan Letnan Kolonel Sukanda itu dapat diterima oleh Pasukan Tengkorak Putih. Anggota pasukan ini kemudian dikumpulkan di kilometer 1 dan 3,5 Banjarmasin sebanyak 400 orang termasuk di dalamnya Pasukan Tengkorak Putih yang didatangkan dari daerah Hulu Sungai, untuk kemudian sebagian kecil didemobilisasikan atau dikembalikan ke masyarakat.

Proses demobilisasi itu sendiri berlangsung dengan cara yang sangat sederhana. Tidak ada ujian-ujian yang dikenakan kepada mereka, karena ditentukan sendiri oleh Said Abdul Kadir dan Syukur Gani dengan jalan menunjuk anggota-anggota pasukannya yang diperkirakan memenuhi syarat sebagai anggota TNI.

Mereka yang tidak memenuhi syarat ---demikian pengumuman tertulis yang mereka terima--- namanya tidak tercantum dalam pengumuman tersebut. Mereka yang dikembalikan ke masyarakat diberi pesangon berupa uang sebesar Rp 50 dan kain 3 meter. Ada sekitar 50 orang yang tidak terdaftar, sehingga yang tersisa adalah sebanyak 150 orang.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Muhammad A., Pagat, 29 Januari 1992; Ahmad Sani, Kasarangan, 31 Januari 1992; Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992.



Bioskop Murni di Kandangan; bekas tempat berkumpulnya sebagian anggota Divisi Lambung Mangkurat dari mantan anggota Pasukan Tengkorak Putih yang terkena proses demobilisasi

Selain itu, Pasukan Tengkorak Putih yang menolak dileburkan ke dalam APRIS maupun yang terkena proses demobilisasi, sebenarnya terus saja melakukan aksi-aksinya. Tetapi pada waktu bersamaan para penguasa Republik mengecilkan persoalannya dengan menyatakan tak ada hal yang gawat. Baik Hassan Basry maupun Sukanda Bratamenggala umpamanya menyatakan bahwa sebagian kecil saja dari Divisi (Tengkorak Putih) ini yang terus bertempur. Kegiatan-kegiatannya, kata mereka menegaskan, tidak merupakan ancaman bagi ketenteraman dan ketertiban daerah itu. Divisi Tengkorak Putih yang “sesungguhnya” telah diintegrasikan ke dalam Tentara (Ka-Be 1-1-1950, 27-1-1950 dalam C. van Dijk, 1983:227).

Sementara itu, dengan maksud untuk mengetahui jumlah anggota gerilya yang sebenarnya dengan alamat tempat tinggalnya sehingga nantinya memudahkan bagi pemerintah untuk memanggil mereka sewaktu-waktu jika diperlukan sebagai tenaga yang aktif dalam APRI atau dinas lainnya, maka Komando Tentara dan Territorium VI (Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala) mengeluarkan

pengumuman bertanggal 15 Desember 1950 yang isinya bahwa mulai tanggal 17 Desember 1950 dibuka kesempatan guna mendaftarkan bekas-bekas gerilya yang belum/ tidak termasuk dalam ikatan APRI. Pendaftaran dilaksanakan di tiap-tiap kewedanaan dengan mengisi formulir dengan diketahui wedana yang bersangkutan. Pendaftaran ditutup tanggal 20 Januari 1950.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil pendaftaran, maka sejak bulan Februari 1950 jumlah anggota gerilya yang ditampung sejumlah 16.000 orang. Akan tetapi ternyata kemudian banyak diantara mereka yang mengundurkan diri dari ketentaraan, sehingga jumlah yang tadinya 16.000 orang, pada waktu itu, yaitu dalam Maret 1950 hanya tinggal 6.000 orang yang tetap tinggal dalam formasi tentara sedang yang lainnya yaitu jumlah yang terbesar kembali ke masyarakat, dan bahkan diantaranya banyak yang menggabungkan diri lagi dengan pasukannya di hutan-hutan. Oleh karena keadaan yang selalu pasang surut yang menunjukkan kegoncangan dalam masyarakat, maka mau tidak mau jalan kekerasan dijalankan, yaitu dengan satu ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak ketentaraan tanggal 15 Oktober 1950 supaya anggota bekas gerilya menyerahkan diri dengan senjatanya. Hasil yang dicapai dari ultimatum itu sedikit sekali, bahkan bekas gerilya lebih merajalela melakukan aksinya membakar dan mengganggu keamanan.

Soal keamanan di Kalimantan Selatan telah menarik perhatian demikian jauhnya, sehingga Pemerintah Pusat dan Parlemen merasa perlu untuk mengirimkan satu Komisi Penyelidik untuk mencari bahan-bahan sekitar pengganggu keamanan itu. Akan tetapi hasilnya baru dalam tingkat mempelajarinya sampai dimana ada

---

<sup>26</sup> Kalimantan Berdjuang, Jumat 22 Desember 1950.

kemungkinan untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik, dengan tidak sampai menumpahkan darah lebih banyak.

Timbulnya gangguan keamanan memang tidak dapat dilepaskan dari soal ketidakpuasan (*ontevredenheid*) yang telah berurat-berakar dalam kalangan bekas pejuang, dan bahwa keadaan demikian disebabkan akibat pengembalian kaum gerilya yang kurang sempurna kedalam masyarakat.<sup>27</sup>

Untuk menjernihkan suasana dan ketidakpuasan berbagai pihak terhadap demobilisasi dan penyaringan tentara, maka Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala selaku Panglima Tentara dan Territorium VI Kalimantan menjelaskan persoalan itu dalam sebuah rapat dengan pihak-pihak terkait tanggal 20 September 1950. Sukanda Bratamenggala menjelaskan bahwa sesudah diadakan penyaringan dan penyelidikan di Kalimantan ini dimasukkan juga tenaga dari Jawa yakni dari kesatuan Brigade XVI sejumlah 150 orang. Selain itu terdapat tenaga-tenaga yang menamakan dirinya Tengkorak Putih sejumlah 400 orang, MTKI sebanyak 600 orang, dan ALRI Divisi IV 1.500 orang, jika dijumlah semua adalah 2.650 orang. Kenyataan sampai hari, kata Sukanda Bratamenggala, di dalam kami menyusun Angkatan Darat di Kalimantan ini, tenaga-tenaga yang kita ambil dari daerah ini sendiri, bukan saja 2.650 orang tersebut di atas, tetapi telah mencapai angka 6.000 orang. Jadi nyata sekali menurut Sukanda bahwa di Kalimantan ini sebenarnya tidak ada bekas tentara yang dikembalikan ke masyarakat, malah katanya mengambil (merekrut) tenaga kurang lebih 3.000 orang. Menurut Sukanda, itulah gambaran yang sebenarnya dengan harapan dapat dimengerti masyarakat dan agar tidak menyesatkan pada pendapat umum yang banyak mengatakan bahwa di

---

<sup>27</sup> Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, hlm. 151.

Kalimantan ini banyak tenaga bekas tentara dikembalikan ke masyarakat, kemudian tidak mendapat perhatian Pemerintah (Kementerian Penerangan RI, 1953: 151).

### **C. Masuk Formasi Batalyon 605**

Kembali kepada persoalan Tengkorak Putih yang terus saja melakukan aksi-aksinya yang mengganggu ketenteraman umum. Untuk mengatasi persoalan itu, Panglima Territorium VI telah menunjuk dua orang yang dianggap berpengaruh di daerah Selatan, tetapi pimpinan militer merasa pihak pertama dalam tindakannya sangat ragu-ragu, sedang yang kedua hanya mencari kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di daerah Banjarmasin dan Kalimantan Timur dan Tenggara, yang sudah barang tentu ditinjau dari segi-segi militer sangat merugikan.

Mereka yang diperintahkan untuk menyelesaikan soal Tengkorak Putih tidak memberi hasil yang diharapkan, maka di samping tindakan-tindakan keras, usaha penyelesaian secara bijaksana tidak dilupakan dengan memasukkannya ke dalam TNI. Usaha ini telah berhasil untuk Hulu Sungai, dimana sebagian anggota-anggota Tengkorak Putih telah diresmikan menjadi TNI sebanyak satu kompi (Kementerian Penerangan RI, 1953: 148-149).

Pasukan Tengkorak Putih yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi anggota TNI dimasukkan ke dalam sebuah kompi yang kemudian lebih lazim disebut sebagai Kompi Tengkorak Putih. Kompi ini dipersiapkan dan diberangkatkan ke Muara Teweh untuk memperkuat jajaran Sub Territorium Militer (STM) II/Kalimantan Tengah<sup>28</sup> menyusul Kompi Tarlas yang telah berangkat pada 11 Januari 1950 ke daerah lainnya di Kalimantan Tengah.

---

<sup>28</sup> STM II/Kalteng merupakan salah satu Sub Territorium Militer di samping STM I/Kalbar, STM III/Kalsel, dan STM IV/Kaltim di dalam Territorium Kalimantan yang dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Menteri Pertahanan No.12/W/1950 tanggal 5 Januari 1950. Divisi Lambung

Komandan kompi Tengkorak Putih yang diberangkatkan tersebut tetap dipegang oleh Said Abdul Kadir. Ia yang didampingi oleh empat orang komandan peletonnya, yakni Ishak (Dan Ton I), Alimin (Dan Ton II), Said Nunci (Dan Ton III), dan Sultan (Dan Ton IV), serta dengan anak buahnya yang berjumlah 150 orang, berangkat dengan kapal Rubberpon menyusuri Sungai Barito dan baru sampai di Muara Teweh setelah berlabuh selama hampir 2 hari 2 malam. Kegiatan mereka di sana terutama adalah latihan dasar kemiliteran, seperti baris berbaris, teori dan praktik menembak.<sup>29</sup>

Selain itu, dalam konteks nasional masih terlihat adanya usaha pihak-pihak yang tidak menyetujui adanya RIS, serta golongan subversif lainnya untuk mempengaruhi mantan kesatuan-kesatuan NICA agar melakukan kekacauan di daerah-daerah dengan maksud pemerintah RIS dianggap tidak mampu memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk mencegah kekacauan tersebut, maka oleh pimpinan APRIS telah dikeluarkan kebijakan memindahkan mantan kesatuan-kesatuan NICA yang telah menjadi bagian dari APRIS ke daerah-daerah dimana unsur TNI dari kalangan pejuang kemerdekaan lebih dominan. Sebaliknya, di daerah-daerah dimana unsur mantan kesatuan NICA lebih berpengaruh dimasukkan anggota TNI.

---

Mangkurat yang sendirinya dilebur ke dalam Territorium Kalimantan, personil militernya selain dimasukkan ke dalam STM III, juga dikirim ke luar daerah untuk memperkuat STM lainnya (Kodam X/Lam, 1970:32; Justian, 1972:27).

<sup>29</sup> Wawancara dengan Muhammad A., Pagat, 29 Januari 1992; Ahmad Sani, Kasarangan, 31 Januari 1992; Asyikin, Parincahan, 27 Januari 1992; Alimin, Banjarmasin, 2 Maret 1992; dan Muslim, Banjarmasin, 5 Maret 1992.



Kompi Tengkorak Putih ketika berada di Muara Teweh. Berdiri dari kiri ke kanan, Alimin (Dan Ton II), Said Nunci (Dan Ton III), Rahmad (Pelatih, kiriman Bung Tomo), Ishak (Dan Ton I), Ramin. Posisi setengah berbaring memegang senjata; Sultan (Dan Ton IV).

Di Kalimantan selatan, dengan alasan untuk memperkuat daya tahan tempur yang lebih sempurna, maka oleh Panglima Territorium VI Kalimantan telah pula didatangkan mantan kesatuan-kesatuan NICA dari Jawa. Salah satunya adalah Batalyon II RI-IX Divisi Siliwangi dari Jawa Barat yang tiba di Banjarmasin pada 22 Maret 1950 di bawah pimpinan Kapten Bidjuri. Mantan kesatuan NICA dari KNIL itulah yang sebagai konsekuensi dari Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat No. 83/KSAD/PNTP/1950 tanggal 20 Juli 1950 berubah namanya menjadi Batalyon 605.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan itu, Kompi Tengkorak Putih yang pada mulanya dimasukkan ke dalam formasi Batalyon III<sup>31</sup> tidak lama setelah kedatangannya dari Muara Teweh, pada proses selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam formasi Ba-

<sup>30</sup> Tentang proses terbentuknya Batalyon 605, detail peristiwanya dapat dilihat dalam Kodam X/Lam (1970: 32 – 33) dan Dhany Justian (1972: 28 – 30).

<sup>31</sup> Batalyon III merupakan salah satu batalyon yang dibentuk setelah terjadinya perubahan dari STM III menjadi Brigade II yang kemudian pada 1 Juni 1950 berubah lagi menjadi Brigade B.

talyon 605 pimpinan Kapten Bidjuri dan ditempatkan di kilometer 24 (Landasan Ulin) bersama-sama dengan anggota batalyon lainnya yang berasal dari mantan anggota Batalyon II RI-IX Divisi Siliwangi. Di dalam batalyon 605 ini, kesatuan mereka tetap utuh seperti semula. Walau demikian, dengan masuknya Kompi Tengkorak Putih ke dalam formasi Batalyon 605, dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai tahap yang paling akhir dari proses kemundurannya yang mengakhiri keberadaannya. Sebabnya adalah pertama, secara organisatoris dan taktis sudah sepenuhnya berada dalam formasi Batalyon 605. Kedua, setelah masuk ke dalam batalyon tersebut kesatuan mereka telah berubah nama menjadi Kompi 20. Dan yang ketiga, di dalam Batalyon 605 mereka telah mengenal atau memiliki tanda kepangkatan yang mana sebelumnya sebagian besar di antara mereka belum pernah memilikinya.

## Epilog

Di dalam bab-bab terdahulu telah dipaparkan tentang awal atau latar belakang terbentuknya Gerakan Tengkorak Putih, perkembangan, dan akhir keberadaannya, terutama Pasukan Tengkorak Putih yang bermarkas di Sungai Kudung, Kandangan.

Paparan tersebut telah menunjukkan bahwa Gerakan Tengkorak Putih bukanlah peristiwa yang benar-benar lokal sebab peristiwa ini telah pula dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh aspek-aspek yang bersifat nasional.

Uraian tentang latar belakang telah memperlihatkan bahwa situasi dan kondisi Kalimantan Selatan pada bulan-bulan pertama 1949 sebenarnya kurang memberikan iklim kondusif terhadap terbentuknya kelompok gerilya ini, mengingat adanya usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan untuk menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pusat komando perjuangan dalam melawan Belanda. Namun, dengan adanya pejuang-pejuang asal Kalimantan yang datang dari Jawa yang menolak menggabungkan diri ke dalam tentara ALRI, telah memungkinkan terbentuknya kelompok gerilya ini melalui sebuah kompromi.

Uraian yang ada menunjukkan bahwa Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya, tepatnya sebuah pasukan rakyat dari organisasi kelaskaran yang

turut bergerilya dan bukannya pasukan dari sebuah organisasi ketentaraan. Gambaran ini tentunya tidak terlalu jauh dari kenyataan mengingat organisasi atau formasinya yang bersifat seadanya dan tidak memiliki aturan-aturan yang formal. Pengikat keanggotaan kelompok gerilya ini sendiri bersifat longgar, yakni tujuan dan kepentingan yang sama dalam melawan Belanda, sehingga tidaklah mengherankan apabila kelompok gerilya ini mudah mengalami perpecahan menyusul penarikan mundur serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA dari daerah Hulu Sungai.

Dari keseluruhan uraian tentang latar belakang dan perkembangannya telah diperlihatkan bahwa kelompok gerilya ini sudah terbentuk sebelum 2 September 1949, dan bukannya sesudah tanggal tersebut. Bahkan, uraian yang berkenaan dengan *cease fire* juga menunjukkan bahwa pelaksanaan *cease fire order* dalam arti “penghentian permusuhan” yang resmi di Kalimantan Selatan baru ditetapkan dan berlaku sebagai hasil Pertemuan/Perundingan 16 – 17 Oktober 1949 di Banjarmasin, dan bukannya sebagai hasil Pertemuan tanggal 2 September di Munggu Raya, walaupun dalam rentang kedua pertemuan tersebut telah terjadi pula kesepakatan *cease fire* (penghentian tembak menembak).

Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih terhadap Belanda yang muncul setelah pertemuan di Munggu Raya sehingga terkesan tidak mematuhi kesepakatan *cease fire* yang ditujukan kepada semua kelompok bersenjata, telah mengangkat nama kelompok gerilya ini yang sebelumnya kurang begitu dikenal luas.

Meski secara organisatoris Pasukan Tengkorak Putih berdiri sendiri, secara taktis aksi-aksinya banyak dipengaruhi oleh Komando Tentara ALRI Divisi IV, menyusul dengan semakin banyaknya tentara ALRI yang menjadi “anggota” kelompok gerilya ini dalam rangka menghadapi

serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA yang seringkali melanggar perintah *cease fire*. Dari sinilah dapat terlihat adanya ciri khas yang menonjol dari kelompok gerilya ini yakni ia telah bekerjasama atau dimanfaatkan oleh Tentara ALRI sebagai “senjata” untuk menyerang serdadu dan polisi Belanda dari belakang.

Tindakan tersebut dilakukan lantaran munculnya aksi-aksi serdadu dan polisi Belanda yang mengganggu rencana pelaksanaan *cease fire*, sedangkan pihak ALRI sendiri seakan tidak mampu berbuat apa-apa karena merasa terikat dengan perintah *cease fire* tersebut.

Ciri lainnya adalah aksi-aksi kelompok gerilya ini cenderung bersifat ancaman, intimidasi atau melakukan pen-jagaan. Hanya sedikit aksi kekerasan yang langsung ditujukan kepada serdadu dan polisi Belanda. Hal tersebut terjadi lantaran adanya pengendalian dari tentara ALRI dan oleh adanya pengaruh usaha-usaha menciptakan suasana yang lebih aman untuk mengadakan perundingan guna menghasilkan dan melaksanakan *cease fire* yang resmi. Dengan demikian, adalah terlalu berlebihan apabila ada pendapat atau generalisasi yang menyatakan, bahwa aksi-aksinya telah menyebabkan banyak pertumpahan darah dimana-mana.

Pengaruh aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih terhadap kemajuan gerilya dan perkembangan politik jelas ada, namun relatif kecil. Sebabnya adalah selain aksi-aksinya cenderung bersifat ancaman dalam bentuk perang psikologis (*psywar*) atau berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan serdadu dan polisi Belanda, perubahan yang ada lebih disebabkan oleh pengaruh lainnya yang relevan seperti pengaruh Perundingan 16 – 17 Oktober 1949 di Banjarmasin yang menghasilkan *cease fire order*. Bahkan sebaliknya, perubahan yang terjadi seperti penarikan mundur serdadu dan polisi Belanda dari daerah Hulu Sungai dan

terbentuknya APRIS justru sangat berpengaruh terhadap keberadaan kelompok gerilya ini.

Kalau ditelusuri dari awal hingga akhir keberadaannya, tampak jelas bahwa kelompok gerilya ini mempunyai dua periode perjuangan yang saling berbeda. Periode pertama, berlangsung setelah pembentukannya sampai dengan Perundingan 16 – 17 Oktober 1949. Sedangkan pada periode kedua, berlangsung setelah perundingan di Banjarmasin tersebut sampai dengan masuknya kelompok gerilya ini ke dalam Batalyon 605 (Juli 1950).

Dari kedua periode tersebut, terlihat adanya pergeseran pola dari motif tindakan. Kalau pada periode pertama aksi-aksinya ditujukan kepada para penghianat, serdadu KNIL, KL, dan Polisi NICA atau kaki tangannya, maka pada periode kedua selain ditujukan kepada mantan orang-orang Belanda juga kepada orang yang dianggap merugikan atau menghalangi perjuangan mereka. Begitu pula dengan motif tindakan, pada periode pertama aksi-aksi mereka disebabkan oleh adanya keinginan untuk mengusir Belanda, sedangkan pada periode kedua juga disebabkan oleh adanya faktor kekecewaan atau rasa ketersinggiran terutama setelah adanya pembentukan APRIS dan proses demobilisasi.

Selain itu, terjadi pula pergeseran pandangan masyarakat terhadap aksi-aksi kelompok gerilya ini. Pada periode pertama aksi-aksinya didukung oleh sebagian besar masyarakat atau Tentara ALRI Divisi IV, maka pada periode kedua aksi-aksinya dan penolakannya untuk menggabungkan diri ke dalam Divisi Lambung Mangkurat atau kembali ke masyarakat telah menyebabkan aksi-aksinya kurang didukung, dan bahkan dipandang telah mengganggu ketenteraman umum. Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan lainnya tentang aksi-aksinya yakni perjuangan kelompok gerilya ini cenderung “kesiangan” karena

berada di saat-saat akhir Perang Kemerdekaan di daerah ini (1949-1950). Begitu pula, dilihat dari aksi-aksinya, kelompok gerilya ini berakhir dengan kesan yang cenderung kurang mengenakkan bagi sebagian pelakunya maupun orang yang terkait di dalamnya.

Selain itu, ada beberapa implikasi yang dimunculkan dalam buku ini. Pertama, hasil kajian tentang awal Gerakan Tengkorak Putih menunjukkan bahwa kelompok gerilya ini sudah terbentuk sebelum 2 September 1949. Kesimpulan ini jelas sebuah generalisasi yang mempunyai validitas yang lebih terpercaya dibandingkan dengan generalisasi sebelumnya yang menyatakan bahwa kelompok gerilya ini dibentuk tidak lama sesudah peristiwa Pertemuan di Munggu Raya, 2 September 1949.

Kedua, menyangkut masalah *cease fire*. Buku ini juga memberikan penjelasan yakni pelaksanaan *cease fire* dalam arti penghentian permusuhan yang resmi di Kalimantan Selatan baru ditetapkan dan berlaku berdasarkan hasil Perundingan 16 – 17 Oktober 1949 dan bukannya sebagai hasil dari Pertemuan di Munggu Raya, walaupun dalam rentang waktu antara kedua pertemuan tersebut juga terjadi suatu *cease fire* (penghentian tembak menembak).

Ketiga, hasil kajian juga menunjukkan bahwa aksi-aksi kelompok gerilya ini cenderung bersifat ancaman dan bukannya berwujud kekerasan, serta mempunyai pengaruh yang relatif tidak begitu besar terhadap kemajuan gerilya dan perkembangan politik waktu itu. Dengan demikian, adalah hal yang terlampau berlebihan apabila ada yang menyatakan bahwa kelompok gerilya ini telah mengakibatkan pertumpahan darah dimana-mana.

## Daftar Sumber

### A. Buku, Skripsi, Memoar

- Abdis, M.S. 1984. *Ekspedisi Bergelombang ke Kalimantan*. Jakarta: Naskah tidak diterbitkan.
- Amirin, A Tatang. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Arifin, E. Zaenal. 1990. *Penulisan Karangan Ilmiah dengan Bahasa Indonesia yang Benar*. Jakarta: Mediyatma Sarana Perkasa.
- Basry, Hassan. 1961. *Kisah Geril(y)a Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949*, Djilid Pertama Kalimantan Diakhir Perang Dunia II — 1945 sehingga lahirnja ALRI Divisi IV — 1946. Bandjarmasin: Jajasan Lektur Lambung Mangkurat.
- Basry, Hassan. Tanpa Tahun. *Kisah Gerilya Kalimantan: Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi IV Pertahanan Kalimantan Dalam Revolusi Indonesia 1945-1949*. Banjarmasin: Naskah tidak diterbitkan.
- Basry, Hassan. 2003. *Kisah Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949*, Jilid I dan II. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua.
- Danussaputera. 1985. *Kalimantan Terbakar oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan*. Banjarbaru: Naskah tidak diterbitkan.
- Danussaputera. 10 Desember 1991. Penjelasan tertulis kepada penulis. Banjarbaru.

- Depdikbud. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Djamhari, Saleh As'ad. 1971. *Ichdisar Sedjarah Perdjungan ABRI (1945-Sekarang)*. Djakarta (?): Dephankam Pusat Sedjarah ABRI.
- Gafuri, Ahmad. 1968. *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan 1945-1949*. Malang: Skripsi Jurusan Sejarah Antropologi FKIS IKIP Malang.
- Gottschalk, Louis. 1975. a.b. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Harvey, Barbara Sillars. 1984. *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Ichtiar baru-Van hoeve. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. 2 Ces-Ham. Jakarta.
- Imran, Amirin *et al*. 1971. *Sejarah Perkembangan Angkatan Darat*. Djakarta (?) : Dephankam Pusat Sedjarah ABRI.
- Justian, Dhany. 1972. *Sejarah Singkat Lahirnya Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: Skripsi Jurusan Sejarah FKg Unlam.
- Kartodirdjo, Sartono, 1977. "Metode Penggunaan Bahan Dokumenter". Dalam Koentjaraningrat (Redaksi). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1949. *Lukisan Revolusi Rakjat Indonesia 1945-1949*. Jogjakarta.
- Kementerian Penerangan RI. 1953. *Republik Indonesia: Kalimantan*. Banjarmasin: Djawatan Penerangan Provinsi Kalimantan.

- Kodam X/LM. 1962. *Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun*. Banjarmasin.
- Kodam X/Lam. 1970. *Sedjarah Singkat Kodam X/Lam Wadja Sampai Kaputting*. Banjarmasin: Semdam X/Lam.
- Lucas, Anton. 1982. "Masalah Wawancara dengan Informan Pelaku Sejarah di Jawa". Dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson (Editor). *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, A. H. 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 11. Bandung: Angkasa.
- Nawawi, Ramli dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Depdikbud.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*, Jakarta: Inti Idayu Press.
- Notosusanto, Nugroho (Editor). 1985. *Pejuang dan Prajurit*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J. S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan. *Sejarah Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan Periode 1945-1949*. Banjarmasin.
- Saleh, M. Idwar. 1988. *ALRI Divisi IV-A: Suatu Lukisan Tentang Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kemundurannya*. Banjarmasin: Laboran Penelitian Universitas Lambung Mangkurat.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Van Dijk, C. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Wajidi. 2007. *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik*. Pustaka Banua: Banjarmasin.
- Widja, I Gde. 1989. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Yaman, G.M. 1979. *Route Gerilya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan*. Banjarbaru: Naskah tidak di terbitkan.
- Zurkani. 1991. *Sengketa Garis Demarkasi di Kandangan Tahun 1949*. Banjarmasin: Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam.

## **B. Surat Kabar**

- “Surat djawaban ALRI kepada Kiai Batumandi”, dalam *Soeara Kalimantan*, Bandjarmasin, Djumat 19 Agustus 1949 No. 201 Tahun Kelima.
- “Pegawai2 kantor2 Pemerintah dan Maskapai tidak masuk bekerdja”, dalam *Soeara Kalimantan*, Selasa 30 Agustus 1949 Tahun Ke V no. 219 Siaran Petang pukul 12.00.
- ”ALRI bertindak terhadap Anasir2 jang tidak bertanggung djawab”, dalam *Kalimantan Berdjuang* tahun ke V no. 295 Senin 17 Oktober ’49.
- “Apa dibelakang lajar Ketegangan di Hulu Sungai?”, dalam *Kalimantan Berdjuang* No. 182 Tahun ke V Kemis 14 September 1949.
- ”Hulu Sungai diselesaikan”, dalam *Kalimantan Berdjuang* No. 203 tahun ke V Rabu 11 Oktober 1950.
- ”Lagi2 pamplet?”, dalam *Kalimantan Berdjuang* no. 864 Tahun ke IV Djum’at 2 Desember 1949.
- ”Keamanan dan Ketertiban RIS Tanggung Djawab sendiri” Kata Kol Simatupang, dalam *Kalimantan Berdjuang*, No. 854 Tahun ke IV, Minggu 20 Nopember 1949.

“Pertemuan ramah tamah dengan Dr. Major Suharsono” dalam *Kalimantan Berdjuang* No. 848 tahun IV Sabtu 12 Nopember 1949.

Kalimantan Berdjuang no. 833 tahun ke V Selasa 25 Oktober 1949.

“Tjorat-tjoret Dari Hulu Sungai Utara (2)”, dalam *Kalimantan Berdjuang*, No. 853 Tahun ke IV, Sabtu 19 Nopember 1949.

“Tjorat-tjoret Dari Hulu Sungai Utara (3)” , dalam *Kalimantan Berdjuang*, No. 854 Tahun ke IV, Minggu 20 Nopember 1949.

“Urusan bekas Tentera”, dalam *Harian Pengharapan* No. 25 tahun ke I Kemis, 14 September 1950.

“Pengumuman No.7 Tentara Nasional Indonesia Divisi Lambu Mangkurat”, dalam *Kalimantan Berdjuang*, Rabu 7 Desember 1949.

*Kalimantan Berdjuang*, Kamis 1 Desember 1949.

“Fikiran merdeka: Panitia Penjaring”, dalam *Kalimantan Berdjuang*, No. 5 Tahun ke V, Minggu 5 Februari 1950.

*Kalimantan Berdjuang*, Jumat 22 Desember 1950.

”Apa arti pedjoang kemerdekaan?”, dalam *Kalimantan Berdjuang* No. 196 Th ke V, Minggu 1 Oktober 1950.

”Peristiwa Korban 40.000 jiwa di Sulsel Jangan Dilupakan”, dalam *Surya*, Senin 10 Desember 1990.

### **C. Informan**

Abdul Hasan. 55 Tahun. Keluarga Pemilik Markas Pasukan Tengkorak Putih di Sungai Kudung. Tani. Wawancara 23 Februari 1992. Desa Sungai Kudung RT. 1 No. 11 Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan.

Abdul Manaf. 80 Tahun. Pengurus Urusan Perlengkapan Pasukan Tengkorak Putih. Tani. Wawancara 24 Ja-

- nuari 1992. Bakarung Selatan RT. 1 Dusun 1 No. 25 Kecamatan Angkinang, Hulu Sungai Selatan.
- Ahmad Sani G. 62 Tahun. Anggota Pasukan Tengkorak Putih. Peltu Purn. TNI Angkatan Darat. Wawancara 31 Januari 1992. Kasarangan RT. 2 RK. 4, Km. 4 Kecamatan Labuan Amas Utara, Hulu sungai Tengah.
- Alimin. 70 Tahun. Anggota Pasukan Tengkorak Putih. Lettu Purn. TNI Angkatan Darat. Wawancara 2 Maret 1992. Jl. Bumi Mas Raya RT. 13 RW. 5 No. 37 Pemurus Baru, Banjarmasin.
- Aminah. 70 Tahun. Anggota Pengurus Dapur Umum di Markas Sungai Kudung. Tani. Wawancara 24 Januari 1992, Bakarung Selatan RT. 1 Dusun 1 No. 25 Kecamatan Angkinang, Hulu Sungai Selatan.
- Amis A. 65 Tahun. Komandan Kompi II Pasukan Tengkorak Putih di Markas Gambah Dalam. Tani. Wawancara 26 Januari 1992. Gambah Luar RT. 9 No. 3 Kecamatan Kandangan Kota Hulu Sungai Selatan.
- Asyikin. 63 Tahun. Komandan Seksi Polisi Laskar Pasukan Tengkorak Putih di Markas Sungai Kudung. Peltu Purn. TNI Angkatan Darat. Wawancara 27 Januari 1992. Jl. Ahmad Yani Parincahan RT. 12 RK. 5 No. 7 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kota, Hulu Sungai Selatan.
- Baseri B. 63 Tahun. Romandan Regu II Pasukan Tengkorak Putih. Pensiunan Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN). Wawancara 19 dan 20 Januari 1992. Jl. Martajiwa RT. 3 Dusun 2 Bamban Kecamatan Angkinang, Hulu Sungai Selatan.
- Danussaputera. 75 Tahun. Komandan Batalyon Bantuan Ternpur 138 Tengkorak 40.000 ALRI dan "Pimpinan Umum"/Penanggung Jawab Gerakan Tengkorak Putih. Letnan Kolonel Purn. TNI Angkatan Laut. Wawancara 17 dan 22 Desember 1991. Jl.

- Guntung Lua No. 2 RT. 39 RW. 7 Guntung Lua, Banjarbaru.
- G.M. Yaman. 66 Tahun. Komandan Komando Markas Daerah (KMD) Tengah merangkap Korektor Susunan Markas Besar RX-8. Kapten Purn. TNI Angkatan Darat. Wawancara 17 Desember 1992. Jl. Karamunting I Komplek PU No. 2 Banjarbaru.
- Minderi Umar. 64 Tahun. Komandan Peleton I Pasukan Tengkorak Putih di Negara/Daha. Kopda Purn. TNI Angkatan Darat. Wawancara 27 Januari 1992. Desa Kambang Basar Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan.
- Muhammad A. 62 Tahun. Anggota Pasukan Tengkorak Putih. Sersan Mayor Purn. TNI Angkatan Darat. Wawancara 29 Januari 1992. Pagat RT. 2 RW. 1 No. 88 Kecamatan Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah.
- Muslim. 64 Tahun. Anggota Pasukan Tengkorak Putih. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kotamadya. Wawancara 5 Maret 1992. Jl. Kendedes Raya No. 144 Komplek Beruntung Jaya, Banjarmasin.
- Mustafa. 65 Tahun. Anggota Pasukan Tengkorak Putih. Tani. Wawancara 22 Januari 1992. Desa Gumbil RT. 2 No. 2 Kecamatan Telaga Langsung Hulu Sungai Selatan.
- Rumli. 65 Tahun. Komandan Regu III Pasukan Tengkorak Putih. Pensiunan Pamong Praja. Wawancara 22 Januari 1992. Desa Gumbil RT. 2 No. 36 Kecamatan Telaga Langsung Hulu Sungai Selatan.
- Syahdan. 65 Tahun. Wakil Komandan Regu II Pasukan Tengkorak Putih. Sersan Mayor Purn. TNI Angkatan Darat. Wawancara 24 Januari 1992. Gambah Luar Selatan RT. 1 Dusun 1 No. 15 Kecamatan Kandangan Kota Hulu Sungai Selatan.

- Zainal. 63 Tahun. Wartawan Surat Kabar Kalimantan Berdjuang (Ka-Be). Sekretaris Redaksi SKA. Banjarmasin Post. Wawancara 1 Maret 1992. Jl. Meratus RT. 13A Gang Samudera No. 8. Banjarmasin.
- Zhafury Zumri. 70 Tahun. Anggota Pasukan Tengkorak Putih. Pensiunan Pegawai IAIN Antasari, Wawancara 15 Februari 1992. Jl. Bandarmasih No. 57, Banjarmasin.

## Indeks

### A

- Abdul Aziz, Letnan H 132  
Abdul Hasan 43, 44, 61, 68, 128, 132  
Abdul Manaf 44, 68, 77, 78, 89, 128, 132  
Abdul Muti ii, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 45, 57, 60, 61, 70, 77, 79, 132  
Abdul Rasyid 43, 45, 132  
Abdussalam 36, 132  
Ahmad Hasan, H 132  
Al Azhar, Universitas 132  
Ali Akbar 36, 45, 57, 132  
Ali Budiarjo, Kapten 132  
Alidan 61, 132  
Alimin 36, 40, 41, 44, 62, 66, 67, 77, 78, 88, 89, 111, 116, 117, 129, 132  
ALRI Divisi IV 132  
Amat Indar 45, 132  
Ambutun 63, 132  
Aminah 68, 78, 129, 132  
Ampau 132  
Amuntai 25, 76, 84, 132  
Andas 37, 132  
Angah 61, 132  
Apat Irang 88, 132  
APRI xi, 31, 49, 50, 54, 112, 113, 132  
APRIS xi, 14, 93, 95, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 116, 122, 132  
Arjan 37, 66, 132  
Arsad, H 132  
Arya, Mayor P. 132  
Asli Zuhri, Letnan Dua 132  
Asmuni 83, 132  
Asyikin 36, 39, 41, 62, 79, 89, 116, 129, 132  
Awad Said 97, 132  
Awang Yusuf, Letnan Dua 132

### B

- Bachtiar 79, 132

- Banjarmasin vi, viii, ix, 13,  
19, 20, 22, 24, 35,  
36, 40, 41, 43, 44,  
46, 52, 54, 56, 59,  
64, 65, 66, 67, 70,  
72, 73, 74, 76, 77,  
78, 79, 82, 84, 87,  
88, 89, 90, 91, 92,  
93, 96, 97, 111, 115,  
116, 117, 120, 121,  
122, 124, 125, 126,  
127, 129, 130, 131,  
132, 138
- Barabai 38, 76, 80, 82, 83,  
84, 102, 132
- Barisan Parang Bungkul  
18, 132
- Barisan Pelopor Pemberon-  
tak Kalimantan Indo-  
nesia xi, 25, 132
- Barisan Pemberontak Re-  
publik Indonesia 21,  
132
- Baseri D 36, 37, 39, 46,  
59, 60, 62, 70, 78,  
132
- Batalyon 605 vi, ix, 115,  
117, 118, 122, 133
- Batalyon Bantuan Tempur  
138 ALRI 21, 133
- Batu Tangga 83, 84, 133
- Belanda v, vi, 14, 17, 18,  
19, 20, 21, 25, 28,  
29, 30, 31, 32, 33,  
35, 37, 42, 46, 49,  
50, 51, 52, 53, 54,  
57, 58, 59, 60, 61,  
62, 63, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 70, 71,  
72, 73, 74, 75, 76,  
77, 80, 81, 83, 84,  
85, 88, 89, 90, 92,  
93, 94, 97, 103, 104,  
108, 109, 119, 120,  
121, 122, 133
- Benteng Kandangan 65,  
66, 70, 76, 77, 79,  
133
- Berahim 79, 133
- BFO xi, 50, 51, 133
- Bidjuri, Kapten 133
- Birayang 25, 51, 77, 84,  
133
- Biro Rekonstruksi Nasional  
105, 133
- Bloedemaker 74, 133
- BPPKI xi, 25, 133
- Bukittinggi 78, 87, 133
- Bung Hatta 28, 133
- Bung Karno 28, 133
- Bung Muda 79, 89, 133
- Bung Tomo 21, 22, 117,  
133
- Bustani 79, 89, 133
- C**
- cease fire vi, 14, 20, 38,  
42, 49, 50, 51, 52,  
53, 54, 56, 59, 60,  
61, 64, 69, 72, 75,  
76, 88, 120, 121,  
123, 133
- Cease fire order 133
- Central Joint Board 51,  
54, 133
- Corps Tjadangan Nasional  
xi, 105, 133
- CTN xi, 105, 133

## D

- Danussaputera, Kapten 133  
Darmawi, H 133  
Darmin 66, 133  
Deelman, A.G 133  
de facto 17, 19, 20, 23, 25, 30, 104, 133  
De Indische Courant 70, 91, 133  
de jure 23, 133  
Delanggu 28, 133  
Den Haag 92, 133  
Des Indes, Hotel 133  
Divisi Lambung Mangkurat vi, 14, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 112, 122, 133  
Divisi Tengkorak Putih 13, 41, 42, 58, 80, 82, 90, 91, 112, 133  
Dwiwarna, Lapangan 133

## E

- Edmond, Mayor William D 133  
Eisenberger, Dr 133

## F

- Firmansyah, Mayor 133

## G

- Gambah Dalam x, 66, 78, 79, 129, 133  
Gambiro, dr 133  
Gambut 77, 79, 87, 88, 133

- Garau 88, 133  
GERAK xi, 25, 133  
Gerakan Rahasia Kalimantan xi, 25, 133  
Gerakan Rakyat Memper-  
tahankan Republik  
Indonesia 25, 133  
Gerakan Revolusi Rakyat  
Indonesia xi, 13, 18,  
133  
Gerakan Tengkorak Putih  
iv, v, vii, ix, 13, 14,  
15, 21, 22, 27, 35,  
39, 40, 41, 43, 45,  
56, 62, 69, 76, 91,  
119, 123, 129, 133,  
138  
GERMERI xi, 25, 133  
Go Teng Po 35, 39, 40, 41,  
43, 57, 66, 68, 70,  
91, 133  
Go Teng Poe 40, 133  
Go Teng Pu 40, 133  
Gouverneur van Borneo  
74, 134  
GRRI xi, 13, 18, 134  
Gumbran Saleh 33, 134  
Gusti Aman, Kapten 134  
Gusti Mastur Ismail 33,  
134  
Gusti Tarmizi 32, 134

## H

- Habibi 77, 134  
Habirau 38, 134  
Haderi 66, 134  
Halimah 43, 68, 134  
Harding, van 134  
Haruyan 24, 32, 34, 134  
Hassan Basry, Letnan Kolo-

nel 134  
 Hok Tong Hen 65, 66, 70,  
 79, 88, 89, 91, 134  
 Hudari 68, 134  
 Hulu Sungai vi, ix, 18, 30,  
 52, 76, 80, 81, 82,  
 84, 85, 86, 87, 92,  
 95, 97, 99, 100, 103,  
 111, 115, 120, 121,  
 127, 128, 129, 130,  
 134, 138

## I

Ibnu Hajar 66, 86, 87, 134  
 Ishak 77, 116, 117, 134

## J

Jaderi 22, 134  
 Jambu 79, 134  
 Jarkasi Utir 45, 134  
 Jemenen 36, 134  
 Jogya 134

## K

Kalimantan Barat 14, 24,  
 134  
 Kalimantan Berdjung 20,  
 27, 41, 42, 58, 59,  
 62, 77, 82, 84, 86,  
 87, 91, 94, 97, 98,  
 99, 100, 101, 106,  
 107, 113, 127, 128,  
 131, 134  
 Kalimantan Selatan i, iii,  
 iv, v, vi, 13, 14, 15,  
 17, 19, 20, 21, 22,  
 24, 26, 27, 30, 31,  
 32, 35, 39, 50, 51,  
 52, 53, 54, 55, 56,

61, 70, 72, 75, 76,  
 78, 82, 93, 95, 97,  
 101, 102, 103, 108,  
 113, 119, 120, 123,  
 125, 126, 134, 138,  
 139  
 Kalimantan Timur 24, 26,  
 30, 46, 60, 62, 115,  
 134  
 Kandangan ii, x, 20, 25,  
 26, 31, 34, 36, 37,  
 41, 43, 52, 54, 55,  
 56, 58, 59, 60, 63,  
 64, 65, 66, 70, 73,  
 76, 77, 78, 79, 80,  
 81, 82, 90, 97, 106,  
 112, 119, 127, 129,  
 130, 133, 134  
 Karang Jawa 61, 79, 134  
 Kesatuan Rakyat Indonesia  
 Yang Tertindas 87,  
 134  
 KL 134  
 Klaten 28, 134  
 KNI xi, 19, 134  
 KNIL vi, xi, 14, 20, 30, 34,  
 38, 61, 62, 63, 64,  
 65, 66, 72, 76, 77,  
 79, 82, 87, 88, 89,  
 90, 92, 93, 94, 95,  
 101, 102, 107, 108,  
 109, 110, 117, 120,  
 121, 122, 134  
 Kohl, Letnan Kolonel 134  
 Komisi Tiga Negara xi, 53,  
 73, 75, 134  
 Koster, Letnan J 134  
 Kotton, Letnan 134  
 KPBBi xi, 53, 134  
 KTN xi, 53, 73, 74, 134

Kuala Lumpur 78, 134  
Kuin Muara 43, 56, 87,  
134  
Kulabeti 107, 134  
Kusasi, A 134

## **L**

Lasykar Rakyat Murba 13,  
41, 58, 59, 60, 134  
Linggajati, Persetujuan  
134  
Lopido 36, 65, 70, 134

## **M**

Malintang 78, 89, 134  
Mandau Telabang Kaliman-  
tan Indonesia xi, 13,  
18, 134  
Marabahan 22, 134  
Mardang 43, 68, 134  
Martinus 76, 80, 134  
Matsih 36, 65, 70, 135  
Merle Cochran 49, 135  
Misrani Darham 45, 135  
MN 1001 81, 107, 109,  
110, 135  
Mobiele Brigade ALRI 21,  
25, 135  
Mobiele Troops 138 Wher-  
kreise Kalimantan  
21, 135  
Mohamad Roem, Mr. 135  
Mohammad Hatta 94, 135  
Mohammad Noor, Ir Pan-  
geran 135  
Mojokerto 23, 31, 33, 135  
MTK 31, 109, 110, 135  
MTKI xi, 13, 18, 81, 107,  
109, 110, 114, 135  
Muhammad 31, 45, 84,

111, 116, 130, 135  
Mukeri Abadi 46, 60, 135  
Munggu Raya vi, ix, 13,  
14, 26, 42, 43, 49,  
50, 54, 56, 57, 61,  
72, 73, 120, 123, 135  
Muntoyo, Kapten 135  
Murba 14, 41, 42, 58, 59,  
60, 91, 107, 134, 135  
Mursyid 24, 36, 135  
Mursyid Seman, Letnan  
Muda 135  
Muslim 40, 65, 66, 79, 89,  
116, 130, 135  
Mustafa 37, 62, 77, 78, 79,  
130, 135  
Mutisme 70, 135  
Muzakkar, Kahar 135

## **N**

Nagara 38, 135  
Nateh 83, 84, 135  
Neals, Kolonel 135  
Nederlands Militaire Missie  
xi, 94, 135  
NICA v, vi, xi, 13, 14, 17,  
19, 20, 30, 34, 38,  
61, 62, 63, 64, 65,  
66, 72, 77, 82, 87,  
88, 92, 93, 103, 104,  
116, 117, 120, 121,  
122, 135  
Nitimiharjo, Sersan Mayor  
135  
NKRI xi, 135  
Noor Ali, Sersan Mayor 37,  
135  
Norman, Letnan 135

## P

Padang Batung 35, 36, 37,  
63, 128, 130, 135

PAIM xi, 18, 135

Panarukan 22, 135

Panitia Pembantu Tentara  
Nasional Indonesia  
xi, 96, 135

Partai Anti Indonesia  
Merdeka xi, 18, 135

Pekapuran 88, 135

Pelaihari 76, 87, 89, 90,  
135

Pemerintahan Darurat Re-  
publik Indonesia 22,  
135

Pemerintahan Gubernur  
Tentara ALRI 18, 19,  
31, 135

Pengembangan 79, 135

PERESTEIN xi, 106, 135

Pertemuan Permusy-  
awaratan Federal 50,  
135

Pimpinan Bersama Pusat  
51, 135

PPTK xi, 105, 135

PPTNI xi, 96, 97, 135

Prije Pers 70, 91, 135

## R

Rangas 83, 84, 135

Rantau 64, 135

Rantauan 78, 135

Republik Indonesia ii, xi,  
xii, 14, 19, 21, 22, 23,  
25, 28, 30, 31, 49,  
50, 51, 53, 54, 55,  
73, 74, 75, 78, 90,

92, 93, 96, 104, 109,  
124, 125, 126, 132,  
133, 135

Ria, Bioskop 136

Riau 24, 26, 136

RIS xi, 93, 94, 99, 108,  
116, 127, 135

Roem-Royen, Persetujuan  
136

Royen, Dr. J.H. van 136

Rusli 79, 136

Rusli Bangsing 79, 136

## S

Sa'ban, R 136

Saal 66, 136

Said Abdul Kadir ii, 31, 32,  
33, 34, 35, 37, 40,  
41, 44, 45, 57, 58,  
60, 61, 66, 68, 70,  
77, 79, 84, 87, 89,  
92, 110, 111, 116,  
136

Said Nunci 77, 116, 117,  
136

Samidrie Dumam 44, 62,  
136

Sampit 22, 136

Samuda 22, 136

Sarkawi 45, 136

Simatupang, Kolonel 136

SKI xii, 97, 136

Sualang, Letnan Satu 136

Subari, Kapten R 136

Sugiman 45, 136

Suhaili 36, 45, 57, 136

Suharjo Harjowardojo,  
Jenderal Mayor 136

Suharsono, Mayor dr 136

Sukanda Bratamengala,

Letnan Kolonel 136  
 Sukeri 66, 136  
 Sunandio 46, 60, 136  
 Sungai Acan 88, 136  
 Sungai Kudung ii, x, 22,  
     36, 37, 39, 43, 44,  
     56, 60, 63, 65, 66,  
     67, 68, 77, 78, 79,  
     83, 87, 119, 128,  
     129, 136  
 Sungai Raya 79, 136  
 Surabaya 21, 22, 136  
 Suri, H 136  
 Suriansyah 79, 87, 136  
 Sutarman, Letnan Satu  
     136  
 Syahrurum Ipul 45, 136  
 Syaifullah, Lasykar 136  
 Syaifullah, Pembakal 136  
 Syarlan 37, 136  
 Syukur Gani 36, 45, 57,  
     111, 136

## **T**

Tabat 24, 136  
 Taher, H 136  
 Tan Malaka 87, 136  
 Tarmin 61, 136  
 Tarsad 65, 66, 70, 79, 136  
 Tatas, Asrama 136  
 Telaga Langsat 63, 130,  
     136  
 Tengkorak Merah 107, 136  
 Tentara Kucing Hitam 13,  
     18, 136  
 Tentara Lawung 13, 18,  
     136  
 Tentara Pelajar 32, 33, 136  
 Terang, H 97, 136  
 Territorial Commandant

Voor Zuider en Ooster  
 Afdeling van Borneo  
 22, 35, 136

Territorium VI 101, 103,  
     111, 112, 114, 115,  
     117, 136

TKR 27, 136

TNI vi, xii, 27, 49, 50, 54,  
     78, 90, 93, 94, 100,  
     101, 102, 106, 107,  
     109, 110, 111, 115,  
     116, 129, 130, 136

Torino 66, 136

TRI xii, 28, 31, 39, 109,  
     110, 136

TRI Persiapan Sulawesi 28,  
     136

Tukacil Imur 45, 136

Tulamak 43, 136

Tulus, Sersan 137

Tumbukan Banyu 38, 136

Tusin, Kopral 137

## **U**

UNCI xii, 49, 50, 51, 53,  
     54, 137

Urai Nawawi, Letnan Dua  
     137

Utuh Darham 97, 137

Utuh Salman 45, 137

## **V**

Veenendal, Letnan Kolonel  
     H.J. 137

Verdijk, Kapten 137

Vergunning 137

## **W**

Westerling, Kapten Raymond 137

## **Y**

Yakub 66, 137

Yaman, G.M. 127, 137

## **Z**

Zainal 36, 40, 46, 59, 62,  
131, 137

Zainal Abidin, Kapten 137

Zakaria Madun, Letnan  
Kolonel 137

## Biodata Penulis



**Wajidi** adalah Peneliti Madya bidang Ilmu Sejarah dan Arkeologi lainnya pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Dilahirkan di Bulayak (sekarang wilayah Kecamatan Hantakan) pada tanggal 15 Januari 1969 namun dibesarkan di Pagat Kecamatan Batu Benawa, dan seterusnya tercatat Pagat Hulu

Sungai Tengah sebagai tempat kelahiran. Pendidikan ke-sarjanaannya (Drs) ditempuh di PSP Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin, lulus tahun 1992.

Sebelum menjadi peneliti, ia pernah bekerja di Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan (1993-2001).

Tulisannya pernah terbit di Banjarmasin Post, Serambi Ummah, Dinamika Berita, Kalimantan Post, Barito Post, Radar Banjarmasin, Mata Banua, buletin Bandarmasih, buletin Masa Depan, majalah Kebudayaan, jurnal Kandil, jurnal Litbangda, jurnal Kebijakan Pembangunan, dan jurnal Komunika LIPI.

Ia adalah penulis buku: *Banua Halat, Suatu Kajian Akulturasi Budaya* (2010), *Gerakan Tengkorak Putih, Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950* (2010), *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950* (2008), *Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Sebuah Catatan Ringan* (2008), *Artum*

*Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan (2008), Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik (2007), Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942 (2007), dan anggota tim penulis/editor buku Urang Banjar dan Kebudayaannya (2005), dan buku Sejarah Banjar (2003).*

Penghargaan lomba karya tulis yang pernah ia terima diantaranya: (1) Pemenang II LKTI Bidang Pendidikan Tingkat Universitas Lambung Mangkurat (dalam tim, 1991); (2) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Senimania Republika dari Harian Republika Jakarta 1994; (3) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Dwidawasarsa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari ibu Tien Soeharto 1995; (4) Pemenang I LKT Peringatan Hari AIDS Internasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2000; (5) Pemenang II Lomba Penulisan Artikel Tingkat Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2003; (6) Pemenang I Lomba Penulisan Jurnalistik Tingkat Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Mendiknas 2005; (7) Pemenang III Lomba Penulisan Kebencanaan tahun 2009 kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mapiptek) BPPT.



# GERAKAN TENGGORAK PUTIH

**Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950**

Gerakan Tengkorak Putih adalah sebuah kelompok gerilya yang pernah eksis pada tahun terakhir perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (1949-1950). Keberadaannya di akhir masa revolusi fisik memberikan warna pada peran yang dimunculkannya, antara peran sebuah badan perjuangan di awal pembentukannya dengan stigma yang diberikan kepadanya sebagai gerombolan bersenjata pengacau keamanan di masa akhir keberadaannya di tahun 1950-an.

Aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih di akhir keberadaannya merupakan manifestasi yang antara lain disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian anggotanya terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk menjadikan mantan anggota KNIL sebagai bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Hal ini ditambah lagi dengan adanya persoalan lain seperti perasaan ketersingkirkan saat terkena proses demobilisasi mantan pejuang gerilya ke masyarakat maupun rasionalisasi anggota Divisi Lambung Mangkurat.



ISBN 978-602-97178-1-5

